

381.18

AmB

5 21

**STUDI AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA
DALAM PEMANFAATAN RUANG
DI KOTA SALATIGA**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota

Oleh :

**SRIE HANY AMBARWATY
L4D 000 099**



**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

UPT-PUSTAK-UNDIP

**STUDI AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA
DALAM PEMANFAATAN RUANG
DI KOTA SALATIGA**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

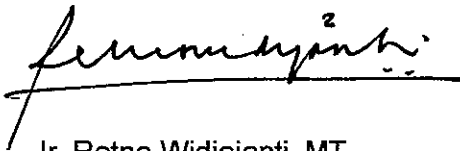
**SRIE HANY AMBARWATY
L4D 000 099**

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 03 Pebruari 2003

Dinyatakan Lulus/Tidak Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

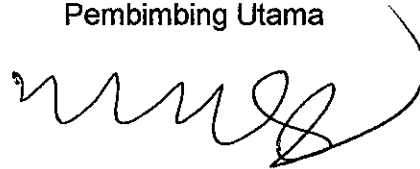
Semarang, 03 Pebruari 2003

Pembimbing Pendamping



Ir. Retno Widjajanti, MT

Pembimbing Utama



Ir. Parfi Khadiyanto, MSL

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro



Ir. Sugiono Soetomo, DEA.

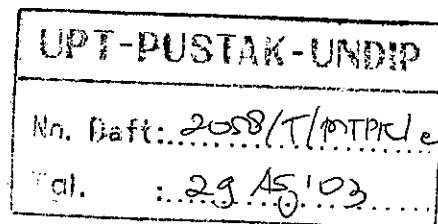
PERNYATAAN

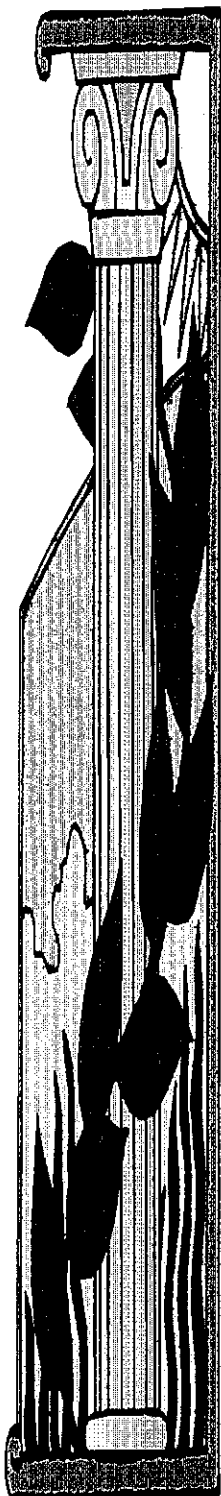
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, 03 Pebruari 2003



SRIE HANY AMBARWATY
NIM L4D 000 099





*Ada hikmah dibalik kesulitan yang dialami
dan Allah selalu memberikan yang terbaik,
karena Dia Maha Mengetahui.*

*"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan, dan
sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan "
(QS. Al Insyirah : 5&6)*

*Karya ini kupersembahkan bagi suami dan keluarga tercinta yang selalu setia
mendukung dan mendorongku untuk menjadi seseorang yang
lebih baik.....*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah hirobbil alamin. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas selesainya penyusunan tesis dengan judul “Studi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Dalam Pemanfaatan Ruang Di Kota Salatiga”. Studi ini dilakukan untuk mengetahui perilaku khas PKL, baik dalam berjualan maupun dalam memanfaatkan ruang-ruang kota yang ada, serta mengetahui persepsi masyarakat terhadap keberadaan aktivitas tersebut.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan pernah selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. **Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc.** selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. **Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA.** selaku Ketua Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota Universitas Diponegoro Semarang.
3. **Ir. Parfi Khadiyanto, MSL** selaku pembimbing utama yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan bimbingan di sela-sela kesibukannya.
4. **Ir. Retno Widjajanti, MT** selaku pembimbing pendamping, yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan bimbingan di sela-sela kesibukan tugas dan kegiatannya.
5. **Ir. Hadi Wahyono, MA** selaku pembahas yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berguna bagi penyempurnaan laporan tesis ini.
6. **PM. Broto Soenaryo, SE, MSP** selaku penguji yang telah memberikan saran dan koreksi dalam penyempurnaan laporan tesis ini.
7. **Ketua Project CPCO - Capacity Building in Urban Infrastructure Management (CPCO-CBUIM)**, yang telah memberikan beasiswa untuk menempuh studi ini.
8. **Walikota Salatiga** yang telah memberikan kesempatan dan ijin untuk melanjutkan studi ini.
9. Kepala dinas/kantor/instansi terkait beserta staf yang telah memberikan informasi bagi kelengkapan penyusunan data.
10. Staf pengajar di Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Kota Universitas Diponegoro Semarang, yang telah membuka wawasan penulis selama menempuh studi.
11. Para staf tata usaha/administrasi di Program Magister Teknik Pembangunan Kota; *mbak Luluk, mbak Didin, mbak Ratih, mbak Linda, mas Djanuanto*, dan *mas Supri*, yang telah banyak membantu penulis selama menempuh studi.
12. Suami dan kekasih tercinta, *Mas Boang Setiyo Utomo*, yang telah dengan setia, sabar, penuh cinta, dan pengertian yang besar, serta dorongan semangat yang tak pernah putus yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
13. Keluarga Pengilon; *Mamah* dan adik-adik tercinta, *Andi, Aries*, dan *Eli*, atas dukungan semangat dan doa, serta *Almarhum Apa* yang dahulu senantiasa memberi dorongan kepada penulis untuk menjadi seseorang yang lebih baik
14. Keluarga Kalioso; Bapak dan Ibu *Sudarmo*, serta adik-adik dan keponakan tercinta; *Witut, Agung, Bagas, Vian, Yoyok*, dan *Ila*, atas dukungan semangat dan doa.

15. Teman-teman CBUIM Angkatan 3; *mbak Yusminar, mbak Erma, mas Purnomo, mas Beta, mbak Ani, mbak Kukuh, mbak Ratnani, mbak Dwiki, mbak Indah, mbak Puji, mas Haryo, mas Arief, mas Agus, mas Joko, mas Sulis, pak Wahyu, pak Mustafa, pak Bakti, dan pak Bambang*, atas kebersamaan dan kekompakan, serta dukungan semangat selama menempuh studi, merupakan kenangan yang indah dan tak terlupakan dalam hidup.
16. Rekan-rekan di BAPPEDA Kota Salatiga, yang telah memberikan informasi yang berharga yang berkaitan dengan topik tesis, juga dorongan semangat dan doa selama penulis menempuh studi.
17. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, namun setidaknya dapat menambah sedikit wawasan pengetahuan mengenai aktivitas PKL di perkotaan pada umumnya, dan di Kota Salatiga pada khususnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Pebruari 2003

Penulis

Srie Hany Ambarwaty

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Penelitian	7
1.3.2. Sasaran Penelitian	7
1.3.3. Manfaat Penelitian	8
1.4. Ruang Lingkup	8
1.4.1. Ruang Lingkup Materi	8
1.4.2. Ruang Lingkup Spasial	10
1.5. Posisi Penelitian	12
1.6. Kerangka Pikir Penelitian	14
1.7. Pendekatan dan Metode Pelaksanaan Studi	17
1.7.1. Pendekatan Studi	17
1.7.2. Metode Pelaksanaan Studi	17
1.7.2.1. Kebutuhan Data	17
1.7.2.2. Teknik Pengumpulan Data	22
1.7.2.3. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data	22
1.7.2.4. Teknik <i>Sampling</i>	23
1.7.2.5. Teknik Analisis Data	25
1.8. Sistematika Penulisan	27
 BAB II PEDAGANG KAKI LIMA DAN RUANG AKTIVITASNYA	 30
2.1. Konsep Sektor Informal	30
2.1.1. Pengertian Sektor Informal	30
2.1.2. Hubungan Sektor Formal dan Sektor Informal	33
2.2. Pedagang Kaki Lima Dalam Sektor Informal	35
2.2.1. Pengertian PKL	35
2.2.2. Pelaku PKL	39
2.3. Karakteristik Aktivitas PKL	40
2.3.1. Jenis Dagangan PKL	40
2.3.2. Bentuk Sarana Perdagangan PKL	40

2.3.3.	Pola Penyebaran PKL	42
2.3.4.	Pola Pelayanan Aktivitas PKL	43
2.4.	Ruang Aktivitas PKL	47
2.4.1.	Pengertian Ruang	47
2.4.2.	Karakteristik Ruang Aktivitas PKL	48
2.4.3.	Pilihan Ruang Aktivitas PKL	50
2.5.	PKL Dalam Rencana Tata Ruang Kota	52
2.6.	Rangkuman Kajian Teori	56
2.7.	Instrumen Penelitian	58
BAB III	GAMBARAN UMUM PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA	
	SALATIGA	60
3.1.	Gambaran Umum Kota Salatiga	60
3.1.1.	Kondisi Geografis Kota Salatiga	60
3.1.2.	Peran dan Fungsi Kota Salatiga	62
3.1.3.	Kebijakan Penataan Ruang Kota	63
3.1.4.	Fasilitas Perkotaan	65
3.1.5.	Perkembangan Jumlah Penduduk	67
3.2.	Pedagang Kaki Lima Di Kota Salatiga	69
3.2.1.	Perkembangan dan Penyebaran Lokasi Aktivitas PKL	69
3.2.2.	Peranan PKL Dalam Perekonomian Kota Salatiga	73
3.2.3.	Pola Pelayanan Aktivitas PKL Kota Salatiga	73
3.2.3.1.	Fungsi Pelayanan Aktivitas PKL	74
3.2.3.2.	Golongan Pengguna Jasa Aktivitas PKL	75
3.2.3.3.	Skala Pelayanan Aktivitas PKL	76
3.2.3.4.	Sifat Pelayanan Aktivitas PKL	76
3.2.3.5.	Kebijakan Pemerintah Kota Salatiga Terhadap Aktivitas PKL	77
3.3.	Karakteristik Lokasi Studi	80
BAB IV	ANALISIS AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA DALAM	
	PEMANFAATAN RUANG DI KOTA SALATIGA	91
4.1.	Aktivitas PKL di Kota Salatiga	91
4.1.1.	Analisis Perilaku Aktivitas Usaha PKL	91
4.1.1.1.	Jenis Dagangan PKL	92
4.1.1.2.	Bentuk Sarana Perdagangan PKL	94
4.1.1.3.	Lama Waktu Aktivitas PKL	98
4.1.1.4.	Pola Penyebaran dan Pengelompokkan PKL	99
4.1.1.5.	Rangkuman Analisis Perilaku Aktivitas Usaha PKL ...	101
4.1.2.	Analisis Perilaku PKL Dalam Pemanfaatan Ruang Sebagai Lokasi Usaha	101
4.1.2.1.	Lokasi Aktivitas PKL	102
4.1.2.2.	Status Ruang Aktivitas PKL	107
4.1.2.3.	Jenis Ruang Aktivitas PKL	108
4.1.2.4.	Luas Ruang Aktivitas PKL	110
4.1.2.5.	Alasan Pemilihan Lokasi Usaha	110
4.1.2.6.	Perilaku PKL Dalam Penggunaan Tempat Usaha	111

4.1.2.7. Rangkuman Analisis Perilaku PKL Dalam Pemanfaatan Ruang Sebagai Lokasi Usaha.....	112
4.1.3. Analisis Hubungan Perilaku PKL Dalam Pemanfaatan Ruang dan Aktivitas Usaha.....	113
4.1.4. Analisis Persepsi PKL Terhadap Kedekatan dan Kemudahan Pencapaian Lokasi Usaha	117
4.1.4.1. Persepsi PKL Terhadap Kedekatan Lokasi Usaha	117
4.1.4.2. Persepsi PKL Terhadap Kemudahan Pencapaian Lokasi Usaha.....	122
4.2. Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Aktivitas PKL	122
4.2.1. Alasan Masyarakat Berbelanja di PKL.....	123
4.2.2. Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Keberadaan Aktivitas PKL	123
4.2.3. Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Negatif Aktivitas PKL	124
4.2.4. Persepsi Masyarakat Terhadap Perlunya Penataan Lokasi PKL	127
4.2.5. Persepsi Masyarakat Terhadap Lokasi Aktivitas PKL	127
4.2.6. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelompokan PKL	128
4.2.7. Rangkuman Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Aktivitas PKL	129
4.3. Analisis Hubungan Antara Kondisi PKL Dengan Persepsi Masyarakat	130
4.3.1. Perilaku Aktivitas Usaha PKL	131
4.3.2. Perilaku PKL Dalam Pemanfaatan Ruang Kota	132
BAB V P E N U T U P	135
5.1. Temuan Studi.....	135
5.2. Kesimpulan	139
5.3. Rekomendasi bagi Pemerintah Kota Salatiga	139
5.4. Usulan Studi Lanjut	141
DAFTAR PUSTAKA.....	142
LAMPIRAN	147

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	: Kebutuhan Data, Analisis, Sumber Data, Dan Teknik Analisis	20
Tabel I.2.	: Jumlah Sampel Menurut Lokasi Dan Jenis Dagangan PKL.....	24
Tabel I.3.	: Variabel-Variabel Analisis Tabulasi Silang (<i>Cross Tab</i>)	27
Tabel III.1	: Fasilitas Perkotaan Di Kota Salatiga Tahun 2000	66
Tabel III.2.	: Perkembangan Penduduk Kota Salatiga Tahun 1996-2000	67
Tabel III.3.	: Komposisi Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2000	68
Tabel III.4.	: Tingkat Pendapatan/Uang Saku Masyarakat	75
Tabel III.5.	: Asal Daerah Masyarakat Konsumen PKL	76
Tabel III.6.	: Peraturan-Peraturan Yang Terkait Dengan Keberadaan Aktivitas PKL Di Kota Salatiga.....	78
Tabel IV.1.	: Jenis Dagangan PKL.....	92
Tabel IV.2.	: Bentuk Sarana Perdagangan PKL.....	94
Tabel IV.3.	: Hubungan Antara Bentuk Sarana Perdagangan Dan Jenis Dagangan PKL.....	97
Tabel IV.4.	: Lama Waktu Aktivitas PKL	98
Tabel IV.5.	: Pengelompokkan PKL	100
Tabel IV.6.	: Jumlah PKL Menurut Lokasi Berjualan	102
Tabel IV.7.	: Status Ruang Aktivitas PKL	107
Tabel IV.8.	: Jenis Ruang Aktivitas PKL.....	109
Tabel IV.9.	: Luas Ruang Aktivitas PKL.....	110
Tabel IV.10	: Alasan Pemilihan Lokasi Usaha PKL.....	111
Tabel IV.11.	: Cara Penyimpanan Sarana Usaha PKL.....	112
Tabel IV.12.	: Hubungan Antara Perilaku PKL Dalam Berjualan Dengan Perilaku Dalam Pemanfaatan Ruang.....	114
Tabel IV.13.	: Persepsi PKL Terhadap Jarak Lokasi Usaha Dengan Kegiatan Masyarakat.....	117
Tabel IV.14.	: Persepsi PKL Terhadap Jarak Lokasi Usaha Dengan Tempat Tinggal...	119
Tabel IV.15.	: Persepsi PKL Terhadap Jarak Lokasi Usaha Dengan Sumber Bahan Baku.....	120
Tabel IV.16.	: Persepsi PKL Terhadap Jarak Lokasi Usaha Dengan Permukiman Terdekat.....	121

Tabel IV.17 : Persepsi PKL Terhadap Kemudahan Pencapaian Lokasi Usaha Dengan Sarana Transportasi Umum	122
Tabel IV.18. : Alasan Masyarakat Berbelanja di PKL.....	123
Tabel IV.19. : Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Keberadaan Aktivitas PKL.....	124
Tabel IV.20. : Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Negatif Keberadaan Aktivitas PKL.....	125
Tabel IV.21. : Persepsi Masyarakat Terhadap Perlunya Penataan Lokasi PKL	127
Tabel IV.22. : Persepsi Masyarakat Terhadap Lokasi Aktivitas PKL	127
Tabel IV.23. : Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelompokkan PKL Dan Alasannya..	128
Tabel IV.24. : Hubungan Kondisi PKL Dengan Persepsi Masyarakat	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	: Peta Lokasi Studi	11
Gambar 1.2.	: Kerangka Pikir Penelitian	16
Gambar 2.1.	: Pola Penyebaran Mengelompok (<i>Focus Agglomeration</i>).....	42
Gambar 2.2.	: Pola Penyebaran Memanjang (<i>Linier Concentration</i>).....	43
Gambar 3.1.	: Peta Wilayah Administrasi Kota Salatiga.....	61
Gambar 3.2.	: Peta Pembagian BWK (Bagian Wilayah Kota) Salatiga	64
Gambar 3.3.	: Diagram Batang Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Salatiga Menurut Kecamatan Tahun 1996-2000	67
Gambar 3.4.	: Diagram Komposisi Penduduk Kota Salatiga Menurut Mata Pencaharian Tahun 2000.....	69
Gambar 3.5.	: Peta Penyebaran Lokasi Aktivitas PKL.....	72
Gambar 3.6.	: Peta Lokasi Pengamatan.....	81
Gambar 3.7.	: Lokasi Aktivitas PKL Di Jl. Diponegoro, Jl. Patimura, Dan Jl. Jenderal Sudirman.....	84
Gambar 3.8.	: Lokasi Aktivitas PKL Di Lapangan Pancasila, Jl. A. Yani, Jl. Hasanudin, Jl. Osamaliki, dan Jl. Kartini-Jl. Pemotongan.....	90
Gambar 4.1.	: Bentuk Sarana Perdagangan PKL Di Kota Salatiga	96
Gambar 4.2.	: Aktivitas PKL Di Berbagai Lokasi Pengamatan	106
Gambar 4.3.	: Dampak Negatif Kehadiran Aktivitas PKL	126

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A : Kuesioner	147
Lampiran B : Pengkodean Jawaban Kuesioner.....	153
Lampiran C : Hasil Kuesioner PKL.....	157
Lampiran D : Hasil Kuesioner Masyarakat.....	158
Lampiran E : Analisis <i>Cross Tabulation</i>	159

ABSTRAK

Perkembangan Kota Salatiga yang diiringi dengan pertumbuhan jumlah PKL memerlukan penanganan yang lebih serius, karena PKL yang memanfaatkan ruang-ruang kota yang ada saat ini cenderung menimbulkan dampak visual yang kurang baik. Dampak tersebut muncul karena belum dikenalnya perilaku-perilaku khas PKL terutama dalam memanfaatkan ruang-ruang kota yang ada.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui perilaku PKL dalam memanfaatkan ruang kota yang berhubungan dengan aktivitas usahanya, persepsinya terhadap lokasi, dan persepsi masyarakat terhadap keberadaan aktivitas sektor informal tersebut. Sasaran studi meliputi identifikasi karakteristik PKL, ruang-ruang kota tempat aktivitas PKL, dan persepsi masyarakat terhadap keberadaan aktivitas.

Dalam studi ini pendekatan yang digunakan adalah deskriptif eksplanatory, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah dekriptif kuantitatif dengan menggunakan alat analisis distribusi frekuensi dan cross tabulation. Sampel penelitian meliputi PKL Kota Salatiga dan masyarakat konsumen PKL.

Berdasarkan analisis terhadap perilaku aktivitas usaha PKL diperoleh temuan bahwa makanan mendominasi jenis dagangan PKL dengan warung tenda sebagai sarana perdagangan yang digunakan dan aktivitas usaha selama 4-8 jam, serta dalam penyebarannya, aktivitas PKL di Kota Salatiga cenderung bersifat linier mengikuti pola jalan, yang terlihat dari banyaknya trotoar yang dimanfaatkan sebagai lokasi usaha dan dalam menjalankan aktivitasnya tersebut PKL cenderung berkelompok dengan sejenis. Dari pemanfaatan ruang yang dilakukan diperoleh temuan bahwa aktivitas PKL berkembang di kawasan fungsional kota dengan memanfaatkan ruang-ruang publik yaitu trotoar yang cukup luas, dalam memilih lokasi aktivitas didasari bahwa lokasi tersebut dekat dengan pusat keramaian/kegiatan kota dan memiliki kemudahan pencapaian, serta dalam menjalankan aktivitasnya, PKL cenderung meninggalkan sarana usaha, yang berakibat pada munculnya dampak visual yang kurang baik. Berdasarkan persepsi masyarakat diperoleh temuan bahwa alasan utama masyarakat berbelanja di PKL adalah karena selera dan keberadaan aktivitas PKL memberi dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya adalah mudah mendapatkan makanan/kebutuhan bagi pelaku aktivitas sektor formal karena lokasinya yang berdekatan. Sedangkan dampak negatifnya adalah trotoar menjadi sempit atau tidak dapat dilalui, parkir menjadi sulit, lingkungan menjadi kotor, dan gangguan secara visual, yaitu munculnya pemandangan kumuh, kotor, dan semrawut. Oleh karena itu masyarakat memandang perlu dilakukan penataan lokasi PKL di lokasi perdagangan dengan tidak ada pengelompokan PKL berdasarkan jenis dagangan.

Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa PKL dalam menjalankan aktivitas usahanya akan memilih lokasi dan tempat usaha di ruang-ruang publik (trotoar), karena memanfaatkan ruang yang memiliki tingkat intensitas kunjungan masyarakat tinggi dan kemudahan pencapaian. Mereka cenderung tidak mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan pengguna aktivitas lain di ruang yang sama. Berdasarkan aktivitas usahanya, PKL di Kota Salatiga memiliki dampak positif, karena ada hubungan saling membutuhkan antara PKL dan masyarakat. Berdasarkan pemanfaatan ruang kota, aktivitas PKL memberi dampak negatif berupa perubahan fungsi ruang yang semula berfungsi sebagai ruang publik berubah menjadi ruang aktivitas PKL dan munculnya lingkungan yang secara visual nampak buruk, kotor, dan kumuh. Oleh karena itu dalam rangka meminimalkan dampak negatif yang muncul, maka perlu adanya pengaturan/penataan ruang bagi aktivitas PKL di ruang-ruang publik di Kota Salatiga, sehingga tercipta suasana Kota Salatiga yang seHAT, terTib, BERsih, Indah, dan aMAN.

ABSTRACT

The development of Salatiga town, which comes along with the growth of street vendors, needs to be handled more seriously, street vendors which use the city space prefer to cause bad visual effects. This affects arise due to the peculiar behaviors of street vendors, which have not been identified yet, especially in using the city spaces.

This study is aimed to know the behaviour of street vendors in using the city space, which relates to their business activity, perceptions about the location, and also the society's perception about the existence of informal sector activity. The target of this study covers the identification to the characteristic of the street vendors, the city space which is used by street vendors, the society's perception to the existence of these activities.

This study uses descriptive explanatory approach; meanwhile, the analysis uses quantitative description with frequency distribution analysis and cross tabulation. The sample of the research will cover Salatiga street vendors and the society who becomes street vendors consumers.

Base on the analysis on the business activity behavior of the street vendors, the research finds that food dominates the goods with tent or waroeng as the place to use the goods. The activity usually for 4-8 hours only. In this spreading, the activity tend to be linear, it means that this activity will base on the street pattern. It can be seen from the great number of street sides, which are used as the trade location, beside, that many street vendors tend to group with their friends who sell the same goods. Base on the space using, it is also found that the street vendors activity in developed on the functional area of the city by using some public spaces such as large street sides. In choosing their location, many street vendors considere several things such the distance of the location from the downtown, the relate to the easiness to get there. Many street vendors, in running their business, tend to leave their tent even though they have gone away. This phenomenon has raised bad visual effects to the city view. Base on the society's perception, it is found that the main reason to shop on street vendors are related to the society's interest. They think that the existence of the street vendors can bring both good effect and bad effect. The positive effect is that it is easy to get food or the other daily needs for the people who are come from formal sector, due to the its near location. However, the negative effect is that the street side will become difficult to be passed, the parking area will be limited, the environment will be dirty and unhealthy, and the other bad visual effects such as dirt and disorder view. As a result, the society think that it is needed to arrange the street vendors locations into one location without grouping base on the goods, which is sold.

Base on the findings above, it can be concluded that in doing the activity, every street vendors will choose the public area, such as street side, as their location. It is related to the easiness to get there and the high intensity level of the customer visitation. The street vendors do not consider about the safety and the other function of the public area. Base on the activity the street vendors bring positive effects relate to the mutual relationship between street vendors and the society. Unfortunately, the activity of the street vendors also brings negative effects, relates to the using of public area. These are the change of function, as a public area becomes the street vendors area and dirt environment. Hence, in order to minimize the negative effects that may rise, it is needed to make a good city planning, especially for the city vendors, who use public areas, in order to create Salatiga HATTI BERIMAN (healthy, neat, clean, beautiful, and secure).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis ekonomi berkepanjangan yang dialami oleh bangsa Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir, telah banyak merubah struktur sosial ekonomi masyarakat. Banyaknya sektor formal yang terimbas krisis tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi ini memberi dampak pada peningkatan jumlah pelaku kegiatan sektor informal. Rachbini dan Hamid (1994 : 25) menyatakan bahwa sektor informal hadir disaat sektor formal tidak dapat memberi ruang lingkup yang cukup sehingga kegiatan ekonomi berlangsung di luar sektor formal yang terorganisir.

Salah satu sektor informal di bidang ekonomi yang muncul menjadi fenomena terutama di perkotaan adalah pedagang kaki lima (PKL). Dalam kondisi keterbatasan lapangan kerja di sektor formal, menjadi PKL dianggap sebagai cara termudah untuk mempertahankan hidup. Hal ini berkaitan dengan ciri-ciri khas yang dimiliki sektor informal, yaitu mudah dimasuki, fleksibel dalam waktu dan tempat beroperasi, bergantung pada sumber daya lokal, dan skala usaha yang relatif kecil.

Sebagai salah satu bentuk kegiatan sektor informal, PKL diartikan sebagai setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal terbatas serta berlokasi di tempat-tempat umum, dengan tidak mempunyai legalitas formal, kemudian kegiatan perdagangan tersebut dapat dilakukan secara berkelompok sesuai kultur yang dimiliki secara individual (Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan Bandung, 1980, dalam Widodo, 2000 : 26).

UPT-PUSTAK UINIP

Yang menjadi masalah sekarang ini adalah bahwa keberadaan PKL sering dianggap sebagai pencetus ketidakteraturan, ketidaktertiban, dan ketidakindahan kota. PKL dan juga pelaku sektor informal pada umumnya sering dianggap melanggar aturan oleh pihak pemerintah kota, karena sifatnya yang ilegal. Sementara pihak pemerintah kota menginginkan kota segalanya berbentuk formal, serba tercatat, seperti yang ditulis oleh Kostof (1991, dalam Widodo, 2000 : 4) : *"cities are places that must rely on written record"*.

Sebenarnya bagi pihak penguasa, dalam hal ini pemerintah kota, kehadiran PKL merupakan suatu kondisi yang dilematis. Ada dua sisi yang saling berseberangan dalam mengkaji fenomena kehadiran sektor informal. Sisi pertama atau dapat disebut sebagai sisi positif, yaitu bahwa kegiatan perdagangan sektor informal ini dapat menampung tenaga kerja dalam situasi krisis ekonomi, disaat lapangan kerja di sektor formal sangat terbatas. Selain itu kehadiran PKL juga sangat dibutuhkan bagi masyarakat terutama golongan menengah ke bawah. Dari penelitian mengenai sektor informal di Jakarta diketahui bahwa dari sekitar dua juta buruh atau pegawai sektor formal (swasta maupun negeri) kurang lebih satu setengah juta membeli makanan dari sektor informal. Hanya dengan cara ini mereka dapat bertahan dalam kondisi gaji di sektor formal yang rata-rata rendah (Rachbini dan Hamid, 1994: 92). Kondisi ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara sektor formal dengan sektor informal. Bagi pemerintah kota kehadiran PKL juga memberi sumbangan atau kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Kemudian sisi kedua atau disebut sebagai sisi negatif, yaitu bahwa kehadiran PKL memberi dampak (negatif) bagi kualitas lingkungan perkotaan, yaitu adanya kecenderungan munculnya lingkungan yang secara visual berkesan buruk, kotor dan kumuh. Kondisi ini ditunjukkan oleh adanya penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tidak tertata. Masalah lainnya yang muncul adalah menurunnya fungsi-fungsi ruang kota yang ada, seperti

trotoar, jalan, dan taman-taman kota. Tempat-tempat tersebut mengalami perubahan fungsi, yang semula berfungsi sebagai ruang publik berubah menjadi ruang bagi aktivitas kegiatan PKL. Ruang-ruang tersebut pada awal perencanaan bukan diperuntukkan bagi aktivitas sektor informal. Tata ruang kota yang telah direncanakan pada akhirnya sama sekali tidak dapat ditampilkan. Hal ini terjadi karena memang sektor informal belum mendapat tempat pada kebijakan tata ruang kota. Pada umumnya sektor informal tidak atau belum direncanakan secara tegas sebagaimana halnya sektor formal.

Fenomena di atas juga terjadi di Kota Salatiga. Hampir di setiap bagian kota yang berada di tengah-tengah Kabupaten Semarang dan terletak di kaki Gunung Merbabu ini dapat kita jumpai kehadiran PKL, mulai dari pusat kota hingga jalan-jalan di pinggiran kota. Mereka tidak hanya beraktivitas di lokasi-lokasi perdagangan, tetapi juga berada di lokasi aktivitas masyarakat lainnya, seperti aktivitas pendidikan, perkantoran, dan permukiman. Sebagai contoh adalah Jalan Diponegoro, mulai dari depan kampus Universitas Kristen Satya Wacana hingga Mal Tamansari, berderet tenda-tenda PKL. Sebelum krisis ekonomi terjadi, trotoar di sepanjang jalan tersebut nampak bersih dan nyaman sebagai tempat berjalan dengan pepohonan di sisi kiri dan kanannya. Kemudian di kawasan Lapangan Pancasila, yang biasanya hanya ramai di saat ada kegiatan pasar malam, pertunjukkan musik atau kegiatan hiburan masyarakat, dan juga di Jalan Jenderal Sudirman sebelah Selatan, dengan berdirinya Rumah Sakit Umum Puri Asih, sepanjang jalan kini telah terisi pula oleh tenda-tenda PKL, mulai dari pertigaan Jalan Dr. Sumardi sampai ABC.

Kondisi tersebut menjadi semakin memprihatinkan dengan adanya penempatan sarana perdagangan, seperti tenda dan gerobak, yang tidak teratur dan tidak dibersihkan disaat tidak digunakan atau bahkan ada beberapa lokasi yang menjadi tempat tinggal bagi pedagang bersangkutan. Potret Kota Salatiga yang "HATTI BERIMAN", Kota Salatiga yang seHAT,

terTib, BERsih, Indah, dan aMAN sama sekali tidak nampak. Keadaan ini nampak berbeda dengan 5-6 tahun lalu. Saat itu aktivitas perdagangan sektor informal cenderung hanya ada di sekitar aktivitas perdagangan saja, yaitu Jalan Jenderal Sudirman yang merupakan *Central Business District* (CBD) Kota Salatiga.

Selama ini Pemerintah Kota Salatiga nampaknya belum benar-benar serius menangani keberadaan PKL. Hal ini terbukti dari kegiatan pendataan untuk seluruh kota baru dilakukan pada tahun 2002. Dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Salatiga Tahun 1996-2006, ruang bagi kegiatan sektor informal belum diarahkan dengan jelas, baik secara kuantitatif (besaran yang direncanakan atau disyaratkan) maupun secara kualitatif (dimana, bagaimana, dan untuk lingkungan mana). Hanya disebutkan bahwa merupakan suatu keharusan bagi sektor formal untuk menyisihkan ruangnya dengan aturan yang ditetapkan untuk kegiatan sektor informal. Tetapi "*keharusan*" tersebut tanpa ada tindak lanjut misalnya berupa aturan ataupun sanksi yang tegas.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Kebersihan, Keindahan, Kesehatan, dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, disebutkan bahwa kebersihan adalah keadaan lingkungan yang bebas dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan pandangan yang tidak menyenangkan. Keindahan adalah bersih dalam arti rapi, rajin, dan mempunyai nilai-nilai etis dan estetis yang dapat memberikan pandangan atau kesan yang menarik. Kebersihan dan keindahan tersebut meliputi tanah-tanah, bangunan-bangunan, jalan-jalan, dan makam. Untuk itulah maka disebutkan adanya larangan untuk menyelenggarakan dapur-dapur atau memasak dan berjualan di jalan umum, taman-taman atau tempat-tempat lain yang dapat mengganggu kebersihan, keindahan, kesehatan, dan ketertiban kecuali mendapat ijin dari walikota. Kemudian dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 511.3/435/1997 tentang Penataan

PKL Di Jalan Jenderal Sudirman, disebutkan pula adanya larangan berjualan di tepi ataupun trotoar di sepanjang jalan tersebut. Namun baik peraturan daerah maupun surat keputusan tersebut nampaknya belum dapat dilaksanakan atau diimplementasikan dengan baik.

Ruang merupakan wadah yang meliputi ruang daratan, lautan, dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya (Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992). Sedangkan ruang publik merupakan tempat berkumpul warga kota untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat memperkuat ikatan sebagai suatu komunitas (Car, 1995 : 45). Keberadaan ruang publik dalam suatu kota memiliki fungsi sebagai ruang pergerakan (koridor pergerakan) dan ruang bagi aktivitas sosial ekonomi warga kota. Sehingga ruang publik juga harus dapat memberikan atau menyediakan keragaman akses terhadap aktivitas warga, sumberdaya, informasi, dan tempat. Oleh karena itu dalam suatu ruang publik diperlukan adanya kemudahan untuk memilih akses bagi keragaman tersebut. Mengacu pada hal tersebut, maka keberadaan PKL yang beraktivitas di ruang-ruang publik akan dapat menimbulkan benturan atau berebutan ruang antara kepentingan publik (warga kota) dan kepentingan aktivitas sektor informal.

Dengan adanya perkembangan sosial ekonomi Kota Salatiga yang diiringi oleh perkembangan dan pertumbuhan sektor informal PKL, maka sudah waktunya bagi pihak perencanaan kota, dalam hal ini pihak Pemerintah Kota Salatiga untuk memberi porsi yang lebih baik bagi sektor informal tersebut dalam perencanaan tata ruang kota. Perencanaan tata ruang kota tidak hanya ditujukan bagi kegiatan sektor formal, tetapi juga harus dapat mengakomodasikan kepentingan sektor informal. Apalagi sektor informal ini dianggap sebagai penyelamat di saat krisis ekonomi. Jika hal ini dapat terwujud, maka dapat dihindari adanya konflik antara pemerintah kota, PKL, dan masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, beberapa hal yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Sektor informal PKL di Kota Salatiga yang semakin berkembang dan menjadi fenomena di masa krisis ekonomi yang terjadi 5-6 tahun terakhir, tidak saja hadir di lokasi-lokasi perdagangan atau kawasan CBD (*Central Business District*), namun juga di ruang-ruang aktivitas kota lainnya, seperti di ruang aktivitas pendidikan, perkantoran, dan permukiman. Penurunan fungsi ruang dan munculnya lingkungan yang secara visual berkesan buruk merupakan masalah yang muncul dari keberadaan aktivitas PKL di Kota Salatiga.
2. Masalah tersebut muncul karena belum adanya arahan atau pengaturan yang tepat, baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang sesuai dengan karakteristik aktivitas PKL. Arahan atau pengaturan yang ada selama ini cenderung belum memberikan ruang dan tempat yang efektif kepada PKL, sehingga pedagang tidak dapat leluasa dalam menjalankan aktivitasnya.
3. Melihat kondisi PKL yang semakin berkembang jumlahnya di Kota Salatiga saat ini, maka sudah waktunya bagi pihak pemerintah kota untuk lebih peduli terhadap aktivitas PKL, yaitu dengan mempelajari faktor perilaku dan gejala yang muncul dari aktivitas PKL di Kota Salatiga. Dengan mempelajari perilaku tersebut, maka dapat dikenali ciri-ciri atau karakteristik dari aktivitas PKL tersebut, sehingga perencanaan yang dibuat, yaitu berupa pengaturan ruang bagi aktivitas ini sesuai dengan karakteristiknya, sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.

Berdasarkan rumusan masalah di atas dan dengan maksud untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kota Salatiga atau pihak-pihak yang

berkepentingan dalam rangka penanganan masalah perdagangan kaki lima, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, maka peneliti tertarik untuk melakukan studi terhadap perilaku pedagang sektor informal di Kota Salatiga terutama dalam memanfaatkan ruang-ruang kota. Oleh karena itu *research questions* yang diangkat dalam studi ini adalah ***“Bagaimana aktivitas PKL di Kota Salatiga, baik dalam berjualan maupun dalam memanfaatkan ruang-ruang kota yang ada sebagai lokasi usaha, dan bagaimanakah pula persepsi masyarakat terhadap keberadaan aktivitas PKL tersebut?”***.

1.3. Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan studi ini adalah untuk mengetahui perilaku PKL dalam memanfaatkan ruang kota yang berhubungan dengan aktivitas usahanya, persepsinya terhadap lokasi, dan persepsi masyarakat terhadap keberadaan aktivitas tersebut.

1.3.2. Sasaran Penelitian

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas, maka sasaran dari studi ini adalah sebagai berikut :

- a. Identifikasi karakteristik PKL yang mencakup karakteristik aktivitas usaha, lokasi, dan persepsi terhadap kedekatan dan kemudahan pencapaian lokasi.
- b. Identifikasi ruang-ruang kota tempat aktivitas PKL.
- c. Identifikasi persepsi masyarakat terhadap keberadaan aktivitas PKL.
- d. Mengkaji perilaku PKL dalam berjualan dan pemanfaatan ruang kota, serta persepsinya terhadap kedekatan dan kemudahan pencapaian lokasi.
- e. Mengkaji persepsi masyarakat terhadap keberadaan aktivitas PKL.

- f. Mengkaji hubungan antara kondisi PKL dengan persepsi masyarakat terhadap aktivitas PKL.
- g. Membuat rekomendasi bagi Pemerintah Kota Salatiga dalam menentukan kebijakan pengelolaan keberadaan aktivitas PKL yang sesuai dengan karakteristiknya.

1.3.3. Manfaat Penelitian

Studi ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang pembangunan kota, khususnya pendekatan terhadap masalah keberadaan sektor informal kaki lima (PKL), yaitu dari aspek perilaku dalam pemanfaatan ruang kota sebagai lokasi aktivitas. Kemudian studi ini diharapkan pula dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun arahan atau panduan tata ruang kota bagi aktivitas perdagangan kaki lima. Dengan arahan yang tepat dapat menghindari terjadinya konflik kepentingan antara PKL, pemerintah kota dan masyarakat Kota Salatiga dalam penggunaan ruang-ruang kota yang ada. Dengan demikian dapat tercipta suasana kota yang harmonis, bersih, dan indah, sehingga dapat meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat kota, yang akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Salatiga.

1.4. Ruang Lingkup

1.4.1. Ruang Lingkup Materi

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai dan dengan adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, maka studi ini dibatasi pada telaahan sebagai berikut :

1. Karakteristik PKL meliputi :

- a. Karakteristik aktivitas usaha PKL, terdiri dari jenis dagangan, bentuk sarana perdagangan, lama waktu aktivitas, dan pola sebaran/pengelompokkan PKL

(berkelompok dengan sejenis/dengan jenis lain). Dari telaahan ini dapat diketahui perilaku PKL dalam menjalankan aktivitas usahanya.

- b. Karakteristik lokasi aktivitas PKL, meliputi lokasi aktivitas, status ruang aktivitas, jenis ruang yang dimanfaatkan (tempat berjualan), luas ruang yang digunakan, alasan pemilihan lokasi, dan perilaku dalam penggunaan tempat usaha di saat tidak beraktivitas, yang dilihat dari cara PKL menyimpan sarana usahanya. Dari telaahan ini dapat diketahui perilaku PKL dalam memanfaatkan ruang kota sebagai lokasi usaha.
 - c. Persepsi PKL terhadap kedekatan dan kemudahan pencapaian lokasi. Persepsi terhadap kedekatan lokasi yang diukur dari jarak lokasi terhadap aktivitas masyarakat (aktivitas perdagangan, pendidikan, perkantoran, dan aktivitas sosial ekonomi lainnya), tempat tinggal, sumber bahan baku dagangan, dan permukiman penduduk terdekat. Sedangkan kemudahan pencapaian lokasi didasarkan pada ketersediaan/kemudahan sarana transportasi umum untuk mencapai lokasi.
2. Persepsi masyarakat Kota Salatiga terhadap keberadaan aktivitas PKL. Yang dimaksud masyarakat di sini adalah masyarakat kota secara luas, yang terdiri dari masyarakat formal, yaitu pelaku kegiatan formal (pegawai/karyawan/mahasiswa/pemilik toko) dan masyarakat informal, yaitu pembeli bebas. Telaahan ini meliputi alasan berbelanja di PKL, manfaat dan gangguan dari keberadaan aktivitas PKL, pendapat tentang perlu/tidaknya penataan lokasi PKL di Kota Salatiga, penempatan lokasi PKL dan pengelompokan PKL. Telaahan ini dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap keberadaan aktivitas PKL di Kota Salatiga.

1.4.2. Ruang Lingkup Spasial

Ruang lingkup spasial penelitian ini dibatasi pada wilayah administratif Kota Salatiga. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Antara Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, Kota Salatiga memiliki luas wilayah 5.678,11 hektar, terdiri dari 4 kecamatan dengan 22 kelurahan/desa dan jumlah penduduk 144.796 jiwa.

Namun dengan adanya kecenderungan aktivitas PKL yang memanfaatkan ruang-ruang di sekitar pusat kota dan atau kawasan fungsional kota lainnya, maka studi ini dibatasi pada wilayah tersebut. Adapun lokasi-lokasi dimaksud meliputi Jl. Diponegoro, Jl. Patimura, Jl. Jenderal Sudirman dan sekitarnya (Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Pemuda, Jl. Langensuko, Jl. Johar, dan Jl. Sukowati), Lapangan Pancasila, Jl. Ahmad Yani, Jl. Hasanudin, Jl. Osamaliki, dan Jl. Kartini - Jl. Pemotongan. Peta wilayah studi dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Adapun pemilihan lokasi didasari oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Lokasi bukan merupakan lokasi penampungan sementara para pedagang pasar. Hal ini disebabkan karena pada saat survai dilakukan, ada beberapa lokasi (jalan) yang digunakan sebagai lokasi penampungan sementara para pedagang pasaraya I yang terbakar akhir tahun 1999. Lokasi-lokasi tersebut adalah Jalan Belakang Pasaraya I dan II, Jalan Kalinyamat, sebagian Jalan Jenderal Sudirman, sebagian Jalan Taman Pahlawan, dan pasar Blauran. Di lokasi-lokasi tersebut cukup sukar membedakan antara pedagang pasar dan PKL.
2. Lokasi bukan merupakan lokasi yang telah ditunjuk sebagai lokasi PKL, seperti di dalam Terminal Tamansari dan *Shopping Center*. Di lokasi tersebut PKL memiliki kios-kios permanen.



Sedangkan kawasan pusat Kota Salatiga dan sekitarnya dipilih sebagai lokasi studi didasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Kawasan pusat kota dan sekitarnya merupakan cermin suatu kota, sehingga ketidakteraturan pada kawasan tersebut mencerminkan ketidakteraturan kota.
2. Kawasan pusat kota dan sekitarnya merupakan lokasi terkonsentrasinya sebagian besar PKL di Kota Salatiga.
3. Kawasan pusat kota dan sekitarnya menampung beberapa aktivitas kota, yaitu kegiatan perdagangan, perkantoran, dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat lainnya.

1.5. Posisi Penelitian

Penelitian terhadap sektor informal pertama kali dilakukan oleh Keith Hart (dalam Manning dan Effendi, 1996 : 75), seorang peneliti Inggris, pada tahun 1971. Dari penelitian tersebut muncul istilah sektor informal. Kemudian pada tahun 1976, penelitian dilanjutkan di negara-negara berkembang oleh badan dunia yang menangani buruh, ILO (*International Labour Organisation*). Dari penelitian tersebut, ditemukan ciri atau karakteristik aktivitas sektor informal (Sethuraman, 1981 : 15), yaitu merupakan sektor yang mudah dimasuki, menggunakan sumber-sumber asli, merupakan usaha milik keluarga, berskala operasi kecil, intensif tenaga kerja dengan teknologi sederhana, keterampilan diperoleh dari luar pendidikan formal, dan berada pada pasar yang tidak teratur dan kompetitif.

Studi mendalam tentang sektor informal di Indonesia dilakukan oleh Hans Dieter-Evers (dalam Rachbini dan Hamid, 1994 : 3), yang menganalogikan sektor ini sebagai bentuk ekonomi bayangan dengan negara. Kemudian Hidayat (1983 : 3) dari penelitiannya memperoleh suatu kesimpulan bahwa sektor informal merupakan sektor yang tidak menerima bantuan dari pemerintah, belum menggunakan bantuan ekonomi dari pemerintah, meskipun

bantuan tersebut telah tersedia, dan untuk yang telah menerima dan menggunakan bantuan atau fasilitas, belum mampu membuat unit usaha berdikari.

Penelitian terhadap PKL, terutama di kota-kota besar di Indonesia yang merupakan bagian dari sektor informal dilakukan oleh Didik J. Rachbini dan Abdul Hamid, pada tahun 1990, yang disponsori oleh *United States Agency for International Development* (USAID). Dari penelitian yang dilakukan di Jakarta dan Surabaya dikenali adanya kecenderungan munculnya aktivitas perdagangan sektor informal berderet sepanjang jalan di setiap berdiri gedung bertingkat (Rachbini dan Hamid, 1995 : 90-91).

Sebelumnya, pada tahun 1980, Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan Bandung (dalam Widodo, 2000 : 26) melakukan penelitian terhadap kegiatan perdagangan kaki lima, yang memberikan definisi, bahwa PKL adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal terbatas serta berlokasi di tempat-tempat umum, seperti trotoar di depan pertokoan/kawasan perdagangan, pasar, sekolah dan gedung bioskop, dengan tidak mempunyai legalitas formal, dimana kegiatan perdagangannya dapat dilakukan secara berkelompok sesuai kultur yang dimiliki atau secara individual. Istilah “kaki lima” itu sendiri berasal dari trotoar yang dahulunya berukuran 5 (lima) *feet* atau sama dengan kurang lebih satu setengah meter.

TG. Mc.Gee dan Y.M. Yeung dengan dana *International Development Research Center* (IDRC) yang berlokasi di Kanada, melakukan *comparative study* terhadap PKL di 6 (enam) kota Asia Tenggara selama tahun 1972-1975, yaitu Kuala Lumpur dan Malaka di Malaysia, Manila dan Baguio di Philipina, serta Jakarta dan Bandung di Indonesia. Dari penelitian tersebut ditemukan ciri atau karakteristik perdagangan sektor informal serta penanganan yang dilakukan oleh pihak pemerintah pada umumnya.

Dengan mendasarkan pada penelitian-penelitian tersebut di atas studi ini dilakukan. Oleh karena itu, maka studi mengenai aktivitas PKL di Kota Salatiga ini lebih bersifat *comparative* atau membandingkan dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan sumbangan untuk menyusun suatu perencanaan ruang bagi kegiatan perdagangan sektor informal. Untuk menyusun suatu perencanaan tata ruang kota bagi kegiatan perdagangan sektor informal terlebih dahulu harus dikenali karakteristiknya, sehingga kebijakan yang nantinya dibuat atau disusun telah sesuai dengan karakteristik yang ada, sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.

1.6. Kerangka Pikir Penelitian

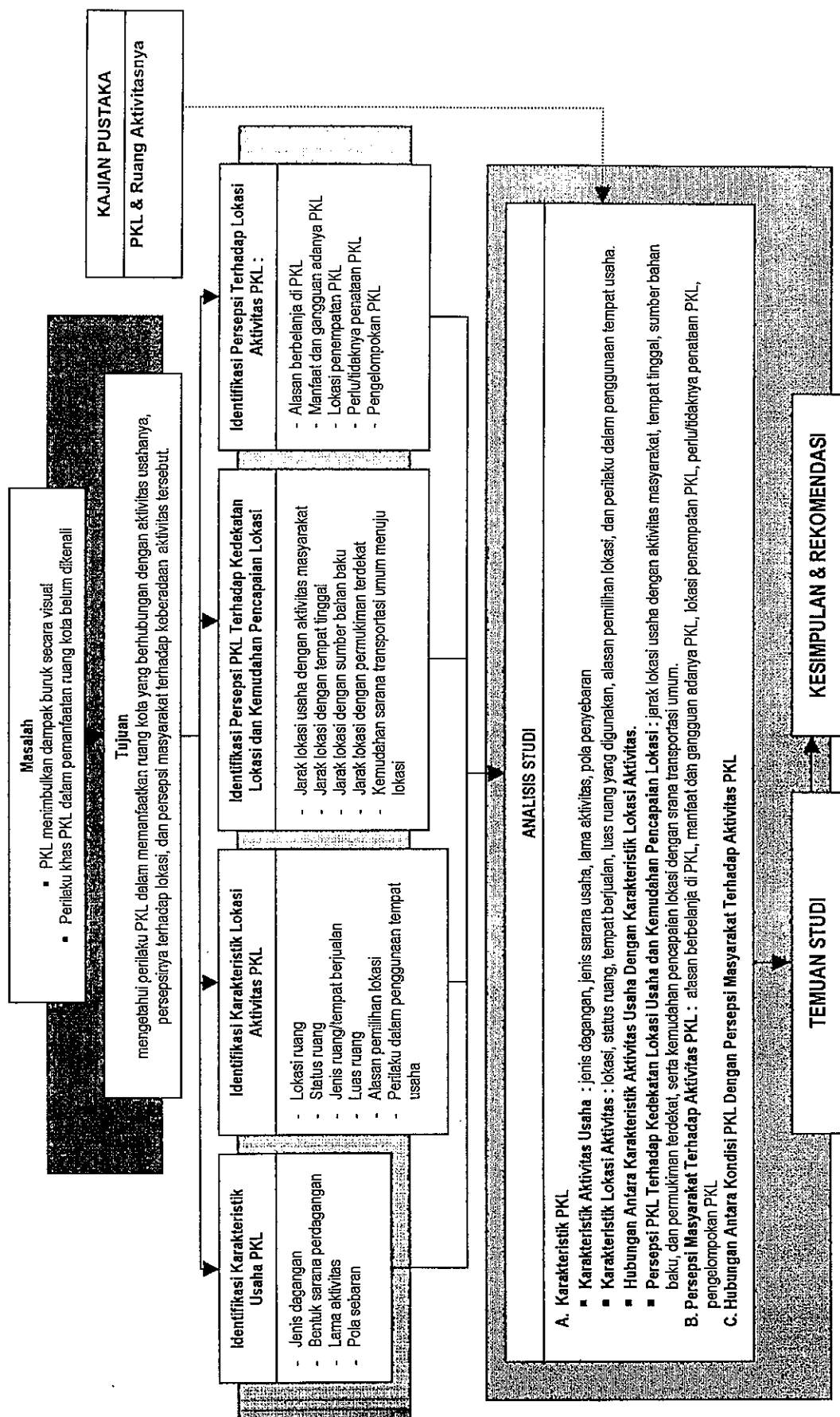
Perkembangan Kota Salatiga yang diiringi dengan pertumbuhan jumlah pelaku sektor informal PKL memerlukan penanganan yang lebih serius, karena PKL yang memanfaatkan ruang-ruang kota yang ada saat ini cenderung menimbulkan dampak visual yang kurang baik. Kondisi ini terjadi karena sektor informal belum mendapat tempat dalam penyusunan tata ruang kota. Oleh karena itu dalam rangka mempersiapkan suatu ruang bagi aktivitas tersebut perlu dikenali perilaku khas dari aktivitas PKL. Selain itu masukan dari masyarakat selaku konsumen atau pengguna kegiatan perdagangan kaki lima juga merupakan hal yang penting.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka langkah yang pertama adalah dengan menetapkan sasaran studi. Sasaran studi tersebut, adalah pertama mengidentifikasi karakteristik PKL. Karakteristik PKL ini meliputi karakteristik aktivitas usaha, terdiri dari jenis dagangan, bentuk sarana perdagangan, pola pelayanan (lama aktivitas), dan pola sebaran/pengelompokkan PKL (dengan sejenis/lain jenis), karakteristik lokasi aktivitas, meliputi lokasi aktivitas, status ruang aktivitas, jenis ruang yang dimanfaatkan (tempat berjualan), luas ruang yang digunakan, alasan pemilihan lokasi, dan perilaku dalam

penggunaan tempat usaha, dan persepsi PKL terhadap kedekatan dan kemudahan pencapaian lokasi yang diukur dengan jarak lokasi terhadap aktivitas masyarakat (aktivitas perdagangan, pendidikan, perkantoran, dan aktivitas sosial ekonomi lainnya), tempat tinggal, sumber bahan baku dagangan, dan permukiman penduduk terdekat, dan ketersediaan/kemudahan sarana transportasi umum untuk mencapai lokasi.

Berikutnya identifikasi persepsi masyarakat terhadap keberadaan aktivitas PKL, yang meliputi alasan berbelanja di PKL, manfaat dan gangguan adanya aktivitas PKL, perlu/tidaknya penataan lokasi PKL saat ini, lokasi PKL yang sesuai, dan pengelompokan PKL.

Langkah kedua adalah melakukan analisis studi, yaitu meliputi analisis perilaku PKL dalam berjualan dan dalam pemanfaatan ruang, analisis terhadap persepsi masyarakat terhadap aktivitas PKL, serta analisis hubungan antara kondisi perilaku aktivitas usaha PKL dengan persepsi masyarakat terhadap aktivitas tersebut. Untuk mendukung analisis, dilakukan studi pustaka terhadap teori-teori yang berkaitan dengan PKL dan ruang aktivitasnya. Dengan pendekatan dan metode penelitian yang tepat, diharapkan di akhir studi dapat ditemukan suatu jawaban terhadap *research questions* yang diangkat, yang akhirnya dapat dibuat suatu kesimpulan dan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Salatiga mengenai penanganan PKL yang sesuai dengan karakteristik perilakunya dan masyarakat kota sebagai konsumen. Adapun kerangka pikir studi ini dapat dilihat pada Gambar 1.3. berikut.



GAMBAR 1.2. KERANGKA PIKIR PENELITIAN

Sumber : Analisis Penulis, 2002.

1.7. Pendekatan dan Metode Pelaksanaan Studi

1.7.1. Pendekatan Studi

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) untuk menjawab pertanyaan, “Bagaimana aktivitas PKL di Kota Salatiga, baik dalam berjualan maupun dalam memanfaatkan ruang-ruang kota yang ada sebagai lokasi usaha, dan bagaimanakah persepsi masyarakat tentang keberadaan aktivitas PKL tersebut?”.

Pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam studi ini adalah pendekatan dengan metode deskriptif *explanatory*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel yang satu dengan variabel yang lain, serta dilaksanakan dengan cara mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner atau wawancara sebagai alat pengumpulan data (Singarimbun dan Effendi, 1989 : 33)

Selanjutnya dalam melakukan analisis digunakan pendekatan analisis *deskriptif kuantitatif*, yang tujuannya untuk membuat *deskriptif* atau gambaran tentang perilaku PKL dalam berjualan dan memanfaatkan ruang kota sebagai lokasi aktivitasnya, serta mengetahui persepsi masyarakat terhadap aktivitas PKL.

1.7.2. Metode Pelaksanaan Studi

Yang berkaitan dengan metode pelaksanaan studi adalah kebutuhan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan penyajian data, teknik *sampling*, dan teknik analisis data.

1.7.2.1. Kebutuhan Data

Untuk memenuhi kebutuhan data dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data terhadap obyek yang akan diteliti dalam rangka mendapatkan gambaran mengenai suatu

keadaan atau permasalahan di kawasan penelitian. Data tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder, yang diuraikan sebagai berikut :

A. Data Primer

Data primer dalam studi ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya/responden dengan cara menyebarkan kuesioner atau melakukan wawancara langsung dengan panduan kuesioner. Data-data yang ditanyakan berkaitan dengan sasaran dari penelitian ini, yaitu mengidentifikasi setiap karakteristik dari setiap obyek studi untuk mencapai tujuan studi.

Penyebaran kuesioner atau wawancara dilakukan terhadap sampel yang merupakan obyek dalam studi ini, terdiri dari :

1. PKL, yaitu pedagang yang berjualan ditempat umum, seperti trotoar, tepi jalan, taman kota dan emper-emper toko. Pedagang yang telah menempati bangunan permanen dan yang menempati areal di dalam lokasi pasar, serta pedagang keliling tidak termasuk obyek dalam penelitian ini.
2. Masyarakat, yaitu masyarakat kota secara luas terdiri dari masyarakat formal (pelaku kegiatan formal, seperti pegawai, karyawan, mahasiswa, dan pemilik toko) dan masyarakat informal, yaitu pembeli bebas. Dan apabila diperlukan, untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kebijakan-kebijakan terhadap keberadaan PKL dilakukan pula wawancara terhadap nara sumber, yaitu pihak pemerintah Kota Salatiga, yaitu dinas atau instansi terkait yang berwenang dalam penanganan keberadaan aktivitas PKL

Selain wawancara, pengumpulan data primer ini juga dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan. Dari observasi ini selain ditulis secara deskriptif mengenai aktivitas

yang terjadi, juga direkam dengan kamera foto mengenai gambaran kondisi PKL di Kota Salatiga.

B. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari sumber lain, misalnya dengan menyalin atau mengutip data dalam bentuk yang sudah jadi. Data sekunder diperoleh dari referensi dan informasi yang didokumentasikan oleh kantor/dinas/instansi terkait, diantaranya berupa gambaran wilayah Kota Salatiga dan peraturan atau kebijakan yang berkaitan keberadaan PKL.

Kebutuhan dan sumber data, serta metode analisis yang digunakan secara rinci dapat dilihat pada Tabel I.1. berikut.

TABEL I.1.
KEBUTUHAN DATA, ANALISIS, SUMBER DATA, DAN TEKNIK ANALISIS

NO	TUJUAN	ANALISIS	VARIABEL	INDIKATOR	JENIS DATA	SUMBER DATA	TEKNIK ANALISIS
1	Mengetahui karakteristik/perilaku PKL dalam berjualan dan dalam pemanfaatan ruang kota sebagai lokasi usaha	<ul style="list-style-type: none"> Analisis karakteristik aktivitas usaha Analisis karakteristik lokasi aktivitas Analisis hubungan perilaku PKL dalam pemanfaatan ruang dengan perilaku dalam berjualan Analisis persepsi PKL terhadap kedekatan dan kemudahan pencapaian lokasi 	<ul style="list-style-type: none"> Aktivitas usaha Lokasi aktivitas Jarak lokasi 	<ul style="list-style-type: none"> Jenis dagangan Bentuk sarana perdagangan Lama aktivitas Pola penyebaran (mengelompok dengan sejenis/jenis lain) Lokasi ruang Status ruang Jenis ruang Luas ruang Alasan pemilihan lokasi Perilaku dalam penggunaan tempat usaha Jarak lokasi usaha dengan aktivitas masyarakat Jarak lokasi usaha dengan tempat tinggal PKL Jarak lokasi usaha dengan sumber bahan baku Jarak lokasi usaha dengan permukiman terdekat Kemudahan pencapaian lokasi dengan sarana transportasi umum 	<p>Data primer dengan kuesioner</p> <p>Data primer dan data sekunder</p>	<ul style="list-style-type: none"> Observasi lapangan Responden PKL Observasi lapangan Responden PKL Bappeda Kota Salatiga 	<p>Deskriptif kuantitatif dengan distribusi frekuensi</p> <p>Deskriptif kuantitatif dengan distribusi frekuensi</p> <p>Deskriptif kuantitatif dengan <i>cross tabulation</i></p>

Lanjutan Tabel I.1.

NO	TUJUAN	ANALISIS	VARIABEL	INDIKATOR	JENIS DATA	SUMBER DATA	TEKNIK ANALISIS
2	Mengetahui persepsi masyarakat terhadap keberadaan aktivitas PKL	<ul style="list-style-type: none"> Analisis persepsi masyarakat terhadap keberadaan aktivitas PKL 	<ul style="list-style-type: none"> Persepsi terhadap keberadaan aktivitas PKL 	<ul style="list-style-type: none"> Alasan berbelanja di PKL Manfaat PKL Gangguan adanya aktivitas PKL Penempatan lokasi PKL Perlu tidaknya penataan lokasi PKL di Kota Salatiga Pengelompokkan PKL 	Data primer dengan kuesioner	Responden masyarakat konsumen (formal dan informal)	Deskriptif Kuantitatif dengan distribusi frekuensi
3	Mengetahui hubungan antara kondisi PKL dengan persepsi masyarakat terhadap keberadaan aktivitas tersebut	<ul style="list-style-type: none"> Analisis hubungan antara kondisi PKL dengan persepsi masyarakat terhadap keberadaan aktivitas PKL 	<ul style="list-style-type: none"> Perilaku PKL Persepsi masyarakat terhadap keberadaan aktivitas PKL 				

Sumber : Hasil Kajian Teori, 2002

1.7.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penyebaran *kuesioner* atau wawancara langsung dengan menggunakan *kuesioner* yang diajukan kepada responden. Pertanyaan dalam *kuesioner* tersebut dapat berupa pertanyaan terbuka atau tertutup. Pertanyaan terbuka berisi pertanyaan yang dapat secara bebas dijawab oleh responden, sedangkan pertanyaan tertutup berisi pertanyaan yang harus dijawab oleh responden dengan memilih alternatif jawaban yang telah disediakan.
2. *Observasi* atau pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi PKL dan ruang-ruang kota tempat aktivitasnya. Hasil observasi ini selain ditulis secara deskriptif juga direkam dengan kamera foto.
3. *Dokumentasi*, yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan mencatat arsip-arsip atau data-data yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan diteliti sebagai bahan menganalisis permasalahan, misalnya jumlah penduduk, jumlah PKL, macam aktivitas kota, serta perundang-undangan yang mengatur PKL dan ruang aktivitasnya yang dapat diperoleh dari dinas atau instansi terkait.

1.7.2.3. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data primer yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi atau pengamatan yang dilakukan masih merupakan data mentah. Agar data tersebut dapat lebih berguna bagi penelitian ini diperlukan suatu pengolahan dan penyajian data. Tahap-tahap yang akan dilakukan dalam teknik pengolahan dan penyajian data ini adalah sebagai berikut :

1. *Editing*, merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap data yang masuk apakah terdapat kekeliruan dalam pengisian atau kurang lengkap, palsu, tidak sesuai dan sebagainya.

Editing dilakukan dengan harapan akan diperoleh data yang benar-benar *valid* dan *reliable*, serta dapat dipertanggungjawabkan.

2. *Coding*, merupakan proses pemberian tanda, simbol ataupun kode pada setiap data yang termasuk dalam kelompok yang sama. Tanda tersebut dapat berupa angka atau huruf.
3. *Tabulating*, yang merupakan tahap memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya. Penyajian data dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tabel silang, gambar, dan grafik. Sedangkan untuk data sekunder tidak diperlukan lagi pengolahan lebih lanjut, karena data tersebut telah disajikan secara sistematis dan untuk penyajiannya disesuaikan dengan analisis yang dilakukan.

1.7.2.4. Teknik Sampling

Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, maka individu yang membentuk populasi yang akan diteliti tidak memungkinkan untuk dikenai secara keseluruhan. Oleh karena itu penelitian dilakukan terhadap sejumlah sampel yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Agar sampel yang akan diambil cukup *representatif* untuk dapat mewakili keseluruhan populasi, maka diambil cara pengambilan sampel yang baik.

Adapun teknik *sampling* dan jumlah sampel yang digunakan untuk setiap obyek dalam studi ini adalah sebagai berikut :

1. PKL.

Teknik *sampling* yang digunakan adalah *stratified random sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara membagi populasi menjadi sub-sub populasi yang disebut sebagai strata, lapisan, atau kelompok yang lebih kecil (Marzuki, 2000 : 47). Dalam hal ini yang dimaksud dengan populasi adalah PKL, sedangkan sub-sub populasi adalah PKL berdasarkan jenis dagangan. Kemudian dalam penentuan jumlah sampel

dilakukan secara proporsional, yaitu sebesar 10% dari masing-masing sub populasi. Pengambilan sampel sebesar 10% didasarkan pada pernyataan yang dikemukakan oleh Singarimbun (1995:37), bahwa jumlah sampel dalam penelitian *deskriptif* adalah 5-10% dari jumlah populasi. Mengacu pada pernyataan tersebut dan karena studi ini memiliki keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka jumlah sampel PKL diambil sebanyak $\pm 10\%$ dari jumlah populasi disetiap lokasi yang telah ditentukan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jumlah sampel disetiap lokasi dan masing-masing jenis dagangan dapat dilihat pada Tabel I.2. berikut.

TABEL I.2.
JUMLAH SAMPEL MENURUT LOKASI DAN JENIS DAGANGAN PKL

No	Lokasi	Jenis Dagangan						Jumlah	
		Makanan		Non Makanan		Jasa		Populasi	Sampel
		Populasi	Sampel	Populasi	Sampel	Populasi	Sampel		
1	Jl. Diponegoro	98	10	14	1	20	2	132	13
2	Jl. Patimura	116	12	8	1	30	3	154	16
3	Jl. Jend.Sudiman & sekitarnya	341	34	170	17	56	6	567	57
4	Lapangan Pancasila	38	4	7	1	6	1	51	6
5	Jl. Ahmad Yani	31	3	8	1	6	1	45	5
6	Jl. Hasanudin	39	4	7	1	6	1	52	6
7	Jl. Osamali	19	2	7	1	9	1	35	4
8	Jl. Kartini – Jl. Pemotongan	29	3	8	1	7	1	44	5
Jumlah		711	72	229	24	140	16	1080	112

Sumber : Hasil survei, diolah kembali, 2002.

Keterangan jenis dagangan :

- a. Makanan, meliputi makanan kecil, makanan olahan, lauk pauk, sembako, buah-buahan, dan minuman.
- b. Non makanan, meliputi jam, kaca, kelontong plastik, alat rumah tangga, mainan anak, buku/poster/stiker/koran/majalah, barang bekas, pisau/arit/ pacul, helm, kaset/ VCD, pakaian, sepatu, tas, bensin, dan rokok.
- c. Jasa, meliputi bengkel/repair sepatu, duplikat kunci, tambal ban, stempel, gunting rambut, penjual nomor, dan lain-lain.

2. Masyarakat

Masyarakat dalam studi ini adalah masyarakat kota secara luas sebagai konsumen pengguna jasa PKL, terdiri dari masyarakat formal, yaitu pelaku kegiatan formal

(pegawai/karyawan/mahasiswa/pemilik toko) sekitar lokasi aktivitas pedagang, dan masyarakat informal, yaitu pembeli bebas. Jumlah populasi masyarakat diasumsikan sebagai jumlah penduduk Kota Salatiga. Jumlah sampel ditentukan dengan rumus menurut pendapat Slovin (dalam Umar, 2001 : 78), yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad (1)$$

dimana :

n = ukuran sampel
 N = ukuran populasi
 e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan (derajat kecermatan).

Dengan nilai N (ukuran populasi) sebesar 144.796 dan e (derajat kecermatan) sebesar 10%, maka jumlah sampel masyarakat adalah sebesar 100 responden. Sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan *accidental sampling*. Dalam teknik ini menurut Nawawi (2001 : 156), peneliti mengumpulkan data dari unit *sampling* yang ditemuinya, yang termasuk dalam kriteria populasi penelitian.

1.7.2.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara *deskriptif kuantitatif*. Teknik *analisis kuantitatif* yang dipergunakan dalam penelitian ini secara umum menggunakan tabel distribusi frekuensi dan analisis tabulasi silang (*cross tabulation*). Adapun masing-masing teknik analisis kuantitatif yang digunakan dijelaskan sebagai berikut :

1. Teknik Analisis Distribusi Frekuensi

Teknik analisis dengan *distribusi frekuensi* digunakan untuk menggambarkan karakteristik aktivitas PKL, baik karakteristiknya secara umum maupun karakteristik perilakunya dalam berjualan, serta persepsi mereka terhadap tempat usaha. Teknik analisis ini juga digunakan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap keberadaan aktivitas PKL.

2. Teknik Analisis Tabulasi Silang (*Cross Tabulation*)

Teknik analisis tabulasi silang (*cross tabulation*) digunakan untuk mengetahui keterkaitan variabel-variabel penelitian, sehingga dapat diketahui hubungan antara variabel-variabel tersebut. Effendi dan Manning (dalam Singarimbun dan Effendi, 1995 : 273-274) menyebutkan bahwa dalam analisis tabulasi silang, data setiap variabel dikelompokkan dalam beberapa kategori yang kemudian diberi skor untuk mempermudah perhitungan. Dalam studi ini analisis tabulasi silang digunakan untuk mengetahui keterkaitan antara variabel-variabel perilaku dalam pemanfaatan ruang (lokasi, jenis dan luas ruang, serta cara penyimpanan sarana usaha) dengan perilaku dalam berjualan (jenis dagangan, bentuk sarana usaha, lama aktivitas, dan pengelompokkan pedagang). Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel satu dengan lainnya dilakukan uji statistik *chi square* (χ^2). Dan untuk mempermudah penganalisisan digunakan alat bantu komputer program *SPSS for Windows Versi 10.0*. Langkah yang dilakukan untuk melakukan uji ini menurut Santoso (2002 : 180) adalah sebagai berikut :

a. Menentukan hipotesis, yaitu :

H_0 : Tidak ada hubungan antara baris dan kolom.

H_1 : Ada hubungan antara baris dan kolom.

b. Mengambil keputusan, dengan dasar :

- Perbandingan *chi-square* hitung dan tabel.

Jika *chi-square* hitung < *chi-square* tabel, maka H_0 diterima.

Jika *chi-square* hitung > *chi-square* tabel, maka H_0 ditolak.

- Probabilitas (*Asymp. Sig*) :

Jika *Asymp. Sig* > 0,05, maka H_0 diterima.

Jika *Asymp. Sig* < 0,05, maka H_0 ditolak.

- c. Untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel digunakan Koefisien Kontingensi (*Contingency Coefficient*), yaitu erat jika mendekati 1 dan lemah jika mendekati 0 (Santoso, 2002 : 192).

Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam analisis ini ditampilkan dalam Tabel I.3. berikut.

TABEL I.3.
VARIABEL-VARIABEL ANALISIS TABULASI SILANG (*CROSS TAB*)

Analisis	Variabel Terikat	Variabel Bebas
Hubungan antara perilaku PKL dalam pemanfaatan ruang dengan perilaku dalam berjualan.	Perilaku PKL dalam memanfaatkan ruang : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokasi ▪ Jenis ruang ▪ Luas ruang ▪ Cara penyimpanan sarana usaha 	Perilaku PKL dalam berjualan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenis dagangan ▪ Jenis sarana usaha ▪ Lama aktivitas ▪ Pengelompokkan pedagang

Sumber : Hasil Kajian Teori, 2002.

1.8. Sistematika Penulisan

Dalam laporan studi ini, sistematika penulisan yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, sasaran, dan manfaat penelitian, ruang lingkup materi dan spasial, posisi penelitian, kerangka pikir penelitian, serta pendekatan dan metode pelaksanaan studi, yang meliputi pendekatan studi, kebutuhan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan penyajian data, *teknik sampling*, dan teknik analisis data.

BAB II : KAJIAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN RUANG AKTIVITASNYA

Merupakan studi literatur, yang berisi tentang konsep sektor informal, PKL dalam sektor informal, karakteristik aktivitas PKL, PKL dalam rencana tata ruang kota, dan rangkuman kajian teori. Kajian teori ini merupakan kegiatan yang mengarah pada terjawabnya rumusan masalah yang diangkat sebagai bahan studi.

BAB III : GAMBARAN UMUM PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KOTA SALATIGA

Berisi gambaran secara umum PKL yang beraktivitas di wilayah Kota Salatiga. Bagian ini juga berisi uraian mengenai kondisi geografis, peran dan fungsi Kota Salatiga, kebijakan penataan ruang dan pola penggunaan lahan, fasilitas perkotaan, dan kependudukan. Gambaran umum PKL, meliputi perkembangan dan penyebaran aktivitas PKL di Kota Salatiga, peranan PKL dalam perekonomian kota, pola pelayanan aktivitas PKL, kebijakan Pemerintah Kota Salatiga terhadap aktivitas PKL, dan karakteristik lokasi studi.

BAB IV : ANALISIS AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PEMANFAATAN RUANG DI KOTA SALATIGA

Berisi analisis aktivitas PKL, yang meliputi perilaku PKL dalam berjualan dan dalam pemanfaatan ruang, serta persepsinya terhadap lokasi usaha. Kemudian dilakukan analisis mengenai hubungan antara perilaku PKL dalam berjualan dengan perilaku dalam memanfaatkan ruang, dan analisis persepsi masyarakat terhadap keberadaan aktivitas PKL tersebut, serta analisis hubungan antara kondisi PKL dengan persepsi masyarakat. Analisis didasarkan pada data hasil survai primer terhadap PKL dan masyarakat responden.

BAB V : PENUTUP

Berisi temuan studi yang kemudian dibuat suatu kesimpulan yang menjawab *research questions* yang diangkat. Dengan dasar kesimpulan tersebut dibuat rekomendasi bagi Pemerintah Kota Salatiga berupa saran-saran dalam menetapkan kebijakan pengaturan terhadap aktivitas PKL yang sesuai dengan karakteristik PKL, serta persepsi masyarakat terhadap keberadaan aktivitas sektor informal tersebut.

BAB II

PEDAGANG KAKI LIMA DAN RUANG AKTIVITASNYA

Bab ini merupakan studi literatur mengenai pedagang kaki lima (PKL) dan ruang aktivitasnya di perkotaan. Sebagai bagian dari sektor informal, munculnya PKL di perkotaan selalu dikaitkan dengan adanya urbanisasi dan krisis ekonomi. Urbanisasi dan krisis ekonomi menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran, karena lapangan kerja yang tersedia di sektor formal sangat terbatas. Para urbanis dan korban-korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kemudian mencoba berusaha di sektor informal, diantaranya menjadi PKL.

Rachbini dan Hamid (1994 : 25) menyatakan bahwa sektor informal hadir disaat sektor formal tidak dapat memberi ruang lingkup yang cukup sehingga kegiatan ekonomi berlangsung di luar sektor formal yang terorganisir. Menjadi PKL dipandang sebagai cara termudah untuk mempertahankan hidup, mengingat sifat dari kegiatan tersebut yang mudah dimasuki, fleksibel dalam waktu dan tempat beroperasi, bergantung pada sumber daya lokal, dan skala usaha yang relatif kecil.

Kajian akan meliputi konsep sektor informal, PKL dalam sektor informal, karakteristik aktivitas PKL, dan PKL dalam rencana tata ruang kota.

2.1. Konsep Sektor Informal

2.1.1. Pengertian Sektor Informal

Istilah sektor informal muncul setelah adanya penelitian di Ghana yang dilakukan oleh Keith Hart, seorang peneliti Inggris, pada tahun 1971. Istilah ini digunakan untuk menyatakan sejumlah tenaga kerja yang berada diluar pasar tenaga kerja formal yang terorganisasi. Diluar pasar karena termasuk kelompok yang tidak permanen atau tidak

ada jaminan tentang keberlangsungan pekerjaan yang dimilikinya (Manning dan Effendi, 1996 : 75).

Dalam perkembangannya istilah informal dipergunakan sebagai konsep penelaahan terhadap struktur dualisme ekonomi perkotaan. Berdasarkan penelitiannya di beberapa negara berkembang, sekitar tahun 1976, ILO (*International Labour Organization*) mengemukakan bahwa sektor informal memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Sethuraman, 1981 : 15) :

1. Sektor informal merupakan sektor yang mudah untuk dimasuki.
2. Menggunakan sumber-sumber asli.
3. Merupakan usaha milik keluarga.
4. Berskala operasi kecil.
5. Intensif tenaga kerja dengan teknologi sederhana.
6. Keterampilan diperoleh dari luar sistem pendidikan formal.
7. Sektor informal berada pada pasar yang tidak teratur dan kompetitif.

Jan Bremen (dalam Manning dan Effendi, 1996 : 138-140) memperjelas pengertian sektor informal dengan menyatakan bahwa sektor informal menunjukkan fenomena perbedaan dua kegiatan yang mempunyai ciri-ciri yang berlawanan. Tenaga kerja formal adalah yang bergaji dalam suatu pekerjaan yang permanen. Sifat semacam ini biasanya dimiliki oleh kegiatan yang saling berhubungan dalam suatu sistem yang terjalin dengan organisasi yang baik. Pada umumnya mereka yang terikat dalam kontrak kerja kelompok ini mempunyai syarat-syarat bekerja yang dilindungi oleh hukum. Di lain pihak mereka yang berada di luar kelompok ini dinamakan sektor informal.

Studi mendalam tentang sektor informal di Indonesia dilakukan oleh Hans Dieter-Evers (dalam Rachbini dan Hamid, 1994 : 3), yang menganalogikan sektor ini sebagai bentuk ekonomi bayangan dengan negara. Ekonomi bayangan digambarkan sebagai berbagai

kegiatan ekonomi yang tidak mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah. Kegiatan ekonomi bayangan ini merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang bergerak dalam unit-unit kecil sehingga bisa dipandang efisien dalam memberikan pelayanan. Dilihat dari sisi sifat produksinya, kegiatan ini bersifat *subsisten* yang bernilai ekonomis dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, khususnya bagi masyarakat yang ada di lingkungan sektor informal.

Sektor informal menyeruak ke permukaan karena sektor formal tidak memberikan ruang lingkup yang cukup sehingga kegiatan ekonomi berlangsung di luar sektor yang terorganisir. Sektor yang terutama diisi oleh golongan yang kurang mampu ini, terlihat makin menjamur di negara-negara sedang berkembang. Karena kegiatannya dipandang ilegal, maka para pengamat menamakan kegiatan ini sebagai kegiatan ekonomi bawah tanah atau sering disebut *underground economy* (Rachbini dan Hamid, 1994 : 25).

Menurut Soetjipto Wirosarjono (dalam Herlianto, 1986 : 133), sektor informal disebut sebagai kegiatan ekonomi yang bersifat marjinal (kecil-kecilan) yang mempunyai beberapa ciri seperti kegiatan tidak teratur, tidak tersentuh peraturan, bermodal kecil, dan bersifat harian, tempat tidak tetap, berdiri sendiri, berlaku di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, lingkungan kecil atau keluarga, serta tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, maupun perkreditan.

Kemudian Djojohadikusumo (1991 : 209) menyatakan bahwa kegiatan golongan informal berkait dengan *urban underemployment* menyangkut perekonomian kota dan sekitarnya. Arti dan peranannya berkait atau bersangkutan paut dengan dualisme teknologi. Sektor moderen (formal) bercirikan teknologi maju, sifatnya padat modal, dalam skala besar dan berkembang di lingkungan kota dan sekitarnya. Sedangkan sektor tradisional (informal) bercirikan satuan-satuan usaha kecil dalam jumlah banyak dan dimiliki keluarga,

menggunakan teknologi produksi yang sederhana dan padat karya, golongan tenaga kerja mempunyai pendidikan dan keterampilan terbatas dan dilakukan oleh anggota keluarga.

Di Indonesia, pengertian umum dari sektor informal menurut Hidayat (1983 : 3) meliputi 3 (tiga) hal sebagai berikut :

1. Sektor yang tidak menerima bantuan dari pemerintah.
2. Sektor yang belum menggunakan bantuan ekonomi dari pemerintah, meskipun bantuan tersebut telah tersedia.
3. Sektor yang telah menerima dan menggunakan bantuan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, namun bantuan tersebut belum mampu membuat unit usaha tersebut berdikari.

Dari beberapa penjelasan mengenai sektor informal seperti tercantum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sektor informal merupakan suatu unit usaha yang berskala kecil, tidak memiliki legalitas hukum, pola usahanya bersifat sederhana dan menggunakan sistem kekeluargaan, dilakukan oleh dan untuk masyarakat golongan menengah ke bawah, dan dalam aktivitasnya tidak diperlukan keterampilan khusus.

2.1.2. Hubungan Sektor Formal dan Informal

Dengan adanya dualistik kegiatan perekonomian, yaitu kegiatan ekonomi sektor formal dan kegiatan ekonomi sektor informal dalam suatu kota, maka akan ada keterkaitan antara kedua sektor tersebut. Rachbini dan Hamid (1994 : 90-91) dalam observasinya mengenai kegiatan sektor informal PKL di Jakarta dan Surabaya, ditemukan adanya kecenderungan, dimana setiap berdiri gedung bertingkat dapat disaksikan sejumlah kegiatan sektor informal tersebut berderet sepanjang jalan. Mereka melayani para pegawai atau karyawan bergaji rendah. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara sektor formal dan informal.

Sebagai sektor yang memiliki posisi yang lemah dalam menjalin hubungan dengan pemerintah daerah atau kota, seringkali sektor informal dipandang sebagai kegiatan ilegal dan mengganggu. Rachbini dan Hamid (1994 : 3) menyatakan bahwa walaupun pemerintah mempunyai dua tangan yang menggandeng kedua sektor, yaitu formal dan informal, tetap tidak dapat menyembunyikan perbedaan perlakuan terhadap kedua sektor tersebut.

Hubungan kedua sektor tersebut dinyatakan oleh Moser (dalam Rachbini dan Hamid, 1994 : 3) sebagai suatu bentuk hubungan yang *subordinatif*. Hubungan seperti ini didasarkan pada prinsip pertukaran yang tidak adil (*unequal exchange*), sehingga satu pihak cenderung melakukan eksploitasi terhadap lainnya.

Paulus Wirotomo (dalam Rachbini dan Hamid, 1994 : xiii) menyatakan bahwa di samping sisi yang negatif, sektor informal memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kota, yaitu adanya ketergantungan pegawai sektor formal pada dagangan dan jasa dari sektor informal. Sektor informal ini juga berfungsi sebagai ujung tombak pemasaran berbagai produk sektor formal. Selain itu didapati juga bahwa sektor informal sering dijadikan pekerjaan sampingan oleh orang-orang yang telah berada di sektor formal (misalnya pemilik toko yang sore hari menjual bakmi di halaman tokonya, toko baju yang menjual sebagian dagangannya di kaki lima, dan sebagainya), alasannya karena cara ini mudah dijalankan (tanpa prosedur macam-macam) dan seringkali lebih efektif menarik pembeli. Jadi dapat dikatakan bahwa sektor informal memiliki *comparative advantage* tertentu.

Perbedaan sektor formal yang disebut sebagai sektor moderen dan sektor informal yang disebut sebagai sektor tradisional, menurut Hyla Mynt (1985, dalam Rachbini dan Hamid, 1994 : 20) adalah sebagai berikut :

1. Unit-unit ekonomi dalam sektor moderen sangat terspesialisasi dan terintegrasi penuh.

Sebaliknya, unit-unit ekonomi pada sektor tradisional mempunyai derajat spesialisasi

yang rendah, misalnya model produksi subsisten, di sektor pertanian maupun sektor informal perkotaan.

2. Sektor moderen mencakup usaha-usaha besar yang padat modal dengan teknologi moderen, sementara sektor tradisional menampung para petani dan pengrajin yang bekerja atas dasar teknologi tradisional.
3. Usaha bisnis di sektor moderen mempekerjakan tenaga kerja atas dasar reguler dan membayar mereka atas dasar produktivitas marjinal. Sedangkan sektor tradisional menyerap tenaga kerja dari lingkungan keluarga dan dibayar seadanya atas dasar produktivitas rata-ratanya.
4. Unit ekonomi di sektor moderen mempunyai akses terhadap lembaga-lembaga keuangan, bahkan dapat memperoleh pinjaman dengan bunga relatif rendah. Sementara itu mereka yang bekerja di sektor tradisional mempunyai akses yang sedikit terhadap lembaga keuangan formal, bahkan mereka terjerat bunga tinggi dari lembaga keuangan liar.

Hubungan atau interaksi yang terjadi antara aktivitas perdagangan dan jasa sektor informal dan aktivitas di sektor formal, terutama di pusat kota, dapat dijelaskan melalui teori mengenai interaksi antara fungsi-fungsi dari aktivitas kota. Bahwa suatu aktivitas perdagangan dan jasa memiliki kecenderungan untuk berlokasi dekat dengan konsumen, dekat dengan bisnis lain atau dekat dengan penyedia barang dan jasa. Selain itu aktivitas atau fungsi akan lebih menguntungkan jika berlokasi berdekatan. Hal inilah yang mendasari banyak ditemukannya aktivitas perdagangan dan jasa sektor informal berada di sekitar formal.

2.2. Pedagang Kaki Lima Dalam Sektor Informal

2.2.1. Pengertian PKL

PKL di Indonesia saat ini dapat dikatakan mendominasi kegiatan sosial ekonomi masyarakat terutama di perkotaan. Unit-unit usahanya menyebar di hampir semua sektor

perekonomian dan perbedaannya dengan usaha kecil hanyalah terletak pada ketersediaan tempat.

PKL didefinisikan sebagai pedagang yang berjualan pada kaki lima, dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah keramaian umum seperti trotoar di depan pertokoan/kawasan perdagangan, pasar, sekolah, dan gedung bioskop. Atau definisi lebih terinci adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang terbatas serta berlokasi di tempat-tempat umum, dengan tidak mempunyai legalitas formal, dimana kegiatan perdagangannya dapat dilakukan secara berkelompok sesuai kultur yang dimiliki atau secara individual. Adapun istilah kaki lima berasal dari trotoar yang dahulunya berukuran lebar 5 (lima) *feet* atau sama dengan kurang lebih satu setengah meter (Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 1980 dalam Widodo, 2000 : 26).

Dalam perkembangan selanjutnya pengertian PKL ini menjadi semakin kabur artinya. Dapat kita lihat mereka tidak lagi menggunakan trotoar saja sebagai tempat aktivitas usahanya, tetapi menggunakan setiap ruang publik yang ada seperti jalur-jalur pejalan kaki, areal parkir, ruang-ruang terbuka, taman-taman, terminal, dan bahkan di perempatan jalan serta berkeliling dari rumah ke rumah melalui jalan-jalan kampung di perkotaan.

Purwanto (dalam Fachrudin, 1998 : 27) menyatakan bahwa PKL adalah suatu bentuk aktivitas perdagangan yang tidak menetap dan biasanya berlokasi di area jalur pejalan. Mc. Gee dan Yeung (1977 : 25), memberikan pengertian PKL sama dengan "*hawkers*", yang didefinisikan sebagai sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual pada ruang publik, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Dalam pengertian ini termasuk juga orang yang menawarkan barang dan jasanya dari rumah ke rumah.

Sebagai salah satu kegiatan ekonomi di sektor informal yang cukup fenomenal kehadirannya dan paling banyak disentuh oleh kebijakan pemerintah kota, PKL memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan karakteristik sektor informal secara umum. Berdasarkan penelitian Kartini Kartono dkk. (1980, dalam Widodo, 2000 : 28) tercatat ada 21 ciri PKL. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kelompok ini merupakan pedagang yang kadang-kadang juga berarti sebagai produsen, misalnya pedagang makanan-minuman yang dimasak sendiri;
2. Perkataan "*kaki lima*" memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjajakan barang-barang dagangannya pada gelaran tikar di pinggir-pinggir jalan, atau di muka toko yang dianggap strategis. Juga kelompok pedagang yang mempergunakan meja, kereta dorong, dan kios kecil;
3. PKL umumnya menjual barang eceran;
4. PKL umumnya bermodal kecil, bahkan tidak jarang hanya merupakan "*alat*" bagi pemilik modal yang mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan jerih payah;
5. Pada umumnya para PKL merupakan kelompok marjinal bahkan ada pula yang tergolong pada kelompok sub marjinal;
6. Pada umumnya kualitas barang yang diperdagangkan relatif lebih rendah bahkan ada yang mengkhususkan diri dalam berjualan barang-barang cacat sedikit dengan harga yang jauh lebih murah;
7. Omzet penjualan PKL pada umumnya tidak besar;
8. Para pembeli umumnya yang berdaya beli rendah;
9. Kasus dimana PKL berhasil secara ekonomi sehingga akhirnya dapat menaiki tangga dalam jenjang hierarki pedagang yang sukses agak langka atau jarang terjadi;

10. Pada umumnya usaha PKL merupakan usaha "*family enterprise*" dimana anggota keluarga turut membantu dalam usaha tersebut;
11. Mempunyai sifat "*one man enterprise*";
12. Barang yang ditawarkan PKL biasanya tidak berstandar dan "*shifting*" jenis barang yang diperdagangkan sering kali terjadi;
13. Tawar menawar antara penjual dan pembeli merupakan ciri yang khas dari usaha perdagangan para PKL;
14. Sebagian dari PKL melaksanakan pekerjaan secara penuh yaitu berupa "*full time job*", sebagian lagi melakukannya setelah jam kerja, atau pada waktu senggang dalam rangka usaha mencapai pendapatan "*additional*";
15. Sebagian PKL melaksanakan pekerjaan secara musiman, dan kerap kali terlihat jenis barang dagangannya juga berubah-ubah;
16. Barang-barang yang umumnya dijual oleh PKL merupakan apa yang dalam ilmu marketing dinamakan "*convenience goods*", jarang sekali mereka memperdagangkan "*specialty goods*";
17. Para PKL umumnya dalam suasana tidak tenang, takut kalau sewaktu-waktu usaha mereka dihentikan oleh TIBUM;
18. Masyarakat umum sering menganggap bahwa para PKL merupakan kelompok yang menduduki status sosial yang rendah dalam tangga kemasyarakatan;
19. Mengingat faktor pertentangan kepentingan, maka kelompok PKL merupakan kelompok yang sulit dapat bersatu dalam bidang ekonomi, walaupun perasaan setia kawan cukup kuat diantara mereka;

20. Jam dan waktu kerja pada umumnya tidak menunjukkan pola yang tetap, hal mana merupakan salah satu ciri perusahaan perorangan;
21. Para PKL terlihat memiliki jiwa "*entrepreneurship*" yang kuat.

2.2.2. Pelaku PKL

Kesenjangan antara kota dan desa merupakan penyebab utama mengapa penduduk pedesaan melakukan migrasi ke kota, baik untuk menetap maupun hanya secara sirkuler. Ketimpangan upah, daya tarik kota, dan tekanan di desa itu sendiri menyebabkan kehidupan di kota menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin menyelamatkan diri dari tekanan kemiskinan di desa (Rachbini dan Hamid, 1994 : 31). Michael P. Todaro dan Jerry Stilkind (dalam Manning dan Effendi, 1996 : 7) mengemukakan bahwa dorongan utama bermigrasi dari migrasi desa ke kota adalah untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik. Walaupun kondisi kehidupan kebanyakan penduduk kota nampak buruk, namun kondisi kehidupan di pedesaan dirasa lebih parah.

Fenomena tersebut pada akhirnya menyebabkan meningkatnya jumlah angkatan kerja di perkotaan dan sebagai tambahan kondisi saat ini di Indonesia adalah terjadinya krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang berkepanjangan membuat aktivitas ekonomi di sektor formal terkena dampaknya. Banyak perusahaan yang terpaksa mengurangi pegawainya. Akibatnya jumlah pengangguran pun meningkat. Keterbatasan daya tampung sektor formal dalam menyerap luapan angkatan kerja ini kemudian memunculkan adanya sektor informal. Akibatnya jumlah migran dan pencari kerja yang melahirkan sektor informal perkotaan dari waktu ke waktu kian membengkak. Salah satu bentuk kegiatan sektor informal ini adalah PKL.

Manning dan Effendi (1996 : 51) menyatakan bahwa di negara-negara berkembang menunjukkan PKL pada umumnya terdiri dari migran. PKL merupakan salah satu pekerjaan

nyata dan cukup penting di kota-kota besar di negara-negara tersebut. PKL biasanya digambarkan sebagai perwujudan pengangguran tersembunyi atau setengah pengangguran. Kemudian Dewan Riset Nasional (1994, dalam Widodo, 2000 : 30-31) dalam penelitian mengenai PKL di 4 (empat) kota di Indonesia diperoleh hasil bahwa sebanyak 80,3% dari PKL merupakan migran.

2.3. Karakteristik Aktivitas PKL

2.3.1. Jenis Dagangan PKL

Mc. Gee dan Yeung (1977 : 82-83) menyatakan bahwa jenis dagangan PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitar kawasan dimana pedagang tersebut beraktivitas. Misalnya di suatu kawasan perdagangan, maka jenis dagangan yang ditawarkan akan beranekaragam, bisa berupa makanan/minuman, barang kelontong, pakaian, dan lain-lain.

Adapun jenis dagangan yang ditawarkan oleh PKL dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok utama, yaitu :

1. Makanan yang tidak dan belum diproses, termasuk didalamnya makanan mentah, seperti daging, buah-buahan, dan sayuran.
2. Makanan yang siap saji, seperti nasi dan lauk pauknya dan juga minuman.
3. Barang bukan makanan, mulai dari tekstil hingga obat-obatan.
4. Jasa, yang terdiri dari beragam aktivitas, misalnya tukang potong rambut, dan lain sebagainya.

2.3.2. Bentuk Sarana Perdagangan PKL

Bentuk sarana perdagangan yang dipergunakan oleh para PKL dalam menjalankan aktivitasnya sangat bervariasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mc. Gee dan Yeung (1977 : 82-83) di kota-kota Asia Tenggara diketahui bahwa pada umumnya bentuk

sarana tersebut sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindah atau dibawa dari satu tempat ke tempat lain dan dipengaruhi oleh jenis dagangan yang dijual. Adapun bentuk sarana perdagangan yang digunakan oleh PKL menurut Waworoentoe (1973, dalam Widjajanti, 2000 : 39-40) adalah sebagai berikut :

1. Gerobak/kereta dorong, bentuk sarana ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu gerobak/kereta dorong tanpa atap dan gerobak/kereta dorong yang beratap untuk melindungi barang dagangan dari pengaruh cuaca. Bentuk ini dapat dikategorikan dalam bentuk aktivitas PKL yang permanen (*static*) atau semi permanen (*semi static*), dan umumnya dijumpai pada PKL yang berjualan makanan, minuman, dan rokok.
2. Pikulan/keranjang, bentuk sarana perdagangan ini digunakan oleh PKL keliling (*mobile hawkers*) atau semi permanen (*semi static*), yang sering dijumpai pada PKL yang berjualan jenis barang dan minuman. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah dibawa atau dipindah tempat.
3. Warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan kursi dan meja. Bagian atap dan sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung yang terbuat dari kain plastik, terpal atau lainnya yang tidak tembus air. Berdasarkan sarana usaha tersebut, PKL ini dapat dikategorikan pedagang permanen (*static*) yang umumnya untuk jenis dagangan makanan dan minuman.
4. Kios, bentuk sarana PKL ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah bilik semi permanen, yang mana pedagang yang bersangkutan juga tinggal ditempat tersebut. PKL ini dapat dikategorikan sebagai pedagang menetap (*static*).

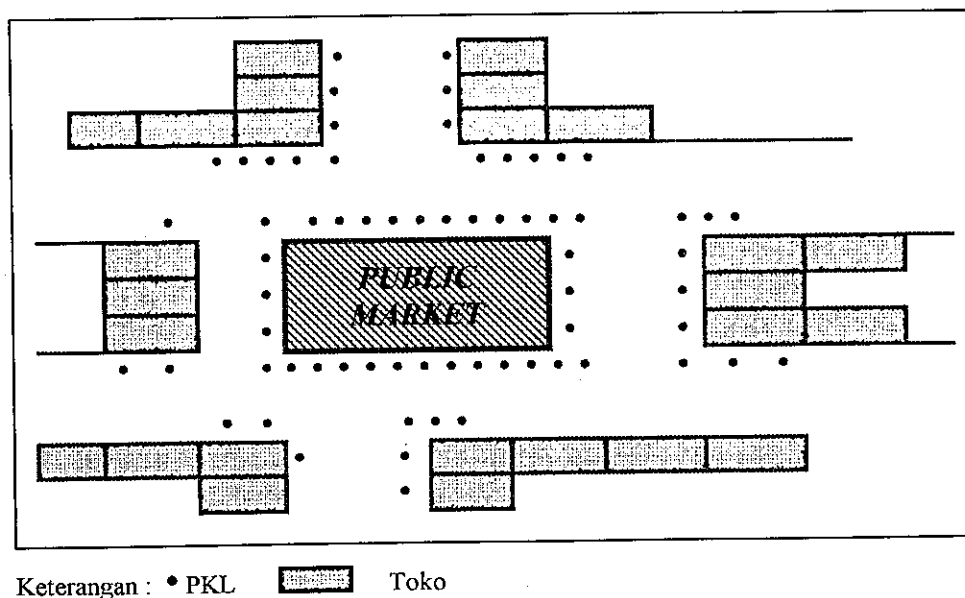
5. Gelaran/alas, PKL menggunakan alas berupa tikar, kain atau lainnya untuk menjajakan dagangannya. Berdasarkan sarana tersebut, pedagang ini dapat dikategorikan dalam aktivitas semi permanen (*semi static*). Umumnya dapat dijumpai pada PKL yang berjualan barang kelontong dan makanan.

2.3.3. Pola Penyebaran PKL

Berdasarkan pola penyebarannya, aktivitas PKL menurut Mc.Gee dan Yeung (1977 : 36-37) dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) pola, yaitu :

1. Pola Penyebaran Mengelompok (*Focus Agglomeration*)

Pedagang informal pada tipe ini pada umumnya terdapat pada ujung jalan, ruang-ruang terbuka, sekeliling pasar, ruang-ruang parkir, taman-taman dan lain sebagainya (Gambar 2.1.). Pola penyebaran seperti ini biasanya banyak dipengaruhi oleh adanya pertimbangan aglomerasi, yaitu suatu pemusatan atau pengelompokan pedagang sejenis atau pedagang yang mempunyai sifat komoditas yang sama atau menunjang.

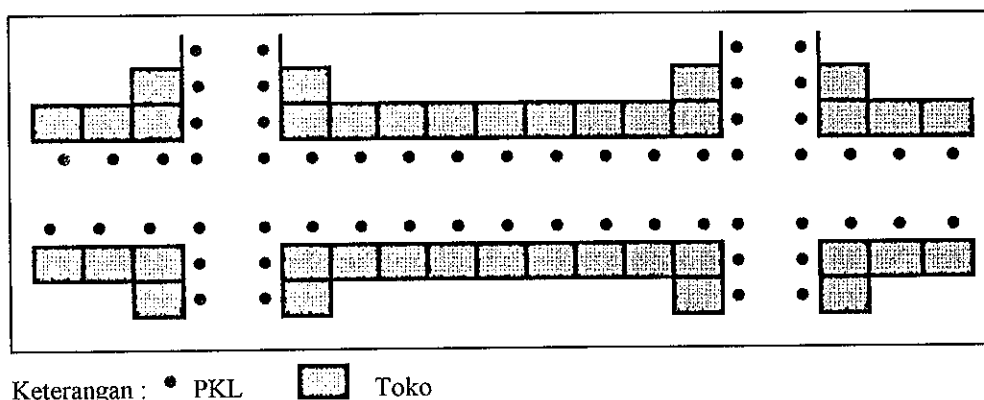


GAMBAR 2.1.
POLA PENYEBARAN MENGELOMPOK (*FOCUS AGLOMERATION*)

Sumber : Mc. Gee dan Yeung (1977 : 37)

2. Pola Penyebaran Memanjang (*Linier Concentration*)

Pada umumnya pola penyebaran memanjang atau *linier concentration* terjadi di sepanjang atau di pinggir jalan utama (*main street*) atau pada jalan yang menghubungkan jalan utama (Gambar 2.2.). Dengan kata lain pola perdagangan ini ditentukan oleh pola jaringan jalan itu sendiri. Pola kegiatan *linier* lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan aksesibilitas yang tinggi pada lokasi yang bersangkutan. Dilihat dari segi pedagang informal itu sendiri, hal ini sangat menguntungkan, sebab dengan menempati lokasi yang beraksesibilitas yang tinggi akan mempunyai kesempatan yang tinggi dalam meraih konsumen.



Keterangan : • PKL [rectangle] Toko

GAMBAR 2.2.
POLA PENYEBARAN MEMANJANG (*LINIER CONCENTRATIONS*)

Sumber : Mc. Gee dan Yeung (1977 : 37)

2.3.4. Pola Pelayanan Aktivitas PKL

Pola pelayanan menurut Mc. Gee dan Yeung (1977 : 76) adalah cara berlokasi aktivitas PKL dalam memanfaatkan ruang kegiatan sebagai tempat usaha. Berdasarkan pola pelayanan ini, aktivitas PKL ini dapat ditinjau dari aspek fungsi pelayanan, golongan pengguna jasa, skala pelayanan, waktu pelayanan, dan sifat pelayanan.

A. Fungsi Pelayanan PKL

Penentuan jenis fungsi pelayanan dari suatu aktivitas jasa PKL dapat ditentukan dari dominasi kuantitatif jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Suatu lokasi aktivitas jasa sektor informal dapat memiliki lebih dari satu fungsi sekaligus. Ada tiga macam fungsi pelayanan menurut Soedjana (1981, dalam Pratihari, 1996:21), yaitu :

1. Fungsi pelayanan perdagangan dan jasa.

Aktivitas jasa PKL merupakan bagian dari sistem perdagangan kota, khususnya dalam bidang perdagangan eceran. PKL dalam hal ini berfungsi memasarkan hasil produksi suatu barang dan jasa.

2. Fungsi pelayanan rekreatif.

Aktivitas jasa PKL memiliki fungsi sebagai hiburan yang bersifat rekreatif. Fungsi rekreatif ini didapatkan dari suasana pelayanan yang diberikan, misalnya lokasi di alam terbuka dapat dipakai sebagai tempat santai, jalan-jalan, cuci mata, dan sebagainya.

3. Fungsi pelayanan sosial ekonomi.

Aktivitas jasa PKL memiliki fungsi sosial ekonomi dilihat berdasarkan pandangan masing-masing pelaku yang terlibat didalamnya. Berdasarkan pandangan penjaja, maka aktivitasnya merupakan sumber pendapatan bagi peningkatan kesejahteraan. Bagi para pengguna, maka aktivitas jasa sektor informal sangat membantu dalam penyediaan barang dan jasa yang harganya relatif lebih murah daripada toko atau supermarket. Sedangkan bagi pemerintah kota, maka aktivitas jasa sektor informal ini sedikit banyak dapat membantu dalam pemecahan masalah penyerapan tenaga kerja dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

B. Golongan Pengguna Jasa PKL

Golongan pengguna jasa yang dilayani oleh aktivitas jasa PKL pada umumnya terdiri dari golongan pendapatan menengah dan rendah. Hal ini disebabkan karena harga yang ditawarkan oleh pedagang sektor informal relatif lebih rendah sehingga terjangkau bagi golongan pendapatan rendah sekalipun. Sedangkan bagi golongan berpendapatan tinggi ada kecenderungan untuk tidak mengunjungi lokasi aktivitas PKL, terutama untuk jenis barang dagangan bukan makanan. Pertimbangannya adalah dari segi kualitas barang yang biasanya lebih rendah, adanya kemungkinan penipuan dalam hal kualitas barang, dan sebagainya, sehingga golongan ini lebih memilih untuk berbelanja di toko atau supermarket. Selain alasan tersebut, dari sisi psikologis ada kecenderungan gaya hidup masyarakat kota yang selalu ingin menjaga *gengsi*, sehingga mereka lebih percaya diri apabila berbelanja di tempat-tempat yang dapat mewakili status mereka. Walaupun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa masyarakat berpendapatan menengah ke atas mendatangi lokasi aktivitas perdagangan sektor informal, tetapi ini terjadi sekali waktu atau bersifat insidental.

Rachbini dan Hamid (1994 : 92) menyatakan bahwa dari sekitar dua juta buruh atau pegawai sektor formal (swasta maupun negeri) di Jakarta kurang lebih satu setengah juta membeli makanan dari sektor informal. Hanya dengan cara ini mereka dapat bertahan dalam kondisi gaji di sektor formal yang rata-rata rendah. Kondisi ini juga menunjukkan adanya hubungan antara sektor formal dan informal.

C. Skala Pelayanan Aktivitas PKL

Skala pelayanan suatu aktivitas jasa pedagang sektor informal dapat diketahui dari asal pengguna jasa. Besar kecilnya skala pelayanan tergantung dari jauh dekatnya pengguna jasa tersebut. Semakin dekat asal pengguna, maka skala pelayanan semakin kecil, sebaliknya

semakin jauh asal pengguna jasa tersebut, maka skala pelayanan semakin besar (Manning dan Effendi, 1996 : 366-372).

D. Waktu Pelayanan Aktivitas PKL

Mc Gee dan Yeung (1977 : 76) menyatakan bahwa pola aktivitas PKL menyesuaikan terhadap irama dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan PKL didasarkan pula atau sesuai dengan perilaku kegiatan formal. Adapun perilaku kegiatan keduanya cenderung sejalan, walaupun pada saat tertentu kaitan aktivitas keduanya lemah atau tidak ada hubungan langsung antara keduanya. Temuan ini didasarkan pada penelitiannya terhadap "*hawkers*" di kota-kota Asia Tenggara.

Saat teramai pada suatu waktu pelayanan dipengaruhi oleh orientasi jasa terhadap pusat-pusat kegiatan disekitarnya. Saat teramai bagi aktivitas pedagang sektor informal di dekat pusat-pusat perbelanjaan akan berbeda dengan saat-saat teramai di dekat kawasan wisata, kawasan pemukiman, kawasan perkantoran, dan sebagainya.

E. Sifat Pelayanan Aktivitas PKL

Berdasarkan sifat pelayanannya, PKL menurut Mc Gee dan Yeung (1977 : 82) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Pedagang menetap (*static*).

Pedagang menetap adalah suatu bentuk layanan yang mempunyai cara atau sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Dalam hal ini setiap pembeli atau konsumen harus datang sendiri ke tempat pedagang dimana ia berada.

2. Pedagang semi menetap (*semi static*).

Pedagang semi menetap merupakan suatu bentuk layanan pedagang yang mempunyai sifat menetap yang sementara, yaitu hanya pada saat-saat tertentu saja. Dalam hal ini dia akan

menetap bila ada kemungkinan datangnya pembeli yang cukup besar. Biasanya pada saat bubaran bioskop, para pegawai masuk/keluar kantor atau saat ramainya pengunjung di pusat kota. Apabila tidak ada kemungkinan pembeli yang cukup besar, maka pedagang tersebut akan berkeliling.

3. Pedagang keliling (*mobile*)

Pedagang keliling yaitu suatu bentuk layanan pedagang yang dalam melayani konsumennya mempunyai sifat yang selalu berusaha mendatangi atau mengejar konsumen. Biasanya pedagang yang mempunyai sifat ini adalah pedagang yang mempunyai volume dagangan yang kecil.

2.4. Ruang Aktivitas PKL

2.4.1. Pengertian Ruang

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya (Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang). Sedangkan ruang aktivitas merupakan suatu wadah atau ruang yang terbentuk oleh elemen-elemen arsitektural, yang didalamnya terkandung dan terdapat fungsi, maksud, tujuan, dan kehendak manusia (Ashihara, 1983).

Dalam suatu wilayah kota, ada berbagai macam ruang aktivitas manusia, diantaranya adalah ruang aktivitas perdagangan, yang merupakan ruang dimana terdapat kegiatan perdagangan atau perekonomian kota, ruang aktivitas pendidikan, merupakan ruang dimana aktivitas pendidikan berlangsung, ruang aktivitas perkantoran, merupakan ruang dimana terdapat bangunan-bangunan perkantoran dengan segala kegiatannya berlangsung, ruang aktivitas permukiman, merupakan ruang dimana terdapat mayoritas rumah-rumah penduduk berada, serta ruang aktivitas campuran, yaitu ruang dimana segala macam aktivitas berada.

2.4.2. Karakteristik Ruang Aktivitas PKL

Pembangunan suatu tempat bagi kegiatan perdagangan sangat tergantung pada lokasi. Begitu pula halnya dengan munculnya kegiatan perdagangan sektor informal. Aktivitas sektor ini akan muncul mendekati lokasi-lokasi strategis, dimana terdapat tingkat kunjungan tinggi. Hal ini berkaitan dengan salah satu fungsi dari pemasaran, yaitu mendekatkan komoditi pada konsumen (*place utility*). Oleh karena aktivitas kegiatan perdagangan sektor informal akan hadir di lokasi-lokasi keramaian seperti pada kawasan perdagangan, perkantoran, pendidikan, perumahan, dan lokasi-lokasi strategis lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bromley (dalam Manning dan Effendi, 1996 : 232) berdasarkan hasil penelitiannya mengenai pedagang sektor informal di Cali, Colombo, bahwa para pedagang sektor informal dijumpai di semua sektor kota, terutama berpusat di tengah kota dan pusat-pusat hiburan lainnya ketika ada pertunjukkan, sehingga menarik sejumlah besar penduduk.

Adanya kecenderungan penggunaan ruang kota bagi aktivitas usaha PKL ini tidak lepas dari adanya keberadaan sektor formal di suatu lokasi. Atau dengan kata lain adalah ada interaksi ekonomi antara sektor formal (perkantoran dan pertokoan) dengan sektor informal (PKL). Rachbini dan Hamid (1994 : 90-91) dalam observasinya mengenai PKL di Jakarta dan Surabaya menemukan adanya kecenderungan bahwa disetiap berdirinya gedung bertingkat di Jalan Sudirman Jakarta dapat disaksikan sejumlah PKL berderet sepanjang jalan. Mereka melayani para karyawan atau pegawai bergaji rendah.

Mc. Gee dan Yeung (1977 : 61) menyatakan bahwa pada umumnya PKL cenderung untuk berlokasi secara mengelompok pada area yang memiliki tingkat intensitas aktivitas yang tinggi, seperti pada simpul-simpul jalur transportasi atau lokasi-lokasi yang memiliki aktivitas hiburan, pasar, maupun ruang terbuka. Shirvani (1985 : 37) menyatakan bahwa

aktivitas PKL di perkotaan merupakan pendukung aktivitas (*activity support*) dari aktivitas-aktivitas yang ada. Aktivitas-aktivitas tersebut timbul karena adanya aktivitas-aktivitas fungsional kota.

Berdasarkan pemanfaatan ruang, aktivitas sektor informal PKL pada umumnya menempati ruang umum dan ruang privat atau pribadi yang ada. Ruang umum merupakan jenis ruang yang dimiliki pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas. Contoh dari ruang umum adalah taman kota, trotoar, ruang terbuka, lapangan, dan sebagainya. Termasuk pula fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana yang terdapat di ruang umum tersebut, seperti halte, jembatan penyeberangan, dan sebagainya. Sedangkan ruang privat atau pribadi adalah jenis ruang yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu. Misalnya lahan pribadi yang dimiliki oleh pemilik pertokoan, perkantoran, dan sebagainya. Karena penggunaan ruang-ruang inilah yang akhirnya menimbulkan *conflict of interest*, karena lahan tersebut seharusnya dipergunakan oleh berbagai pihak dengan berbagai kepentingan, tidak saja bagi pelaku sektor informal.

Suatu studi yang dilakukan oleh Joedo (1977, dalam Widjajanti, 2000 : 35) berkaitan dengan lokasi yang diminati aktivitas perdagangan sektor informal, diketahui beberapa ciri sebagai berikut :

1. Terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu yang relatif sama sepanjang hari. Ciri ini bisa kita jumpai di lokasi-lokasi perdagangan, pendidikan, dan perkantoran.
2. Berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat kegiatan-kegiatan perekonomian kota dan pusat non ekonomi perkotaan, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar. Kondisi ini merupakan ciri dari suatu lokasi-lokasi wisata atau ruang-ruang rekreatif kota, seperti taman-taman kota dan lapangan olah raga yang biasa ramai di hari libur.

3. Mempunyai kemudahan untuk terjadi hubungan antara pedagang dengan calon pembeli, walaupun dilakukan dalam ruang yang relatif sempit.
4. Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan umum.

2.4.3. Pilihan Ruang Aktivitas PKL

Sudah merupakan fenomena yang umum terjadi bila kita melihat trotoar dan bahu jalan, terutama di lokasi keramaian kota, dipenuhi oleh pelaku sektor informal PKL, yang menggunakannya sebagai tempat melakukan aktivitas usahanya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bromley (dalam Manning dan Effendi, 1996 : 236) terjadi karena PKL dalam memilih lokasi bagi aktivitas usahanya akan berusaha untuk selalu mendekati pasar atau pembeli. Mereka akan berusaha agar barang atau jasa yang dijual terlihat oleh pembeli. Oleh karena itu mereka akan memilih lokasi-lokasi yang strategis dan menguntungkan di pusat kota atau di suatu lokasi yang merupakan lokasi aktivitas masyarakat. Sehingga dapat kita jumpai kehadiran PKL di sekitar lokasi aktivitas perdagangan, pendidikan, perkantoran, dan aktivitas sosial masyarakat lainnya. Dalam teori lokasi juga disebutkan bahwa bagi pedagang terdapat kecenderungan untuk berorientasi kepada konsentrasi konsumen dalam menentukan lokasi tempat usaha (Djojodipuro, 1992 : 30).

Ciri atau karakteristik tersebut diatas merupakan bagian dari strategi pemasaran. Pemasaran menurut William J. Stanton (dalam Swastha, 1986 : 5) merupakan suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan, baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial.

Selain faktor lokasi yang strategis dalam arti dekat dengan keramaian atau mudah dijangkau pembeli, PKL juga memperhitungkan faktor kedekatan (*proximity*). Dean Forbes (dalam Manning dan Effendi, 1996 : 348), dari hasil penelitiannya mengenai PKL di Ujung

Pandang, menyatakan bahwa ada variasi pemusatan-pemusatan ruang dalam PKL di kota Ujung Pandang yang disebabkan oleh hubungan yang kompleks antara suplai pekerja, keperluan produksi, perilaku pemasaran, dan sarana serta prasarana transportasi. Perlunya lokasi produksi dan pemasaran dekat dengan sumber bahan baku telah mendorong munculnya pemusatan sektor informal PKL.

Rachbini dan Hamid (1994 : 101) berdasarkan hasil penelitiannya mengenai PKL di Jakarta dan Surabaya mengemukakan bahwa ada korelasi yang tinggi antara tingkat mobilitas tempat usaha dengan mobilitas tempat tinggal. Artinya mobilitas tempat tinggal terjadi karena mobilitas tempat usaha dan bukan sebaliknya. Massa pedagang dan jasa informal harus mengikuti dan bertempat tinggal dimana saja dan kemana gerobak alat dagangannya itu akan dipangkalkan. Mereka harus dekat dengan tempat usahanya. Jika tidak mereka akan dililit oleh masalah ongkos transportasi dan kesulitan-kesulitan lain yang menyangkut cara membawa dan menyimpan alat-alat usahanya.

Dalam teori lokasi yang mengemukakan tentang transportasi disebutkan bahwa penting untuk menentukan lokasi sedemikian sehingga diperoleh biaya angkutan yang minimum (Djojodipuro, 1992 : 30). Hal ini berkait pula dengan ketersediaan sarana transportasi, baik bagi PKL bersangkutan maupun bagi pembeli/konsumen. Aktivitas perekonomian kota umumnya merupakan tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan pelaku kegiatan.

Penempatan lokasi kegiatan ekonomi yang tidak mudah dijangkau, dalam arti sarana transportasi yang tersedia kurang/tidak memadai merupakan faktor penyebab kegagalan bagi pelaku yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu seringkali relokasi PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kota kurang mendapat respon yang baik, karena tidak didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk sarana transportasi. Tempat baru

tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai lokasi bagi aktivitas perdagangan. Akhirnya PKL yang diberi lokasi baru tersebut kembali ke lokasi yang lama (Kompas, 5 Juni 2001).

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan pilihan lokasi bagi aktivitas usahanya, para PKL akan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Adanya orientasi kepada konsentrasi konsumen, dalam arti PKL akan memilih lokasi sedekat mungkin dengan konsumennya.
2. Adanya pertimbangan terhadap faktor kedekatan lokasi, baik dengan pusat kegiatan masyarakat, tempat tinggal, sumber bahan baku, dan permukiman penduduk terdekat.
3. Adanya pertimbangan terhadap kemudahan transportasi.

2.5. PKL Dalam Rencana Tata Ruang Kota

Menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang, tata ruang adalah wujud struktural dan pola penataan ruang, baik direncanakan atau tidak. Sedangkan menurut Rapoport (dalam Sujarto, 1992 : 5), tata ruang merupakan suatu artian harfiah dari kata "*spatial*", yaitu segala sesuatu yang dipertimbangkan berdasarkan keruangan. Tata ruang pada hakekatnya merupakan lingkungan fisik yang didalamnya terdapat hubungan organisatoris antara berbagai macam obyek dan manusia yang terpisah dalam ruang-ruang tertentu. Kemudian Danujo (dalam Sujarto, 1992 : 6) menyatakan bahwa tata ruang merupakan bagian-bagian ruang yang disediakan untuk digunakan sebagai tempat benda-benda kegiatan dan perubahan. Adapun elemen yang membentuk suatu wilayah adalah :

1. Kumpulan dari pelayanan jasa termasuk didalamnya perdagangan, pemerintahan, keuangan yang cenderung terdistribusi secara berkelompok dalam pusat pelayanan.
2. Kumpulan dari industri sekunder pergudangan dan perdagangan grosir yang cenderung untuk berkumpul pada suatu tempat.

3. Lingkungan pemukiman sebagai tempat tinggal dari manusia dan ruang terbuka hijau.
4. Jaringan transportasi yang menghubungkan tempat-tempat tersebut di atas.

Dalam implementasinya diperlukan suatu penataan ruang yang dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Kota. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986, rencana tata ruang merupakan rencana yang disusun dalam rangka pengaturan dan pemanfaatan ruang kota.

Kebijakan pembangunan kota di negara-negara berkembang pada umumnya, seperti Indonesia misalnya, seringkali hanya memperhitungkan indikator-indikator atau elemen-elemen kota yang bersifat formal dalam perencanaannya. Hal ini lebih disebabkan karena adanya pandangan atau orientasi terhadap kondisi di negara-negara maju, dimana kondisi masyarakatnya telah mengalami modernisasi dengan tingkat pendapatan dan pendidikan yang cukup tinggi, sehingga kegiatan lebih banyak pada sektor formal. Sedangkan di negara-negara berkembang komposisi penduduk lebih besar pada kelompok masyarakat berpendapatan dan berpendidikan yang rendah. Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong munculnya aktivitas-aktivitas sektor informal, seperti PKL, terutama di wilayah perkotaan. Karakteristik sektor informal PKL diantaranya adalah memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang relatif rendah.

Mc.Gee dan Yeung (1977 : 40-44), menyatakan bahwa aktivitas "*hawkers*" menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan tata ruang, karena umumnya perdagangan sektor informal berlokasi pada fasilitas umum, seperti trotoar, ruang terbuka, halte, maupun badan jalan yang mengakibatkan ketidakteraturan wajah kota. Ketidakteraturan wajah kota yang sering kita dapati di kota-kota sekarang ini dengan adanya kehadiran PKL diantaranya adalah :

1. Banyaknya kawasan kumuh yang seringkali dijumpai di daerah-daerah pinggiran sungai.

2. Terjadinya penurunan kualitas lingkungan kawasan.
3. Terhambat proses penataan ruang kota yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah mengingat masih banyaknya para pedagang yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Sudewa (2002 : 119) berdasarkan hasil penelitiannya mengenai pengaruh keberadaan PKL terhadap kualitas lingkungan di kawasan Monumen Perjuangan 45 Surakarta menyatakan bahwa :

1. PKL mengganggu kenyamanan dan akses keluar masuk penghuni rumah dan aktivitas perkantoran.
2. Adanya PKL menyebabkan tidak dapat difungsikannya tempat rekreasi dan olahraga di kawasan tersebut.
3. Adanya PKL menimbulkan kesan kotor di depan pertokoan dan mengganggu sirkulasi lalu lintas menuju bangunan sekolah.

Mengenai penanganan PKL oleh pemerintah kota atau daerah, terutama yang berkaitan dengan ruang aktivitasnya, berdasarkan hasil survei IDRC (*Internasitonal Development Research Centre*) tahun 1973, di kota-kota Asia Tenggara, secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu (Mc.Gee dan Yeung, 1977 : 41-60) :

1. *Relokasi* atau pemugaran, merupakan suatu bentuk penanganan dengan cara memugar suatu lokasi, baik untuk dijadikan suatu bentuk fungsional baru yang berbeda dari semula ataupun perbaikan kondisi yang telah ada.
2. *Stabilisasi* atau pengaturan, yaitu cara penanganan dengan maksud untuk menata keadaan PKL di suatu lokasi. Salah satu tindakan dengan penanganan ini adalah mengatur kembali sekelompok PKL agar harmonis dan tidak mengganggu fungsi kota di lingkungan tempat mereka menjalankan usahanya. Berdasarkan pengalaman yang telah diterapkan dalam

bentuk penanganan secara stabilisasi ini di berbagai kota di Asia, termasuk Indonesia, adalah sebagai berikut :

- a. Penempatan PKL dalam ruang terbuka (*open market*) secara khusus, dimana kelancaran pergerakan konsumen untuk keluar masuk tetap diperhitungkan. Pengelolaan dengan cara ini telah berhasil diterapkan di Singapura dan Malaysia.
 - b. Pembebasan/penutupan jalan-jalan tertentu untuk lokasi aktivitas usaha PKL dan pergerakan pejalan kaki.
 - c. Pemanfaatan bagian tertentu dari jalan/trotoar yang terpilih untuk lokasi PKL dengan tetap menggunakan sebagian lain tertentu dari trotoar untuk kepentingan pejalan kaki, sedangkan jalan itu sendiri tetap berfungsi untuk sirkulasi lalu lintas.
 - d. Pemanfaatan ruang terbuka di sekitar kawasan perbelanjaan atau pusat keramaian untuk menampung aktivitas PKL, khususnya di waktu-waktu tertentu di saat tidak atau kurang dimanfaatkan.
 - e. Pemanfaatan ruang parkir pada waktu tertentu, misalnya sore atau malam hari dan waktu-waktu lainnya yang dinilai kurang terpakai.
3. *Removal* atau pemindahan, yaitu cara penanganan dimana PKL dipindahkan ke suatu lokasi yang ditentukan berdasarkan penelitian sebelumnya. Pemindahan ke lokasi tetap ini dapat berupa pasar resmi atau sebuah lokasi khusus yang ditetapkan sebagai lokasi berdagang bagi PKL. Cara ini sering dipergunakan oleh pemerintah kota di Indonesia, namun seringkali tidak atau kurang berhasil. Ada beberapa kendala yang menjadi faktor penyebab kegagalan cara penanganan seperti ini. Diantaranya adalah rancang bangunan yang tidak sesuai dengan karakteristik PKL yang ada, baik itu jenis dagangan, jenis sarana usaha yang digunakan, dan karakteristik lainnya. Kemudian faktor yang lain adalah finansial, berupa tarif sewa yang dinilai terlalu tinggi sehingga memberatkan pedagang.

2.6. Rangkuman Kajian Teori

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirangkumkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sektor informal hadir disaat sektor formal tidak memberi ruang lingkup yang cukup, sehingga kegiatan ekonomi berlangsung di luar sektor formal yang terorganisir.
2. Sektor informal merupakan suatu unit usaha yang berskala kecil, tidak memiliki legalitas hukum, pola usahanya bersifat sederhana dan menggunakan sistem kekeluargaan, dilakukan oleh dan untuk masyarakat golongan menengah ke bawah, dan dalam aktivitas usahanya tidak memerlukan keterampilan khusus.
3. Ada hubungan antara sektor formal dan informal yang ditunjukkan dari didapainya aktivitas sektor informal disekitar lokasi aktivitas sektor formal.
4. PKL memiliki karakteristik yang hampir sama dengan karakteristik sektor informal pada umumnya.
5. PKL di negara berkembang umumnya terdiri dari migran.
6. Karakteristik aktivitas PKL dapat ditinjau dari :
 - a. Jenis dagangan.
 - Makanan yang tidak dan belum diproses, termasuk didalamnya makanan mentah, seperti daging, buah-buahan, dan sayuran.
 - Makanan yang siap saji, seperti nasi dan lauk pauknya dan juga minuman.
 - Barang bukan makanan, mulai dari tekstil hingga obat-obatan.
 - Jasa, yang terdiri dari beragam aktivitas, misalnya tukang potong rambut, dan lain sebagainya.

b. Bentuk sarana perdagangan.

Bentuk sarana perdagangan yang digunakan, yang dapat dikelompokkan menjadi gerobak/kereta dorong, pikulan/keranjang, warung semi permanen, kios, dan gelaran/alas.

c. Pola penyebaran.

Berdasarkan pola penyebarannya, PKL dapat dikelompokkan menjadi PKL dengan pola penyebaran mengelompok (*focus agglomeration*) dan PKL dengan pola penyebaran memanjang (*linier concentration*)

d. Pola pelayanan.

Berdasarkan pola pelayanan aktivitasnya, PKL dapat ditinjau dari aspek :

- Fungsi pelayanan, yaitu fungsi pelayanan perdagangan dan jasa, rekreatif, dan sosial ekonomi.
- Golongan pengguna jasa, yaitu golongan menengah ke bawah.
- Skala pelayanan aktivitas PKL, yang dapat diketahui dari asal pengguna jasa, jauh atau dekat. Semakin dekat asal pengguna, maka pelayanan semakin kecil atau sebaliknya semakin jauh asal pengguna jasa, maka semakin besar skala pelayanan aktivitas PKL tersebut.
- Waktu pelayanan aktivitas PKL, yang dapat terbagi menjadi beberapa periode waktu dalam satu hari.
- Sifat pelayanan, yang dapat dikelompokkan menjadi pedagang menetap (*static*), semi menetap (*semi static*), dan pedagang keliling (*mobile*).

e. Ruang aktivitas PKL umumnya berada di ruang-ruang kota yang cukup strategis dengan tingkat kunjungan tinggi untuk mendekatkan produk pada konsumen dan adanya aktivitas sektor formal di suatu lokasi.

- f. PKL dalam memilih suatu lokasi untuk aktivitasnya akan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut, yaitu adanya orientasi kepada konsentrasi konsumen, dalam arti PKL akan memilih lokasi sedekat mungkin dengan konsumennya, Adanya pertimbangan terhadap faktor kedekatan lokasi, baik dengan pusat kegiatan masyarakat, tempat tinggal, sumber bahan baku, dan permukiman penduduk terdekat, dan adanya pertimbangan terhadap kemudahan transportasi.
7. Kebijakan tata ruang di kota-kota Indonesia pada umumnya belum menempatkan sektor informal seperti halnya sektor formal. Kondisi ini pada akhirnya mendorong munculnya aktivitas sektor informal di ruang-ruang yang sebenarnya bukan peruntukkannya.
8. Bentuk atau pola penanganan PKL oleh pemerintah kota pada umumnya adalah relokasi/pemugaran, stabilisasi/pengaturan, dan *removal*/pemindahan.

2.7. Instrumen Penelitian

Dalam rangka mencapai tujuan studi, yaitu menemukenali perilaku khas dari PKL di Kota Salatiga dan mengetahui persepsi masyarakat terhadap keberadaan aktivitas PKL tersebut, maka variabel-variabel yang digunakan sebagai instrumen penelitian adalah sebagai berikut :

1. Karakteristik PKL, meliputi :
 - a. Karakteristik aktivitas usaha, dengan indikator jenis dagangan, bentuk sarana dagang, lama/waktu aktivitas, dan pola sebaran/pengelompokkan pedagang sejenis/lain jenis.
 - b. Karakteristik lokasi aktivitas, dengan indikator lokasi ruang, status ruang, jenis ruang (tempat berjualan), luas ruang, alasan pemilihan lokasi, dan perilaku dalam penggunaan tempat usaha (cara penyimpanan sarana usaha).
 - c. Persepsi PKL terhadap kedekatan dan kemudahan pencapaian lokasi usaha, dengan indikator jarak dari lokasi terhadap kegiatan masyarakat, tempat tinggal, sumber bahan

baku dagangan, dan permukiman penduduk terdekat, serta kemudahan pencapaian lokasi usaha dengan transportasi umum.

2. Persepsi masyarakat terhadap lokasi aktivitas PKL, dengan indikator :

- a. Alasan berbelanja.
- b. Manfaat dan gangguan dari adanya aktivitas PKL
- c. Penempatan lokasi aktivitas PKL.
- d. Perlu tidaknya penataan lokasi aktivitas PKL.
- e. Pendapat tentang pengelompokkan PKL.

BAB III

GAMBARAN UMUM PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SALATIGA

Dalam bab ini akan diuraikan secara umum gambaran aktivitas PKL di wilayah Kota Salatiga. Uraian akan diawali terlebih dahulu dengan gambaran umum Kota Salatiga, yang terdiri dari kondisi geografis, peran dan fungsi kota, kebijakan penataan ruang, ketersediaan fasilitas perkotaan, dan perkembangan jumlah penduduk. Sedangkan gambaran PKL di Kota Salatiga meliputi perkembangan dan penyebaran lokasi aktivitas PKL, peran PKL dalam perekonomian kota, kebijakan Pemerintah Kota Salatiga terhadap aktivitas PKL, karakteristik lokasi studi.

3.1. Gambaran Umum Kota Salatiga

3.1.1. Kondisi Geografis Kota Salatiga

Kota Salatiga terletak di wilayah Jawa Tengah bagian tengah, tepatnya berada di dalam wilayah Kabupaten Semarang, berjarak ± 54 km kearah selatan dari Kota Semarang, Secara geografis berada pada $110^{\circ}27' - 110^{\circ}32'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}17' - 7^{\circ}23'$ Lintang Selatan. Memiliki posisi yang strategis karena berada pada jalur transportasi darat utama Jakarta – Semarang – Solo dan terletak diantara dua kota pusat pertumbuhan yaitu Kota Semarang dan Kota Surakarta.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Antara Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, Kota Salatiga memiliki luas wilayah 5.678,11 hektar, yang terdiri dari 4 kecamatan dengan 22 desa/kelurahan. Peta wilayah administrasi Kota Salatiga ini dapat dilihat pada Gambar 3.1.

3.1.2. Peran dan Fungsi Kota Salatiga

Kota Salatiga sebagaimana kota-kota lainnya mempunyai fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat kegiatan sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Sedangkan secara khusus Kota Salatiga memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Kota Transit Pariwisata.

Fungsi ini diuntungkan dengan kedudukan Kota Salatiga yang berada pada jalur utama lintasan Semarang- Surakarta yang mengarah pada fungsi *stop over*, dimana terjadi penyebaran arus wisatawan ke daerah wisata yang terletak di luar wilayah kota Salatiga. Lokasi kota Salatiga yang terletak dilekeng Gunung Merbabu memberikan udara yang nyaman untuk beristirahat.

b. Kota Pendidikan dan Olah Raga.

Fungsi ini ditunjang oleh keberadaan fasilitas pendidikan yang memiliki reputasi nasional dan internasional, yaitu Universitas Kristen Satya Wacana, dan 3 (tiga perguruan tinggi lainnya, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMA, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Walisongo, dan Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing (STIBA) Satya Wacana, serta keberadaan klub-klub atletik yang telah melahirkan atlet-atlet bertaraf internasional.

c. Pusat Kegiatan Perdagangan.

Kegiatan perdagangan cukup menonjol akibat dukungan transportasi yang memadai serta banyaknya fasilitas perekonomian yang menunjang perkembangan kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti fasilitas perbankan, perdagangan grosir, maupun sarana dan prasarana ekonomi lainnya.

3.1.3. Kebijakan Penataan Ruang Kota

Dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota Salatiga tahun 1996-2006, wilayah Kota Salatiga terbagi menjadi 5 (lima) Bagian Wilayah Kota (BWK) sesuai dengan tingkat atau skala pelayanannya, dari bagian yang berskala besar sampai berskala kecil. Pembagian wilayah kota tersebut merupakan usaha untuk pemeratakan kegiatan di seluruh wilayah Kota Salatiga dengan penyebaran fasilitas pelayanannya. Namun demikian masih terlihat bahwa aktivitas perekonomian kota masih tertumpu di sekitar pusat kota (BWK I), sehingga aktivitas perdagangan kaki lima pun cenderung terpusat di wilayah tersebut. Peta pembagian wilayah Kota Salatiga dapat dilihat pada Gambar 3.2. Adapun pembagian wilayah Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

1. BWK I (Kawasan Pusat Kota)

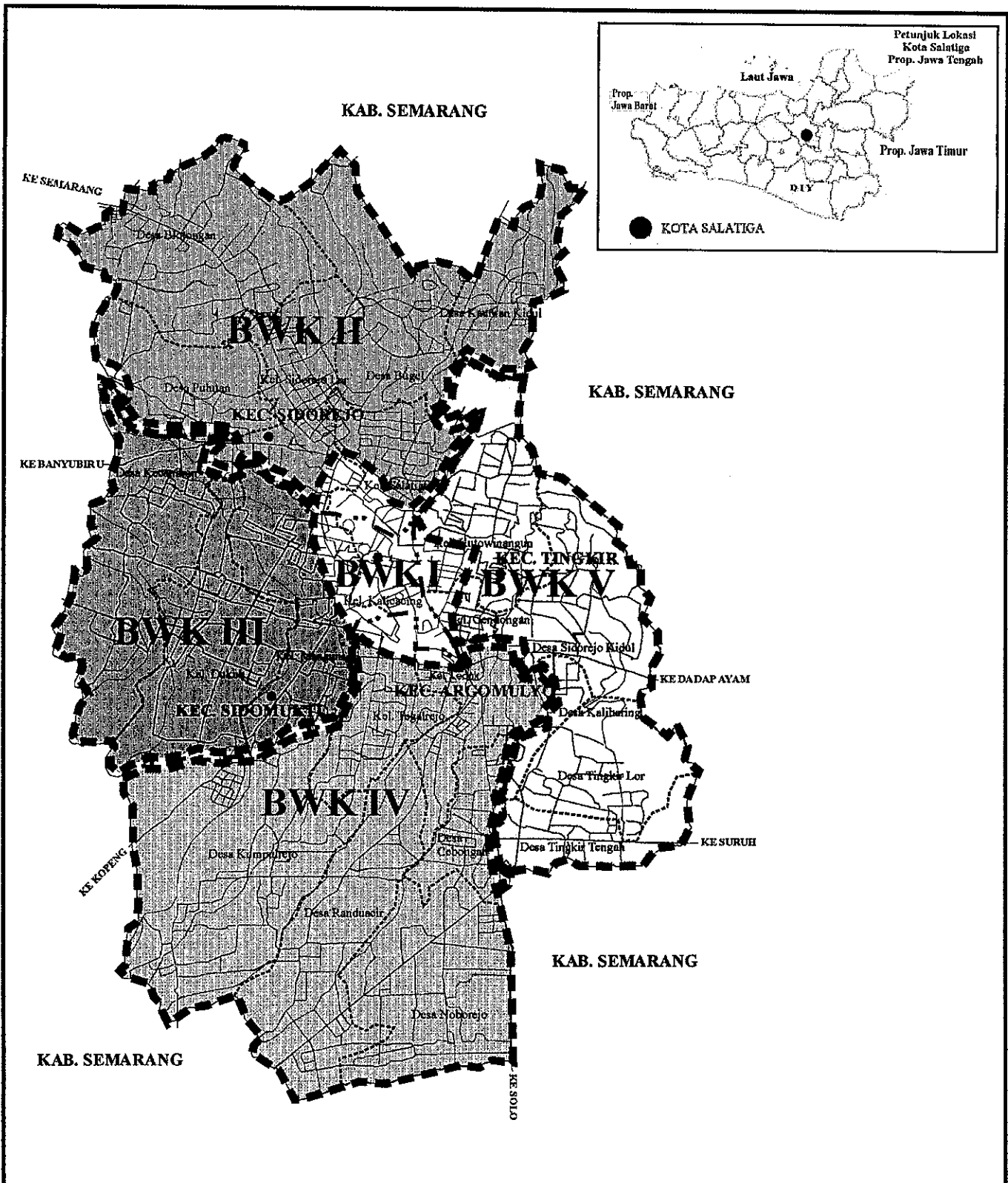
Memiliki luas wilayah 261,91 hektar, dengan arah pengembangan sebagai fungsi :

- a. Pengembangan perdagangan dan jasa.
- b. Perkantoran/pemerintahan.
- c. Fasilitas sosial.

2. BWK II (Kota Bagian Utara)

Luas wilayah yang termasuk dalam BWK II adalah 1.574,75 hektar, dengan arah fungsi pengembangan :

- a. Pusat pemerintahan kecamatan.
- b. Pusat kegiatan pendidikan.
- c. Pertanian/agroindustri.
- d. Perumahan/perkampungan.



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**





TESIS

STUDI AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PEMANFAATAN RUANG DI KOTA SALATIGA

PETA

**PEMBAGIAN BWK
(BAGIAN WILAYAH KOTA) SALATIGA**

LEGENDA :

-  BATAS KOTA/KABUPATEN
 BATAS KECAMATAN
 BATAS DESA
 SUNGAI
 BATAS BWK



NO. GAMBAR

3.2.

SKALA

1 : 90.000

SUMBER

**BAPPEDA
KOTA SALATIGA**

3. BWK III (Kota Bagian Barat)

Memiliki luas wilayah 1.043,04 hektar, dengan arah pengembangan sebagai fungsi :

- a. Pusat pemerintahan kecamatan.
- b. Perumahan/permukiman.
- c. Perkantoran.
- d. Pariwisata.

4. BWK IV (Kota Bagian Barat Daya)

Luas wilayah BWK IV adalah 1.837,19 hektar, dengan arah fungsi utama :

- a. Pusat pemerintahan kecamatan.
- b. Perumahan/permukiman.
- c. Industri.
- d. Perdagangan.

5. BWK V (Kota Bagian Tenggara)

Memiliki luas wilayah 988,57 hektar, dengan arahan fungsi utama :

- a. Pusat pemerintahan kecamatan.
- b. Perumahan/permukiman.
- c. Pertanian.
- d. Fasilitas transportasi.
- e. Agroindustri.

3.1.4. Fasilitas Perkotaan

Aktivitas atau kegiatan penduduk memerlukan ketersediaan fasilitas. Fasilitas perkotaan yang dibutuhkan bagi kegiatan masyarakat tersebut tersedia cukup lengkap di Kota Salatiga. Kondisi ini membuat kota yang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang ini menjadi tempat kunjungan bagi masyarakat sekitar tanpa memperhatikan batas

administrasi, terlebih dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, sehingga jarak bukanlah penghalang. Secara rinci fasilitas perkotaan yang tersedia di Kota Salatiga pada tahun 2000 disajikan pada Tabel III.1. berikut.

TABEL III.1.
FASILITAS PERKOTAAN DI KOTA SALATIGA TAHUN 2000

NO.	FASILITAS	JENIS	JUMLAH
1.	Pendidikan	TK	62
		SD	108
		SLTP	22
		SLTA	25
		Akademi/PT	4
2.	Kesehatan	Rumah Sakit	3
		Rumah Bersalin	3
		Poliklinik/Balai Pengobatan	9
		Puskesmas	6
		Puskesmas Pembantu	15
		Praktek Dokter	74
3.	Peribadatan	Surau	271
		Mesjid	164
		Gereja	51
		Pura/Vihara	4
4.	Perekonomian	Kios	459
		Rumah Toko	9
		Pasar	12
		Bank	12
5.	Perkantoran	Kantor Lurah/Desa	22
		Kantor Camat	4
		Pos kebakaran	1
		Kantor Polisi Sektor	2
		Kantor Pos Cabang	1
		Kantor PLN	2
		Kantor PDAM	1
		Kantor Telpon	1
		Kantor Balai Kota	1
		Gedung Serba Guna	21

Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka Tahun 2000.

Ketersediaan fasilitas perkotaan yang cukup lengkap di Kota Salatiga sebagaimana nampak pada tabel di atas menjadi salah satu faktor pendorong perkembangan sektor informal PKL di Kota Salatiga. Dengan fungsi sebagai kota perdagangan dan jasa dan kota pelayanan bagi daerah sekitar, khususnya masyarakat Kabupaten Semarang, membuat kota ini setiap harinya ramai dikunjungi, terutama di lokasi-lokasi yang berkaitan dengan fungsi tersebut.

masyarakat. Dengan tingginya aktivitas masyarakat, terutama yang berkaitan dengan aktivitas sosial ekonomi, maka akan semakin menarik PKL untuk muncul.

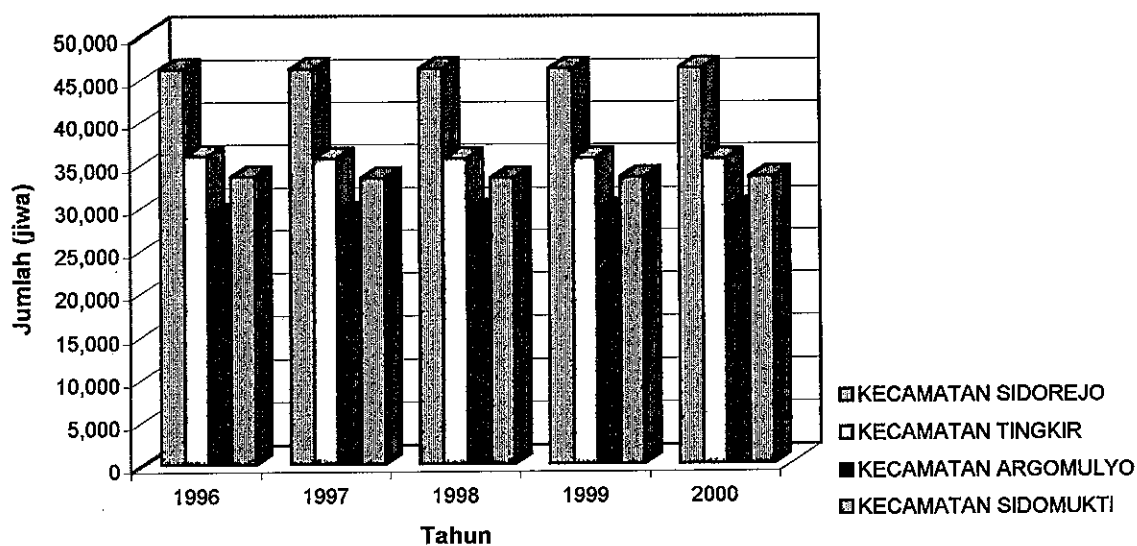
3.1.5. Perkembangan Jumlah Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk Kota Salatiga dalam kurun waktu 1996-2000 dilihat pada Tabel III.2. dibawah ini.

TABEL III.2.
PERKEMBANGAN PENDUDUK KOTA SALATIGA TAHUN 1996-2000

Tahun	Kecamatan				Jumlah (Jiwa)
	Sidorejo	Tingkir	Argomulyo	Sidomukti	
1996	46.057	35.859	29.111	33.450	144.477
1997	46.083	35.580	29.324	33.308	144.295
1998	46.091	35.554	29.528	33.310	144.483
1999	46.099	35.612	29.587	33.341	144.639
2000	46.150	35.484	29.754	33.408	144.796

Sumber : Kota Salatiga Dalam Angka Tahun 1996 – 2000



GAMBAR 3.3.
DIAGRAM BATANG PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK KOTA
SALATIGA MENURUT KECAMATAN
TAHUN 1996-2000

Sumber : Kota Salatiga Dalam Angka Tahun 1996 – 2000, diolah kembali

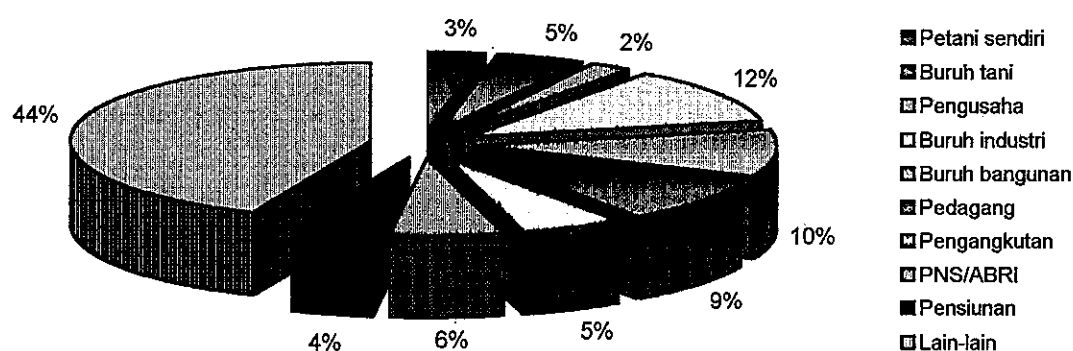
Dari tabel dan gambar di atas terlihat bahwa perkembangan jumlah penduduk Kota Salatiga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, yaitu antara tahun 1996-2000 tidak menunjukkan peningkatan yang berarti, yaitu hanya 0,22%. Namun jika melihat situasi dan kondisi kota yang terlihat dan terasa semakin padat dan ramai, maka hal ini lebih disebabkan karena suatu kegiatan atau aktivitas masyarakat termasuk juga aktivitas perekonomian umumnya tidak mengenal adanya batas administrasi wilayah. Sehingga dengan ketersediaan fasilitas masyarakat yang cukup lengkap di Kota Salatiga, seperti fasilitas perdagangan, pendidikan, dan fasilitas sosial, membuat kota yang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang ini nampak semakin ramai dari tahun ke tahun.

Sedangkan berdasarkan mata pencaharian, penduduk Kota Salatiga dikelompokkan ke dalam 10 kelompok mata pencaharian, yang terdiri dari mata pencaharian petani sendiri, buruh tani, pengusaha, buruh industri, buruh bangunan, pedagang, pengangkutan, PNS/ABRI, pensiunan dan lain-lain. Secara rinci komposisi penduduk Kota Salatiga berdasarkan mata pencaharian pada masing-masing kecamatan pada tahun 2000 dapat dilihat pada Tabel III.3.

TABEL III.3.
KOMPOSISI PENDUDUK KOTA SALATIGA MENURUT MATA PENCAHARIAN
TAHUN 2000

JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)				JUMLAH (JIWA)
	KECAMATAN SIDOREJO	KECAMATAN TINGKIR	KECAMATAN ARGOMULYO	KECAMATAN SIDOMUKTI	
Petani sendiri	1.151	617	1.438	714	3.920
Buruh tani	1.778	782	2.142	1.028	5.730
Pengusaha	466	319	797	1.168	2.750
Buruh industri	4.686	3.644	3.331	2.995	14.656
Buruh bangunan	4.579	2.658	1.208	3.662	12.107
Pedagang	4.071	2.517	1.720	2.946	11.254
Pengangkutan	2.852	1.535	740	1.581	6.708
PNS/ABRI	2.983	2.839	953	1.169	7.944
Pensiunan	1.838	1.380	697	1.302	5.217
Lain-lain	15.714	14.256	12.537	12.144	54.651
JUMLAH	40.128	30.457	25.563	28.709	124.937

Sumber : Salatiga Dalam Angka Tahun 2000



GAMBAR 3.4.
DIAGRAM KOMPOSISI PENDUDUK KOTA SALATIGA MENURUT
MATA PENCAHARIAN
TAHUN 2000

Sumber : Salatiga Dalam Angka Tahun 2000, diolah kembali.

Dari tabel dan diagram di atas terlihat bahwa mata pencaharian lain-lain merupakan yang terbesar, yaitu mengisi 44% dari mata pencaharian penduduk Kota Salatiga. Soetomo (1998) menyatakan bahwa pekerjaan lain-lain dapat dikategorikan sebagai pekerjaan di sektor informal. Sebagai bagian dari kegiatan di sektor informal, maka PKL ada di dalam kelompok tersebut. Hal ini juga berarti bahwa pekerjaan di sektor informal merupakan mata pencaharian yang paling banyak dilakukan oleh penduduk Kota Salatiga.

3.2. Pedagang Kaki Lima Di Kota Salatiga

3.2.1. Perkembangan dan Penyebaran Lokasi Aktivitas PKL

Semenjak terjadi krisis ekonomi yang kemudian diikuti bergulirnya reformasi di negeri ini, membuat banyak perubahan di hampir semua sendi kehidupan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat banyak mengalami perubahan. Banyak kegiatan ekonomi di sektor formal yang terimbas krisis membuat persaingan untuk memperoleh kesempatan kerja semakin besar. Untuk mempertahankan hidup, mereka yang tersingkir atau belum masuk ke dalam sektor formal beralih ke sektor informal yang memberi banyak peluang. Diantara

kegiatan ekonomi sektor informal tersebut adalah PKL. Merebaknya jenis perdagangan sektor informal ini diduga karena hampir tidak ada prosedur resmi dalam pendirian usahanya, oleh karena itu hampir tidak memerlukan biaya yang relatif besar dan waktu yang lama, kemudian potensi keuntungan yang diperoleh pun cukup baik.

Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir terlihat adanya lonjakan aktivitas PKL di Kota Salatiga, terutama di sekitar pusat kota dan kawasan-kawasan fungsional kota atau lokasi aktivitas masyarakat, seperti sekitar aktivitas perdagangan (pasar), pendidikan, perkantoran, dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat lainnya. Belum ada data resmi yang menyebutkan jumlah PKL secara keseluruhan yang beraktivitas di kota yang termasuk kategori kota sedang ini. Lonjakan jumlah tersebut dapat dicontohkan dari keberadaan PKL disepanjang Jl. Diponegoro, mulai dari pertigaan Kauman hingga Tamansari. Sebelum tahun 1997, hampir tidak ada aktivitas PKL di sana, kecuali pedagang-pedagang yang bersifat *mobile* yang hanya kita temui di waktu aktivitas masyarakat dan mereka menggunakan sarana dagang berupa gerobak yang dibawa kemanapun mereka pergi. Setelah tahun 1997, jumlah PKL yang cenderung bersifat menetap, yang ditunjukkan dengan tenda-tenda atau sarana dagang lain yang ditinggal di lokasi, semakin lama semakin bertambah, dan menutupi bangunan-bangunan yang ada di belakangnya. Adapun peta penyebaran lokasi aktivitas PKL di Kota Salatiga dapat dilihat pada Gambar 3.5.

Ada kecenderungan PKL di Kota Salatiga lebih memanfaatkan ruang-ruang di sekitar pusat kota. Hal ini disebabkan karena perkembangan Kota Salatiga itu sendiri. Kota Salatiga yang memiliki luas wilayah 5.678,11 hektar, cenderung memiliki arah perkembangan dan pertumbuhan yang bersifat *linier*, yang memanfaatkan kegiatan pada jalur-jalur jalan regional/jalan utama kota dari arah Utara – Selatan. Perkembangan fisik tersebut diakibatkan oleh adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dan mendukungnya. Antara lain dipengaruhi

oleh kepadatan penduduk yang berkembang di pusat kota sepanjang jalur utama yang membelah Kota Salatiga. Kondisi ini disebabkan karena adanya kecenderungan penduduk untuk ingin mendapatkan kesempatan terhadap fasilitas-fasilitas yang tersedia, disamping adanya kecenderungan kemudahan pencapaian pada fasilitas tersebut, seperti prasarana jalan raya, fasilitas transportasi umum, fasilitas perdagangan, fasilitas pelayanan umum, fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran pemerintahan, fasilitas rekreasi, dan fasilitas lainnya yang terbangun di pusat kota dan cenderung berada di sekitar jalur jalan utama. Kondisi seperti yang diuraikan di atas, pada akhirnya mempengaruhi pula perkembangan dan pertumbuhan sektor informal.

Sebagai lokasi bagi aktivitas perdagangan, Jl. Jenderal Sudirman merupakan lokasi utama aktivitas PKL, terlihat dari jumlah PKL yang ada di lokasi tersebut. Data mengenai jumlah PKL ini sebagaimana tercantum pada Tabel I.2. Dengan tidak adanya lokasi yang khusus diperuntukkan bagi aktivitas perdagangan informal ini membuat mereka memanfaatkan lokasi-lokasi atau ruang-ruang yang memiliki tingkat intensitas kunjungan tinggi. Dapat kita buktikan dengan keberadaan mereka yang tepat berada di trotoar depan aktivitas pendidikan, perdagangan, perkantoran, permukiman, dan aktivitas sosial masyarakat lainnya.

Akibat dari perilaku pemanfaatan ruang tersebut adalah pada berkurangnya fungsi awal dari ruang dimaksud. Selain itu juga tampilan kota secara visual yang terkesan kumuh dan kotor, karena aktivitas ini cenderung belum tertata, terutama dari segi tampilannya. Dengan perilaku yang saat ini cenderung meninggalkan sarana usahanya tetap di lokasi semakin memperburuk tampilan kota.



3.2.2. Peranan PKL Dalam Perekonomian Kota Salatiga

PKL selain memiliki dampak negatif juga memiliki dampak positif. Salah satu dampak positif dari keberadaan PKL adalah sebagai penyedia lapangan kerja di saat pekerjaan yang tersedia di sektor formal terbatas. Menjadi PKL dianggap sebagai cara termudah untuk tetap bertahan hidup.

Bagi Pemerintah Kota Salatiga, keberadaan aktivitas PKL memberi kontribusi yang tidak sedikit terhadap pendapatan daerah (PAD), yaitu dari penarikan retribusi (kebersihan) yang dilakukan terhadap aktivitas sektor informal tersebut. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Dinas Pengelolaan Pasar dan PKL Kota Salatiga, besarnya retribusi yang dapat ditarik dari aktivitas PKL ini adalah sekitar Rp 430 ribu – Rp 450 ribu per hari atau kurang lebih sekitar Rp 160.600.000,00 per tahun. Jumlah yang tidak sedikit mengingat cukup terbatasnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan Kota Salatiga. Adapun PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Salatiga tahun 2001 adalah Rp 9.316.652.000,00. Dari jumlah tersebut, besarnya pendapatan yang berasal dari retribusi daerah adalah Rp 5.414.093.000,00 (Bagian Keuangan Setda Kota Salatiga, 2001).

3.2.3. Pola Pelayanan Aktivitas PKL Kota Salatiga

Mc. Gee dan Yeung (1977 : 76) menyatakan bahwa pola pelayanan adalah cara berlokasi aktivitas PKL dalam memanfaatkan ruang kegiatan sebagai tempat usaha. Berdasarkan pola pelayanan ini, aktivitas PKL di Kota Salatiga dapat ditinjau dari aspek fungsi pelayanan, golongan pengguna jasa, skala pelayanan, dan sifat pelayanan, sebagaimana diuraikan berikut. Sedangkan tinjauan dari aspek waktu pelayanan diuraikan pada bab IV.

3.2.3.1. Fungsi Pelayanan Aktivitas PKL Kota Salatiga

Menurut Soedjana (1981, dalam Pratihari, 1996 : 21) secara umum peran dan fungsi aktivitas PKL dalam kehidupan perkotaan terdiri atas 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi pelayanan perdagangan dan jasa, pelayanan rekreatif, dan pelayanan sosial ekonomi. Hal inilah yang nampak dalam aktivitas PKL di Kota Salatiga.

Soedjana (1981, dalam Pratihari, 1996 : 21) menyatakan bahwa fungsi perdagangan dan jasa ditunjukkan dengan dipasarkannya hasil produksi suatu barang dan jasa oleh PKL. Hal ini berarti PKL merupakan bagian dari sistem perdagangan kota, khususnya dalam perdagangan eceran.

Kemudian fungsi pelayanan rekreatif ditunjukkan oleh keberadaan PKL yang berlokasi di alam terbuka, misalnya ditunjukkan dengan aktivitas PKL yang mengambil lokasi di sekitar Lapangan Pancasila. Di lokasi tersebut konsumen dapat menikmati makanan di bawah pohon peneduh sambil menikmati suasana sekitar, sehingga konsumen merasa nyaman menikmati makanan sambil bersantai.

Sedangkan fungsi pelayanan sosial ekonomi didasarkan pada pandangan masing-masing pelaku yang terlibat didalamnya. Penjaja atau pedagang memandang aktivitasnya sebagai sumber pendapatan bagi peningkatan kesejahteraan diri mereka dan keluarga, sedangkan bagi pengguna atau konsumen, aktivitas sektor informal ini berguna dalam penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam keseharian dengan harga yang relatif lebih murah dibanding harga di toko atau supermarket. Dan bagi pemerintah kota, sedikit banyak aktivitas PKL ini membantu dalam memecahkan masalah penyerapan tenaga kerja, pemerataan kesejahteraan masyarakat, dan sumber pendapatan daerah.

3.2.3.2. Golongan Pengguna Jasa Aktivitas PKL

Golongan pengguna jasa aktivitas PKL berkaitan dengan siapa konsumen pembeli/pengguna aktivitas PKL. Sebelumnya dikenal bahwa golongan pengguna jasa aktivitas PKL umumnya adalah masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Hal ini disebabkan karena harga yang ditawarkan PKL relatif lebih rendah, sehingga terjangkau masyarakat golongan tersebut. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachbini dan Hamid (1994 : 92) terhadap sektor informal (PKL) di Jakarta, bahwa dari sekitar dua juta buruh atau pegawai sektor formal (swasta atau negeri) di Jakarta, kurang lebih satu setengah juta membeli makanan dari sektor informal.

Namun dengan semakin berkembangnya jenis pelayanan pedagang sektor informal, maka dewasa ini pelayanan mereka tidak hanya terbatas pada golongan menengah ke bawah. Masyarakat golongan menengah ke atas pun saat ini turut menikmati pelayanan PKL. Hal ini dibuktikan dari hasil survai primer terhadap masyarakat konsumen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.4. di bawah ini.

TABEL III.4.
TINGKAT PENDAPATAN/ANGSARA MASYARAKAT

No	Pendapatan/Uang Saku	Jumlah	%
1	< Rp 500 ribu	29	29.0
2	Rp 500 ribu – Rp 1 juta	45	45.0
3	> Rp 1 juta	26	26.0
Jumlah		100	100.0

Sumber : Hasil penelitian dan analisis penulis, 2002.

Pada Tabel III.4. di atas nampak bahwa sekitar 71% masyarakat (responden) pengguna jasa aktivitas PKL merupakan masyarakat golongan menengah ke atas, dengan pendapatan/uang saku mulai dari Rp 500 ribu ke atas.

3.2.3.3. Skala Pelayanan Aktivitas PKL Kota Salatiga

Skala pelayanan PKL di Kota Salatiga tidak terbatas bagi penduduk atau masyarakat yang secara administrasi merupakan penduduk Kota Salatiga, namun juga meliputi masyarakat sekitar Kota Salatiga atau masyarakat yang kebetulan berkunjung atau mampir di Kota Salatiga. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil survai yang dilakukan penulis, yaitu dari 100 responden masyarakat/konsumen PKL, 62% merupakan penduduk Kota Salatiga dan selebihnya (38%) berasal dari luar Kota Salatiga. Kelompok terakhir ini merupakan pengunjung yang kebetulan mampir di sela-sela perjalanan menuju kota berikutnya ataupun yang memang sengaja datang ke Kota Salatiga, seperti masyarakat/ penduduk Kabupaten Semarang. Tabel III.5. berikut memperlihatkan asal daerah masyarakat sebagai konsumen PKL yang merupakan hasil dari survai yang dilakukan.

TABEL III.5.
ASAL DAERAH MASYARAKAT KONSUMEN PKL

No	Asal Daerah	Jumlah	%
1	Kota Salatiga	62	62.0
2	Luar Kota Salatiga	38	38.0
Jumlah		100	100.0

Sumber : Hasil penelitian dan analisis penulis, 2002.

3.2.3.4. Sifat Pelayanan Aktivitas PKL Kota Salatiga

Berdasarkan sifat pelayanannya, aktivitas PKL di Kota Salatiga terdiri dari pedagang menetap (*static*), pedagang semi menetap (*semi static*), dan pedagang keliling (*mobile*). Menurut Mc.Gee dan Yeung (1977:82), pedagang menetap (*static*) adalah suatu bentuk layanan yang mempunyai cara atau sifat menetap pada lokasi tertentu. Dari observasi yang telah dilakukan, PKL jenis ini cenderung tidak melakukan pembongkaran terhadap sarana usaha yang digunakan atau meninggalkan sarana usaha tetap di lokasi. PKL jenis inilah yang merupakan PKL responden dalam studi ini.

Pedagang semi menetap (*semi static*) adalah suatu bentuk layanan pedagang yang memiliki sifat menetap sementara, yaitu hanya pada saat tertentu saja. PKL jenis ini akan menetap bila ada kemungkinan datangnya pembeli yang cukup besar. Misalnya pada saat jam aktivitas pendidikan, perkantoran atau aktivitas sosial lainnya. Apabila tidak ada kemungkinan datangnya pembeli yang cukup besar, maka PKL ini akan berkeliling atau berpindah.

Pedagang keliling (*mobile*) merupakan suatu bentuk layanan pedagang yang berusaha mendatangi atau mengejar konsumen. Biasanya PKL jenis ini mempunyai volume dagangan yang relatif kecil, karena sifatnya yang *mobile* tersebut.

3.2.4. Kebijakan Pemerintah Kota Salatiga Terhadap Aktivitas PKL

Salah satu hal yang mendorong perkembangan aktivitas PKL terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota sebagai lokasi aktivitas adalah keberadaan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada tidaknya faktor tersebut turut menjadi pemicu pertumbuhan PKL di sembarang tempat. Namun demikian adanya peraturan yang mengatur lokasi aktivitas PKL pun tidak akan berarti apabila tidak dibarengi oleh sanksi yang tegas terhadap pelanggar aturan. Seringkali para petugas dari pihak pemerintah kota akhirnya kehilangan wibawa dihadapan para PKL, karena tidak adanya perangkat penunjang peraturan, yaitu seperti sanksi misalnya.

Pada Tabel III.6. berikut akan diuraikan beberapa peraturan, baik berupa keputusan walikota maupun peraturan daerah yang berkaitan dengan keberadaan aktivitas PKL di Kota Salatiga.

TABEL III.6.
PERATURAN-PERATURAN YANG TERKAIT DENGAN KEBERADAAN
AKTIVITAS PKL DI KOTA SALATIGA

No	Peraturan	Isi
I 1	Keputusan Walikota No. 660/128/1991 Tentang Peningkatan Program Kota Salatiga Hatti Beriman. Bentuk : Instruksi Walikota	Pada program ketertiban disebutkan bahwa : a. Setiap pengusaha toko/kios dilarang menempatkan dagangan sehingga melampaui batas tempat dasarnya, agar tidak mengganggu pejalan kaki. b. Setiap pedagang dilarang menempati tanah yang dikuasai oleh negara/pemerintah, trotoar, taman, jalan, dan lain-lain tempat yang tidak disediakan untuk menjajakan dagangannya, baik dengan mendirikan bangunan/tenda/emplek-emplek maupun gerobak dorong atau tempat alat-alat pelindung dagangan. c. Satuan Tugas Penertiban Terpadu melakukan operasi penyuluhan, pembinaan, dan penegakan hukum secara berkala atas : ▪ Ketertiban lalu lintas. ▪ PKL, emplek-emplek liar, bangunan tidak berijin, dan penghuni liar. ▪ Toko-toko yang menggunakan trotoar untuk menempatkan barang dagangannya.
2	No. 300-05/ 248/ 1997 Tentang Pembentukan Tim Penertiban PKL Bentuk : Surat Keputusan Walikota	Menertibkan PKL dalam rangka mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan Kota Salatiga.
3	No. 511.3/435/1997 Tentang Penataan PKL Di Jalan Jenderal Sudirman Bentuk: Surat Keputusan Walikota	a. Pedagang penataan baik buah maupun klitikan di depan TokoSetuju dipindahkan ke kompleks Tamansari. b. Dilarang berjualan di tepi ataupun di trotoar, baik jalur timur maupun jalur barat di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman (mulai dari depan Bank BNI 1946/ bundaran sampai dengan depan Gedung Bioskop Reksa/pertigaan Jalan Letjen. Sukowati dan Jalan Jenderal Sudirman). c. Dilarang berjualan di tepi ataupun di trotoar, baik jalur timur maupun jalur barat di sepanjang Jalan Letjend. Sukowati (mulai dari pertigaan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Letjend. Sukowati sampai dengan kantor Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga). d. PKL khusus sore hari diarahkan di Jalan Taman Pahlawan dan Jalan Langensuko. e. Hal-hal yang bersifat teknis pengaturannya diserahkan kepada kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
4	No. 300-05/212/ 1999 Tentang Pembentukan Tim Penyuluh PKL Di Lingkungan Pasaraya I Salatiga Bentuk : Surat Keputusan Walikota	a. Membentuk tim penyuluh PKL di lingkungan Pasaraya I Salatiga. b. Tim tersebut bertugas melakukan penyuluhan, penertiban, dan penataan kepada PKL di lingkungan pasaraya I Salatiga, sehingga tercipta lingkungan pasar yang tertib dan teratur, serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.

Lanjutan Tabel III.6.

No	Peraturan	Isi
5	No. 511.3/0184/ 1998 Tentang Ketentuan Berjualan Bagi PKL Di Wilayah Kodya Dati II Salatiga Bentuk : Pengumuman Walikota	a. Mulai tanggal 5 Pebruari 1998, PKL dilarang berjualan di sepanjang: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jl. Jenderal Sudirman. ▪ Jl. Taman Pahlawan. ▪ Jl. Letjend. Sukowati. b. PKL (PKL) diperbolehkan menjajakan dagangannya setelah pukul 16.00 WIB, dengan mentaati segala kegiatan yang berlaku.
II 1	Peraturan Daerah No. 12/1981 Tentang Kebersihan, Keindahan, Kesehatan, dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.	a. Dilarang menaruh dan atau menjemur kulit hewan besar, cucian, dan benda barang lain di jalan umum lainnya yang dapat mengganggu kebersihan, kesehatan, dan ketertiban umum, kecuali telah mendapat ijin Walikotamadya Kepala Daerah. b. Dilarang meletakkan/memaparkan/ membongkar/menimbun peti, keranjang barang dagangan atau benda-benda/barang barang di jalan umum, taman-taman atau tempat-tempat lain, kecuali mendapat ijin Walikotamadya Kepala Daerah. c. Dilarang menyelenggarakan dapur-dapur atau memasak, berjualan tetap di jalan umum, taman-taman atau tempat-tempat lain yang dapat mengganggu kebersihan.
2	No. 10/1998 Tentang Retribusi Pasar.	Disebutkan adanya tarif retribusi: a. Tarif retribusi digolongkan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelas I kios Rp 150/m³/hari. ▪ Kelas II kios Rp 125/m³/hari. ▪ Kelas III kios Rp 100/m³/hari. ▪ Kelas I los Rp 125/m³/hari. ▪ Kelas II los Rp 100/m³/hari. ▪ Kelas III los Rp 75/m³/hari. b. Retribusi pasar adalah pungutan daerah atas jasa untuk penggunaan fasilitas pasar. c. Retribusi pasar dipungut atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman/peralatan. Los, dan atau kios.
3	No. 5/2000 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	a. Setiap pedagang/bakul dan atau usaha jasa yang menggunakan tempat berjualan di lingkungan terminal/sub terminal dikenakan tarif sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terminal Kios besar Rp 200/hari Dipelataran toko Rp 100/hari. ▪ Sub Terminal Kios besar Rp 200/hari. Dipelataran Rp 100/hari. b. Adanya larangan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuang sampah di jalan-jalan umum, di tempat-tempat umum, selokan-selokan, dan halaman atau pekarangan orang lain. ▪ Membuang/memasukkan ke dalam bak sampah barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau gangguan terhadap perorangan maupun lingkungan.

Lanjutan Tabel III.6.

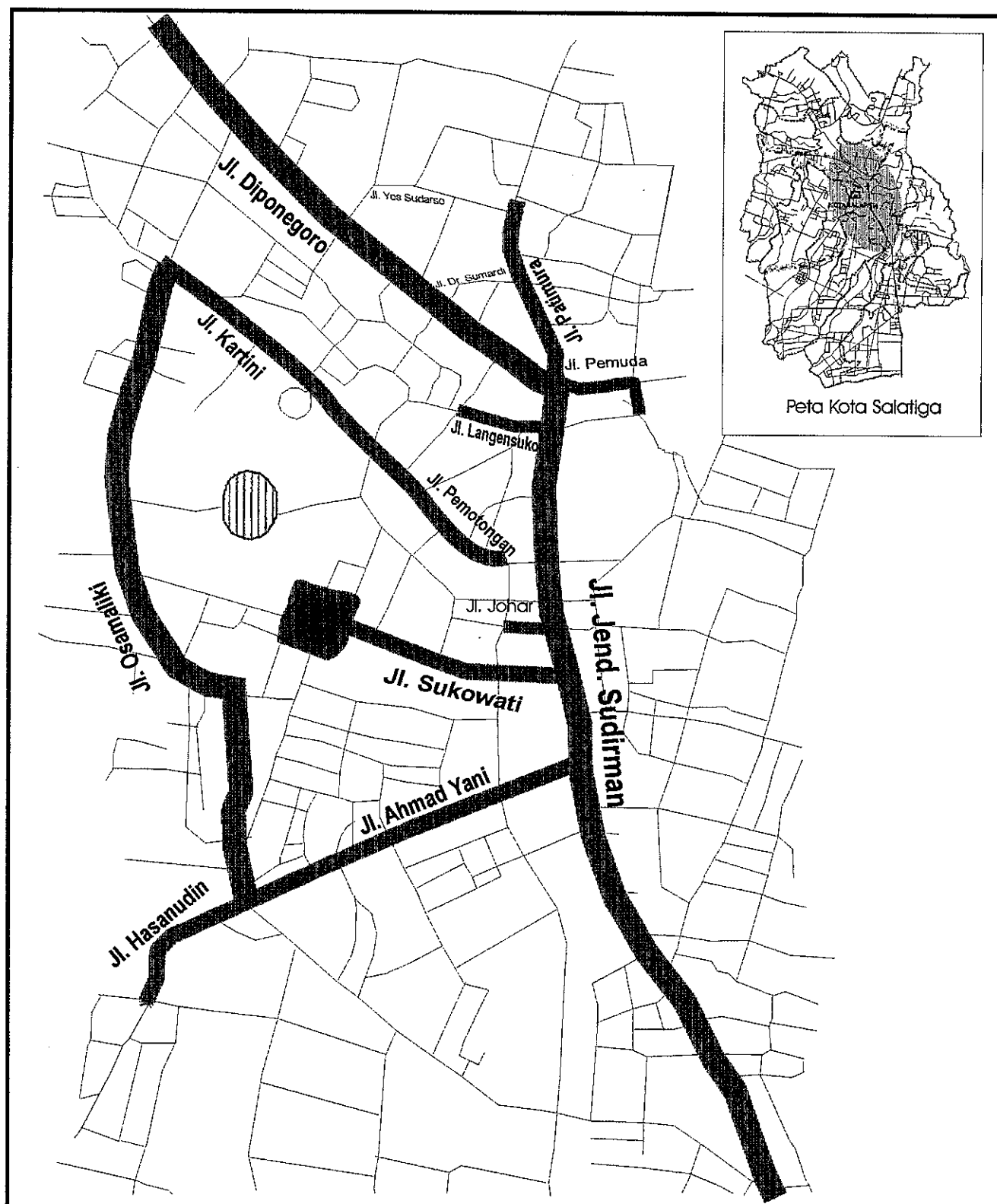
No	Peraturan	Isi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuang sampah/barang seperti tersebut di atas di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, sungai, selokan-selokan, dan halaman bangunan atau pekarangan orang lain. ▪ Membakar, menanam atau membiarkan sampah yang dapat menimbulkan gangguan umum atau pencemaran lingkungan.

Sumber : Bappeda, Dinas Pengelolaan Pasar dan PKL, dan Bagian Hukum Sekretariat Kota Salatiga, 2002.

3.3. Karakteristik Lokasi Studi

Dalam studi ini, lokasi penelitian tersebar di beberapa lokasi, yaitu Jl. Diponegoro, Jl. Patimura, Jl. Jenderal Sudirman dan sekitarnya, Lapangan Pancasila, Jl. Ahmad Yani, Jl. Hasanudin, Jl. Osamaliki, dan Jl. Kartini-Jl. Pemotongan, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.6. Lokasi-lokasi tersebut merupakan kawasan pusat Kota Salatiga dan sekitarnya, yaitu merupakan kawasan-kawasan fungsional kota.

Berikut akan diuraikan karakteristik tiap lokasi, meliputi jenis-jenis kegiatan formal apa saja yang berkembang, sehingga dapat diketahui fungsi ruang di lokasi dimaksud. Gambaran ini diperlukan untuk mengetahui keterkaitan aktivitas formal dengan aktivitas PKL yang akan dibahas lebih lanjut di Bab IV. Sedangkan Gambar 3.7. dan Gambar 3.8. menunjukkan kondisi eksisting lokasi studi.



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

TESIS

**STUDI AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA
DALAM PEMANFAATAN RUANG
DI KOTA SALATIGA**

PETA

LOKASI PENGAMATAN

A. Jalan Diponegoro

Jalan Diponegoro merupakan jalur utama menuju pusat Kota Salatiga (Jl. Jenderal Sudirman) dari arah Semarang. Aktivitas formal utama yang berkembang di kawasan ini adalah aktivitas pendidikan dan perkantoran, serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang berkembang karena kedua aktivitas tersebut, seperti rumah-rumah makan, rumah-rumah kos, warung internet, warung fotokopi, dan lain sebagainya.

Perkembangan aktivitas pendidikan di Jl. Diponegoro ditunjukkan dengan keberadaan fasilitas pendidikan yang cukup lengkap, mulai dari tingkat terendah (*playgroup*/taman kanak-kanak) hingga pendidikan tinggi. Fasilitas pendidikan tersebut antara lain adalah Universitas Kristen Satya Wacana (menyelenggarakan pendidikan TK, SD, SLTP, SMU, dan pendidikan tinggi), STIE AMA, Yayasan Pendidikan Al-Azhar (menyelenggarakan pendidikan *playgroup*, TK, dan SD), SMP Stella Matutina, dan SDN Salatiga 1-3. Kemudian fasilitas perkantoran yang ada diantaranya adalah Kantor Perhutani, Kantor Satuan Lalu Lintas, Denpom, KUA, Makodim, Makorem, Telkom, PLN, dan Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Salatiga. Sedangkan fasilitas sosial ekonomi masyarakat yang berkembang di kawasan ini adalah perbankan (BRI, Bank Panin, dan Bank Mandiri), sarana peribadatan (Gereja Katolik Santo Paulus Miki dan Gereja Kristen Jawa), Lembaga Pemasyarakatan, Perpustakaan Daerah, dan fasilitas sosial ekonomi lainnya.

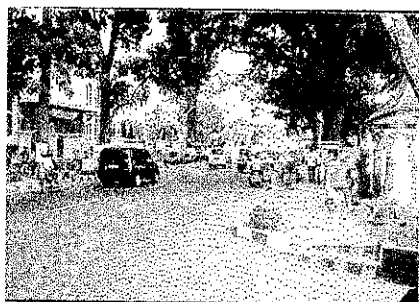
Sebagai jalan utama menuju pusat kota, maka jalan ini dilalui oleh sarana transportasi umum (angkutan kota), yaitu No.1 (jurusan Tamansari-Candi) dan No.2 (jurusan Tamansari-Modangan).

Disepanjang jalan terdapat trotoar dengan lebar sekitar 1-1,5 meter dan jalur hijau selebar 1 meter. Khusus trotoar sebelah utara, mulai bundaran Tamansari sampai perempatan Jl. Diponegoro-Jl. Yos Sudarso, lebar trotoar sekitar 2,5-2,75 meter.

B. Jalan Patimura

Jalan Patimura merupakan jalur yang menghubungkan Kota Salatiga dengan Bringin (Kabupaten Semarang). Di sepanjang jalan mulai dari Bundaran Tamansari (Kaloka) hingga pertigaan Jl. Patimura-Jl. Yos Sudarso berkembang aktivitas perdagangan, yang ditunjukkan dengan adanya pasar Sayangan dan deretan pertokoan. Selebihnya adalah daerah permukiman penduduk dan aktivitas sosial lainnya. Pasar Sayangan merupakan pasar yang pelayanannya lebih berskala lingkungan, dengan areal yang kecil.

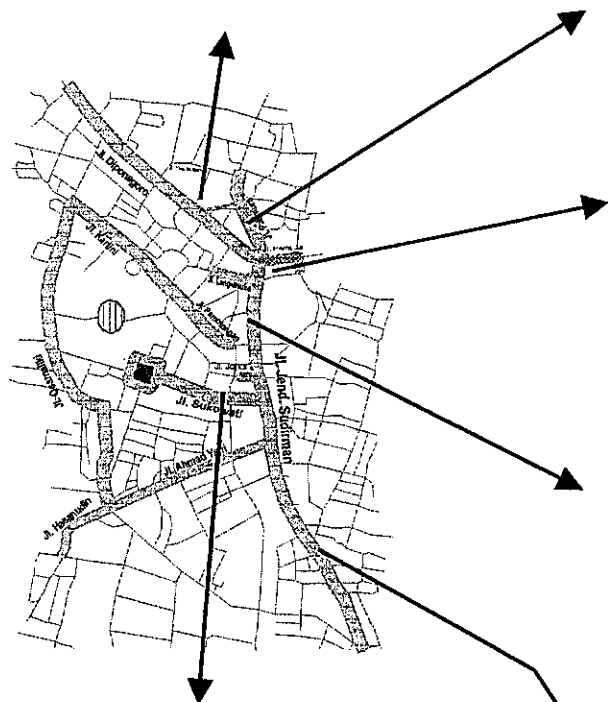
Sebagai jalur yang menghubungkan Kota Salatiga dengan daerah sekitar (Bringin), maka di jalan ini, terutama di sekitar pertigaan Jl. Patimura-Jl. Yos Sudarso, dapat kita temui pangkalan angkutan informal jurusan Salatiga-Bringin. Hampir semua angkutan kota yang menuju ke arah Tamansari, melalui Jl. Patimura ini, yaitu mulai dari pertigaan Jl. Patimura-Jl. Dr. Sumardi hingga Tamansari. Angkutan tersebut antara lain adalah No.1,2, 3 (Tamansari-Macanan/Kab.Semarang), No.5 (Tamansari-Isep-isep-Cengek), No.7 (Tamansari-Kumpulrejo), No.8 (Tamansari-Ngawen), No.9 (Tamansari-Grogol), No.10 (Tamansari-RSU-ABC), No.11 (Tamansari-Karangalit), dan No. 17 (Tamansari-Kecandran-Gamol). Selain itu jalan ini juga dilengkapi dengan trotoar dengan lebar sekitar 1,5 meter tanpa jalur hijau.



Jl. Diponegoro di depan Gereja Katolik



Fasilitas perdagangan/pertokoan di
Jl. Patimura



Mal Tamansari



Fasilitas perdagangan di Jl. Jenderal Sudirman




Fasilitas perdagangan di Jl. Sukowati



Fasilitas kesehatan (RSU Puri Asih)
di Jl. Jend. Sudirman

Keterangan :

 Lokasi pengamatan

GAMBAR 3.7.
LOKASI AKTIVITAS PKL DI JL. DIPONEGORO, JL. PATIMURA,
DAN JL. JENDERAL SUDIRMAN

Sumber : Survei Primer, 2002.

C. Jalan Jenderal Sudirman dan sekitarnya

Jalan Jenderal Sudirman dan sekitarnya (Jl. Pemuda, Jl. Langensuko, Jl. Johar, dan Jl. Sukowati) merupakan pusat atau sentra Kota Salatiga. Kawasan ini merupakan pusat kegiatan ekonomi/perdagangan Kota Salatiga. Di kawasan ini berkembang aktivitas perdagangan, terutama mulai dari bundaran Tamansari sampai pertigaan Jl. Jenderal Sudirman-Jl. Senjoyo. Di kawasan ini ini terdapat Mal Tamansari (Toserba Ramayana), Pasaraya I dan II, serta deretan pertokoan. Oleh karena itu kawasan ini dapat disebut sebagai *Central Business District* (CBD) Kota Salatiga. Saat survai dilakukan, sebagian jalan ini digunakan sebagai lokasi sementara Pasaraya I yang terbakar, yang memakan sebagian sisi jalan, yaitu sisi timur. Sedangkan mulai dari pertigaan Jl. Jenderal Sudirman – Jl. Senjoyo sampai ABC cenderung merupakan aktivitas campuran, yang ditunjukkan dengan adanya fasilitas kegiatan sosial ekonomi masyarakat, seperti perkantoran, fasilitas kesehatan (RSU Puri Asih), pertokoan (toko/warung), bengkel, dan permukiman penduduk.

Sarana transportasi umum tidak diperkenankan memasuki jalan ini terutama mulai dari Tamansari sampai pertigaan Jl. Jenderal Sudirman-Jl. Ahmad Yani, kecuali becak dan dokar, namun itupun diberlakukan jam khusus. Adanya larangan ini mengakibatkan munculnya pangkalan angkutan informal di jalan sekitarnya, terutama di Jl. Johar, Jl. Pemotongan dan Jl. Taman Pahlawan. Di Jl. Johar dapat kita jumpai pangkalan angkutan informal dengan jurusan Salatiga-Kopeng. Walaupun demikian ada pula jenis angkutan ini yang berani parkir di Jl. Jenderal Sudirman. Pelanggaran ini cukup sulit dihentikan karena sifatnya yang informal, terutama dengan plat nomor kendaraan yang berwarna hitam, sehingga mereka berdalih sebagai kendaraan pribadi yang sedang menunggu. Sarana transportasi umum kota (angkota) hanya dapat melewati jalan ini antara ABC-pertigaan Jl. Ahmad Yani, dengan tujuan Tamansari, yaitu angkota No. 5. Jalan ini juga dilengkapi

dengan trotoar, dengan ukuran lebar 1-1,5 meter. Mulai dari Tamansari sampai pertigaan Jl. Senjoyo tanpa ada jalur hijau, namun selebihnya di kiri kanan jalan ada jalur hijau.

D. Lapangan Pancasila

Keberadaan lapangan Pancasila erat kaitannya dengan ciri kota yang umumnya kita jumpai di pulau Jawa. Lapangan ini bisa juga disebut sebagai alun-alun. Di sekitar kawasan ini berkembang aktivitas sosial ekonomi masyarakat kota, yaitu aktivitas perkantoran (Kantor Pemerintah Kota Salatiga, Kantor Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Salatiga, dan Kantor Polisi Resort), aktivitas pendidikan (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri/STAIN Walisongo dan SMK Kristen), dan aktivitas sosial lainnya, yang ditunjukkan dengan keberadaan fasilitas peribadatan (Mesjid Darul Amal, dan beberapa buah gereja), serta permukiman penduduk.

Lapangan Pancasila selain memiliki fungsi estetik sebagai lambang sebuah kota Jawa, juga berfungsi sebagai lokasi rekreasi bagi masyarakat. Dengan suasana yang hijau dengan pepohonan di sekelilingnya, menjadikan lokasi ini sebagai tempat melakukan kegiatan sosial, seperti berolahraga, mengasuh anak, atau menjadi tempat lokasi pasar malam dan kegiatan panggung hiburan.

Sarana transportasi umum yang melalui kawasan ini adalah angkota No.7,8,9, dan 11, dari arah Tamansari, namun hanya sisi Timur. Trotoar dan lahan parkir yang cukup luas dapat kita lihat terutama di depan Kantor UPPD dan Kantor Polres Salatiga. Ukuran trotoar umumnya selebar 1,5 meter.

E. Jalan Ahmad Yani

Di kawasan ini terdapat Pertokoan Pandawa, yang dibangun di tanah milik Korem 411 Makutarama. Pertokoan ini mulai beroperasi di pertengahan tahun 1999, dengan konsep

awal sebagai "*Malioboro Salatiga*", yang dicirikan dengan trotoar yang dibuat cukup lebar mencontoh konsep Malioboro Yogyakarta. Awalnya trotoar yang dibangun dengan lebar sekitar 3 meter ini diperuntukkan bagi PKL dengan waktu aktivitas setelah toko tutup. Namun dalam perkembangannya konsep ini belum bisa berjalan dengan baik, karena hanya segelintir PKL yang memanfaatkan trotoar di pertokoan ini. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan waktu yang diberlakukan, sementara PKL pada umumnya cenderung beraktivitas dari pagi hingga malam hari. PKL yang memanfaatkan lokasi ini pada umumnya PKL makanan jenis lesehan yang mulai buka sore hari, disaat toko tutup.

Selain aktivitas perdagangan aktivitas lainnya yang berkembang dikawasan ini adalah aktivitas militer (Markas Korem 411 Makutarama) dan aktivitas sosial masyarakat, seperti pendidikan (SMEA PGRI) dan permukiman penduduk. Sedangkan sarana transportasi umum kota yang melalui jalur ini adalah angkota yang menuju Tamansari dengan no. 8 dan 11.

F. Jalan Hasanudin

Di kawasan ini terdapat Pasar Rejosari, yang didalamnya juga terdapat terminal bagi kendaraan umum jalur Salatiga-Kopeng/Magelang dan Salatiga-Ambarawa. Namun semenjak tahun 2000 terminal tersebut ditutup, yang mengakibatkan munculnya ketidakteraturan karena pada akhirnya kendaraan umum jalur tersebut mempergunakan areal di luar pasar, yaitu sepanjang jalan di sekitar Pasar Rejosari sebagai terminalnya. Seperti halnya Pasar Sayangan, pelayanan pasar Rejosari juga berskala lingkungan. Namun memiliki letak yang sangat strategis, karena tepat berada di perempatan Jl.Hasanudin-Jl.Osamaliki-Jl.Ahmad Yani dan Jl. Veteran, sehingga untuk menuju lokasi ini cukup mudah. Sebagai informasi Jl. Osamaliki-Jl. Veteran merupakan jalur regional Semarang-Surakarta.

Selain aktivitas perdagangan berskala lingkungan, di kawasan Jl. Hasanudin ini juga berkembang aktivitas permukiman. Sarana transportasi yang khusus melalui jalur ini adalah angkota no.8 dan 11 selain bis-bis mini jurusan Kopeng/Magelang. Sepanjang jalan Hasanudin juga telah dilengkapi dengan trotoar dengan ukuran 1,5 meter.

G. Jalan Osamaliki

Jalan Osamaliki merupakan jalur transportasi utama yang dilalui oleh pengguna jalur Semarang-Surakarta. Oleh karena itu jalur ini cukup padat. Aktivitas yang ada di kawasan ini adalah aktivitas sosial masyarakat, yaitu permukiman, pendidikan (SD Mangunsari dan SMU Kristen 1), bengkel, SPBU, dan adanya fasilitas kesehatan (Rumah Bersalin Permata). Aktivitas perdagangan dapat kita jumpai, yaitu Pasar Jetis, yang terletak di perempatan Jl. Osamaliki - Jl.Imam Bonjol - Jl.Wahid Hasyim, dan Jl. Kartini, serta Pasar Rejosari, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

Selain bis-bis umum antar kota dan atau antar propinsi, sarana transportasi umum kota yang melalui jalan ini adalah angkota no.10. Fasilitas lainnya adalah keberadaan trotoar di sepanjang jalan.

H. Jalan Kartini-Jalan Pematangan

Di lokasi mirip dengan Jl. Diponegoro, yaitu cenderung sebagai lokasi aktivitas pendidikan, yang ditunjukkan dengan keberadaan fasilitas pendidikan (Jl. Kartini), yaitu STIBA Satya Wacana, SMU 3, SMP 1 dan 2, dan SDN Salatiga. Di penggal Jalan Pematangan yang berdekatan dengan kawasan Jenderal Sudirman, merupakan kawasan yang memiliki fungsi campuran, yaitu sebagai lokasi perdagangan dan perkantoran (Kantor Dinas Pasar dan PKL), serta permukiman. Sarana transportasi yang melewati jalan ini adalah

Angkutan Kota No. 10 (Tamansari-ABC) dan No. 7 (Tamansari-Kumpulrejo) untuk Jl. Kartini, sedangkan Jl. Pemotongan dilalui oleh Angkutan Kota No.5,8,11

Dari uraian di atas, nampak bahwa tidak ada lokasi yang memiliki fungsi khusus. Sebagaimana halnya kota-kota di Indonesia umumnya ruang-ruang kota di Kota Salatiga cenderung berkembang secara alami. Artinya ruang tersebut tidak pernah direncanakan sebelumnya, namun dalam perkembangannya rencana yang kemudian dibuat mengikuti pola yang sudah ada. Oleh karena itu lokasi-lokasi studi yang telah digambarkan secara deskriptif di atas, masing-masing tidak ada yang memiliki satu fungsi khusus, namun cenderung memiliki fungsi campuran. Sebagai contoh Jl. Diponegoro, di jalan tersebut berkembang fungsi pendidikan, dan dalam perkembangan selanjutnya fungsi-fungsi lain seperti permukiman dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat lainnya juga turut berkembang.

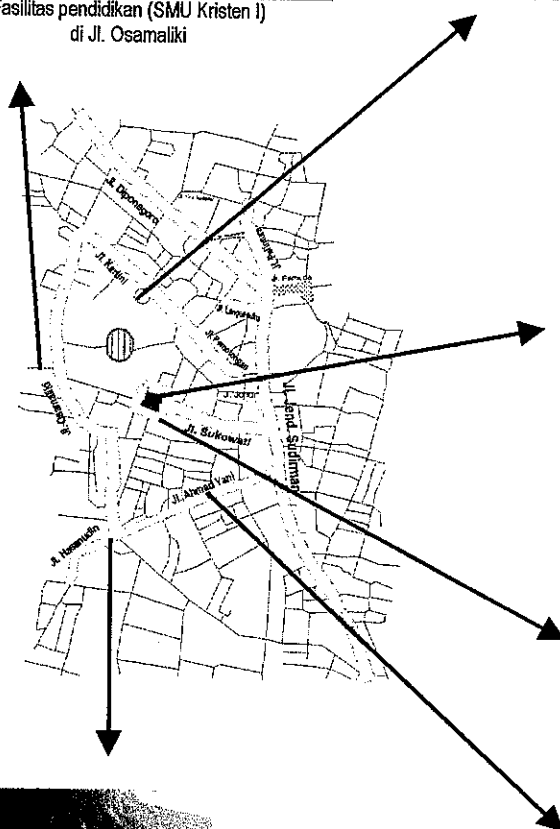
Namun demikian dapat disimpulkan bahwa karena merupakan kawasan pusat kota, maka lokasi studi yang merupakan ruang aktivitas PKL di Kota Salatiga ini merupakan ruang fungsional kota, yaitu suatu ruang yang memiliki fungsi utama pendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat kota, seperti aktivitas perdagangan, pendidikan, perkantoran, permukiman, dan aktivitas lainnya.



Fasilitas pendidikan (SMU Kristen I)
di Jl. Osamali



Fasilitas pendidikan (SMU 3) di Jl. Kartini



Lap. Pancasila di sore hari menjadi tempat bermain
dan berolahraga masyarakat kota



Kantor Walikota Salatiga di Jl. Sukowati-
Lap. Pancasila




Pasar Rejosari di perempatan Jl. Hasanudin-
Jl. Osamali-Jl. Ahmad Yani-Jl. Veteran



Pertokoan Pandawa di Jl. Ahmad Yani

Keterangan :

 Lokasi pengamatan

GAMBAR 3.8.
LOKASI AKTIVITAS PKL DI LAPANGAN PANCASILA, JL.A. YANI,
JL. HASANUDIN, JL. OSAMALI, DAN
JL. KARTINI-JL. PEMOTONGAN

Sumber : Survei Primer, 2002.

BAB IV

ANALISIS AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PEMANFAATAN RUANG DI KOTA SALATIGA

Dalam bab ini akan diuraikan analisis mengenai aktivitas PKL di Kota Salatiga terutama yang berkaitan dengan perilakunya dalam berjualan dan pemanfaatan ruang kota sebagai lokasi usaha. Selain itu juga dilakukan analisis mengenai persepsi masyarakat terhadap keberadaan aktivitas PKL tersebut, serta analisis hubungan antara kondisi PKL dengan persepsi masyarakat terhadap keberadaan aktivitas tersebut.

4.1. Aktivitas PKL Di Kota Salatiga

Dalam bagian ini akan dibahas perilaku PKL dalam berjualan dan dalam memanfaatkan ruang-ruang kota yang ada sebagai lokasi usaha, yang didasarkan pada karakteristik usaha dan karakteristik lokasi, serta persepsi mereka terhadap kedekatan dan kemudahan pencapaian lokasi usaha. Dibahas pula hubungan antara karakteristik usaha dengan karakteristik lokasi.

4.1.1. Analisis Perilaku Aktivitas Usaha PKL

Analisis perilaku PKL dalam aktivitas usaha ini merupakan pembahasan mengenai karakteristik aktivitas PKL dalam berjualan, meliputi jenis dagangan, bentuk sarana dagangan yang digunakan, pola pelayanan (lama aktivitas), dan pola penyebaran/ pengelompokkan pedagang.

4.1.1.1. Jenis Dagangan PKL

Berdasarkan jenis dagangan yang dijualnya, PKL responden dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. Makanan, yang terdiri dari makanan yang tidak atau belum diproses, termasuk di dalamnya adalah makanan mentah seperti daging, buah-buahan, dan sayuran, dan makanan siap saji, seperti nasi dan lauk pauknya, serta minuman.
- b. Barang bukan makanan (non makanan), seperti barang kelontong, koran/majalah/poster, kacamata dan benda asesoris lainnya, sandang, bensin, dan lain-lain.
- c. Jasa, terdiri dari jasa tambal ban, reparasi kunci, jam tangan, dan jasa lainnya.

Berdasarkan katagori tersebut, maka jenis dagangan PKL responden seperti tercantum pada Tabel IV.1. berikut.

**TABEL IV.1.
JENIS DAGANGAN PKL**

No	Jenis Dagangan	Jumlah	%
1	Makanan	72	64.3
2	Non makanan	24	21.4
3	Jasa	16	14.3
Jumlah		112	100.0

Sumber : Hasil Survei Primer, 2002.

Pada Tabel IV.1. di atas nampak bahwa sebanyak 64,3% PKL responden menjual jenis dagangan berupa makanan. Sedangkan PKL yang menjual jenis dagangan non makanan sebanyak 21,4% dan PKL yang menjual jasa sebanyak 14,3%. Hal ini menunjukkan bahwa makanan mendominasi jenis dagangan PKL.

Mc.Gee dan Yeung (1977 : 82-83) menyatakan bahwa jenis dagangan PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitarnya. Kota Salatiga yang terkenal memiliki udara yang sejuk dan fungsi kota yang berkembang, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, merupakan faktor pencetus munculnya usaha di bidang makanan. Ada 3 (tiga)

fungsi Kota Salatiga, yaitu sebagai kota transit pariwisata, kota pendidikan dan olah raga, dan sebagai kota pusat kegiatan perdagangan.

Sebagai kota transit pariwisata, Kota Salatiga banyak dikunjungi masyarakat, baik yang bermaksud singgah ataupun bermalam. Dengan ketersediaan sarana akomodasi yang cukup baik dan daya tarik berupa oleh-oleh khas Salatiga, menjadikan fungsi kota sebagai transit pariwisata lebih berkembang. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku sektor informal PKL. Sebagai contoh, disekitar Hotel Beringin, yang merupakan hotel dengan lokasi paling strategis karena berada di jantung kota (Jl. Jenderal Sudirman), para PKL penjual makanan khas Kota Salatiga berjajar menjajakan dagangannya, seperti wedang ronde dan produk hasil pertanian (pisang, alpukat, durian, jagung rebus, dan lain-lain).

Sebagai kota pendidikan dan olah raga, Kota Salatiga memiliki 4 (empat) buah perguruan tinggi, yaitu Universitas Kristen Satya Wacana, STAIN Walisongo, STIE AMA, dan STIBA Satya Wacana, dengan skala pelayanan yang tidak hanya mencakup lokal, namun juga nasional, bahkan internasional. Dengan banyaknya mahasiswa yang berasal dari luar kota, mendorong berkembangnya usaha-usaha untuk pemenuhan kebutuhan mahasiswa. Salah satu yang menonjol di sektor informal adalah penyediaan kebutuhan primer (makan dan minum). Dapat kita lihat tenda-tenda PKL berjajar di sekitar kawasan pendidikan dan kawasan permukiman mahasiswa (Jl. Diponegoro dan sekitarnya).

Sebagai kota pusat kegiatan perdagangan, Kota Salatiga menjadi pusat kunjungan bagi pelaku kegiatan perdagangan (pedagang dan pembeli). Seperti kegiatan pendidikan, kegiatan ini juga mendorong berkembangnya usaha penyediaan kebutuhan primer (makan dan minum).

Dari uraian di atas, membuktikan pernyataan yang dikemukakan oleh Mc. Gee (1978, dalam Suroto, 1995 : 14) bahwa, *"It is a fact, however, that an important portion of*

urban food supply is provided by locally-produced goods in which the distribution networks from producer to seller are dominated by people who are part of informal sector”.

4.1.1.2. Bentuk Sarana Perdagangan PKL

Berdasarkan bentuk sarana perdagangan yang digunakan ini, PKL di Kota Salatiga dapat dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kelompok, yaitu sebagaimana yang tercantum pada Tabel IV.2. berikut.

TABEL IV.2.
BENTUK SARANA PERDAGANGAN PKL

No	Bentuk Sarana Perdagangan PKL	Jumlah	%
1	Warung tenda	36	32.1
2	Gerobak/kereta dorong	33	29.5
3	Pikulan/keranjang	9	8.0
4	Gelaran/dasaran	30	26.8
5	Lainnya	4	3.6
Jumlah		112	100.0

Sumber : Hasil penelitian dan analisis penulits, 2002.

Pada Tabel IV.2. di atas nampak bahwa bentuk sarana perdagangan berupa warung tenda merupakan bentuk yang paling banyak digunakan oleh PKL responden, yaitu 32,1%. Bentuk sarana ini berupa warung semi permanen yang terdiri dari gerobak/kereta dorong sebagai tempat PKL menyimpan/memasak makanan atau barang dagangan lainnya, dilengkapi dengan deretan meja dan kursi. Bagian atap dan sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung yang terbuat dari kain plastik, terpal atau bahan lainnya yang tidak tembus air. PKL responden yang menggunakan bentuk sarana perdagangan ini pada umumnya adalah PKL yang menjual makanan siap saji.

Bentuk sarana perdagangan berupa gerobak/kereta dorong digunakan oleh 29,5% PKL responden. Umumnya ada 2 (dua) macam, yaitu gerobak/kereta dorong yang dilengkapi dengan atap, yang gunanya untuk melindungi PKL dan perlengkapannya dari pengaruh cuaca, misalnya pada PKL yang menjual jenis makanan ayam goreng ala *Kentucky*, martabak, dan

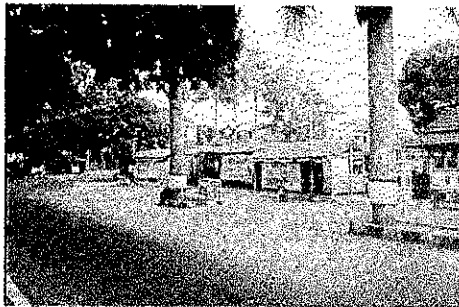
lain-lain. Jenis yang kedua adalah gerobak/kereta dorong tanpa atap, biasanya dilengkapi dengan kursi sebagai tempat duduk bagi PKL. Sebagai contoh adalah PKL yang menjual jenis dagangan non makanan, seperti kacamata, jasa reparasi kunci, jam tangan, dan lain-lain.

Bentuk sarana perdagangan berupa gelaran/dasaran digunakan oleh 26,8% PKL responden. Bentuk sarana ini berupa alas dari tikar/plastik yang digunakan untuk menggelar dagangan atau berupa meja dasaran. Kemudian ada pula yang dilengkapi dengan atap sebagai pelindung bagi PKL dan barang dagangannya dari pengaruh cuaca. PKL yang menggunakan bentuk sarana dagangan ini diantaranya adalah PKL yang menjual makanan yang tidak/belum diproses (sayuran), non makanan (koran/majalah/poster, benda asesoris, kaset/VCD, dan barang kelontong lainnya), serta jasa seperti tambal ban.

Pikulan/keranjang merupakan bentuk sarana perdagangan yang digunakan oleh 8% PKL. Umumnya pikulan/keranjang sebagai tempat menyimpan barang jualan dan ada beberapa PKL yang melengkapi dengan atap plastik dan kursi atau alas tikar. Dapat ditemui pada PKL yang menjual jenis dagangan makanan seperti wedang ronde, jagung rebus, dan buah-buahan.

Bentuk sarana perdagangan lainnya adalah berupa kios dan mobil (3,6%). Kios umumnya berbentuk sebuah bilik semi permanen yang tersusun dari papan atau penutup lainnya. Pedagang bersangkutan juga tinggal ditempat tersebut. Jenis dagangan yang dijual umumnya berupa makanan. Sedangkan mobil, umumnya berupa mobil *pick-up* yang dilengkapi dengan tenda sebagai pelindung pedagang. Umumnya digunakan oleh PKL yang menjual jenis dagangan berupa buah-buahan.

Bentuk-bentuk sarana perdagangan seperti yang diuraikan di atas ini sebagaimana terlihat pada Gambar 4.1.



Deretan PKL penjual makanan siap saji dengan sarana usaha warung tenda di depan Kantor Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Salatiga.



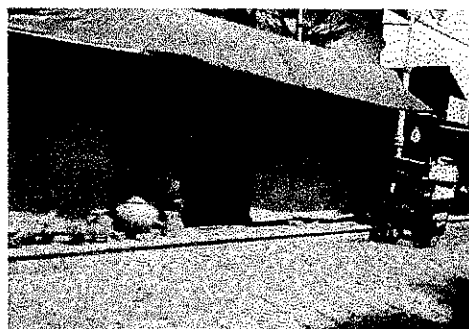
PKL penjual makanan dengan bentuk sarana usaha gerobak/kereta dorong di depan Pasar Rejosari.



PKL penjual wedang ronde dengan bentuk sarana usaha pikulan di Jl. Jenderal Sudirman.



PKL penjual makanan belum diproses (sayuran) dengan bentuk sarana usaha dasaran di Jl. Patimura



PKL dengan sarana usaha berupa warung tenda menyerupai kios yang sekelilingnya ditutupi tirai bambu sekaligus menjadi tempat tinggal pedagang.

GAMBAR 4.1. BENTUK SARANA PERDAGANGAN PKL DI KOTA SALATIGA

Sumber : Survei Primer, 2002

Sebagaimana yang disebutkan dalam Mc.Gee dan Yeung (1977 : 82-83) bahwa pada umumnya bentuk sarana perdagangan yang digunakan PKL sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindah atau dibawa dari satu tempat ke tempat lain dan dipengaruhi oleh jenis dagangan yang dijual. Hubungan antara bentuk sarana perdagangan dengan jenis dagangan yang dijual PKL dapat dibuktikan dengan analisis tabulasi silang, yang hasilnya seperti nampak pada Tabel IV.3. berikut.

TABEL IV.3.
HUBUNGAN ANTARA BENTUK SARANA PERDAGANGAN DAN JENIS
DAGANGAN PKL

Bentuk Sarana Perdagangan PKL	Jenis Dagangan PKL			Jumlah
	Makanan	Non Makanan	Jasa	
Warung tenda	35			35
Gerobak/kereta dorong	18	11	4	33
Pikulan/keranjang	9			9
Gelaran/dasaran	7	12	11	30
Lainnya	3	1	1	5
Jumlah	72	24	16	112
Asymp. Sig	0.000	Kesimpulan		Signifikan (ada hubungan antara jenis sarana perdagangan dan jenis dagangan) dan memiliki keterkaitan yang erat.
Contingency Coefficient	0.558			

Sumber : Hasil Analisis, 2002.

Keterangan : Signifikan (ada hubungan antara 2 variabel), dengan syarat nilai *Asymp.Sig* < 0,05, dan hubungan semakin erat jika nilai *Contingency Coefficient* mendekati 1.

Pada tabel diatas terlihat bahwa ada hubungan antara bentuk sarana perdagangan dan jenis dagangan PKL, yang ditunjukkan dari hasil analisis *chi-square*. Berdasarkan bentuk sarana perdagangan, terlihat bahwa sarana berupa warung tenda hanya digunakan oleh PKL dengan jenis dagangan makanan. Dalam menjalankan aktivitas usahanya, PKL makanan umumnya menggunakan peralatan yang lebih beragam, mulai dari peralatan memasak sampai perlengkapan berupa meja dan kursi bagi pembeli. Oleh karena itu sarana dagangan berupa warung tenda digunakan oleh PKL makanan. Warung tenda, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan warung semi permanen yang terdiri dari gerobak/kereta dorong yang dilengkapi meja, kursi, dan atap pelindung.

Sarana dagangan berupa pikulan/keranjang juga hanya digunakan oleh PKL yang menjual makanan. Jenis makanan yang umumnya dijual adalah makanan yang tidak memerlukan proses pemasakan di tempat berdagang, seperti jagung rebus dan PKL penjual buah-buahan dengan macam/jenis dagangan terbatas. Sedangkan bentuk sarana gerobak/kereta dorong, gelaran/dasaran, dan jenis lainnya dipergunakan oleh ketiga jenis dagangan. Hal ini dikarenakan jenis-jenis sarana dagangan dimaksud memiliki sifat fleksibel atau bisa digunakan oleh semua jenis dagangan.

Berdasarkan jenis dagangan, nampak bahwa jenis dagangan berupa makanan mempergunakan semua jenis/bentuk sarana, mulai dari warung tenda sampai gelaran. Pada jenis dagangan non makanan dan jasa cenderung menggunakan sarana berupa gelaran/dasaran. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa bentuk sarana usaha/perdagangan yang dipergunakan PKL ini berhubungan atau dipengaruhi oleh jenis dagangan yang dijualnya.

4.1.1.3. Lama Waktu Aktivitas PKL

Berdasarkan lama waktu aktivitasnya, PKL responden dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), sebagaimana tercantum pada Tabel IV.4. berikut. Adapun pengelompokkan tersebut didasarkan pada hasil survai primer yang dilakukan.

TABEL IV.4.
LAMA WAKTU AKTIVITAS PKL

No	Lama Waktu Aktivitas PKL	Jumlah	%
1	< 4 jam	9	8.0
2	4 – 8 jam	65	58.0
3	> 8 jam	38	33.9
Jumlah		112	100.0

Sumber : Hasil penelitian dan analisis penulis, 2002.

Pada tabel di atas nampak bahwa lama waktu aktivitas yang paling dominan adalah 4-8 jam (58%), 33,9% PKL beraktivitas selama > 8 jam, dan < 4 jam sebanyak 8% PKL. Pola

aktivitas ini menurut Mc.Gee dan Yeung (1977:76) menyesuaikan terhadap irama dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu aktivitas PKL ini didasarkan pula atau sesuai dengan perilaku kegiatan formal. Sebagai contoh adalah aktivitas PKL di sekitar lokasi aktivitas pendidikan/perkantoran. Aktivitas sektor informal ini nampak di saat aktivitas pendidikan/perkantoran berlangsung, yaitu sekitar pukul 08.00 – 14.00 WIB. Sebaliknya jika kita amati, PKL tidak beraktivitas diluar jam/waktu aktivitas formal tersebut, demikian pula di hari-hari libur.

Berkaitan dengan waktu aktivitas ini, sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa ada kecenderungan aktivitas PKL berada di kawasan-kawasan fungsional kota, yang kita ketahui aktivitas (formal) di kawasan tersebut berlangsung tidak sepanjang hari (24 jam), namun aktivitas umumnya berlangsung mulai pukul 08.00 sampai sekitar pukul 14.00-15.00. Oleh karena itu, 4-8 jam merupakan lama waktu aktivitas yang paling banyak dipergunakan oleh PKL responden.

4.1.1.4. Pola Penyebaran dan Pengelompokkan Aktivitas PKL

Secara umum pola penyebaran PKL di Kota Salatiga cenderung bersifat *linier (linier concentration)*, yaitu mengikuti pola jalan yang ditunjukkan dari aktivitas mereka yang banyak memanfaatkan trotoar/badan jalan/lahan parkir di sepanjang jalan utama kota. Sedangkan apabila kita lihat dari pengelompokkan jenis dagangan, secara umum akan nampak bahwa PKL cenderung berkumpul dengan sejenisnya (52,7%), dan yang bercampur dengan PKL jenis lainnya sebesar 47,3%. Untuk lebih jelas pada Tabel IV.5. berikut menunjukkan pengelompokkan PKL responden.

TABEL IV.5.
PENGELOMPOKKAN PKL

No	Pengelompokkan PKL	Jumlah	%
1	Berkelompok dengan PKL sejenis	59	52.7
2	Bercampur dengan PKL jenis lain	53	47.3
Jumlah		112	100.0

Sumber : Hasil penelitian dan analisis penulis, 2002.

Yang dimaksud sejenis adalah sejenis dalam dagangan yang dijual, misalnya makanan dengan makanan, tanpa membedakan jenis makanannya. Pengelompokkan PKL yang cenderung sejenis ini disebabkan karena faktor kondisi wilayah Kota Salatiga yang cenderung memiliki satu pusat keramaian, sehingga ada keterbatasan ketersediaan lahan.

Sebagaimana kita ketahui aktivitas PKL selalu berorientasi pada keberadaan konsumen. Mereka akan hadir di sekitar lokasi aktivitas masyarakat. Dengan terbatasnya lokasi-lokasi keramaian di Kota Salatiga, maka terbatas pula ketersediaan tempat bagi aktivitas ini (dari sudut pandang PKL). Kemudian jika kita amati perilaku konsumen yang cenderung mendatangi lokasi tempat berkumpulnya PKL. Sebagai contoh adalah pada PKL yang menjual wedang ronde. Konsumen, terutama yang berasal dari luar kota akan mendatangi lokasi di depan Atrium Salatiga, karena disana banyak berjajar para PKL yang menjual jenis dagangan tersebut.

Berdasarkan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas PKL di Kota Salatiga cenderung bersifat *linier* dan dalam menjalankan aktivitasnya PKL cenderung berkelompok dengan jenisnya.

4.1.1.5. Rangkuman Analisis Perilaku Aktivitas Usaha PKL

Berdasarkan analisis mengenai perilaku aktivitas usaha PKL dapat dirangkumkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Makanan mendominasi jenis dagangan PKL Kota Salatiga, yang didorong oleh kondisi alam dan fungsi kota yang berkembang, yaitu sebagai kota transit pariwisata, kota pendidikan dan olahraga, dan kota perdagangan.
2. Warung tenda merupakan bentuk sarana perdagangan yang paling banyak digunakan dan dominannya digunakan untuk jenis dagangan makanan, serta pada kenyataannya bentuk sarana perdagangan tersebut dipengaruhi oleh jenis dagangan.
3. Lama aktivitas usaha yang paling banyak digunakan PKL adalah 4-8 jam, sesuai dengan pola perilaku aktivitas formal disekitarnya.
4. Dalam penyebarannya, aktivitas PKL di Kota Salatiga cenderung bersifat *linier* mengikuti pola jalan dan trotoar yang dimanfaatkan sebagai tempat usaha, karena terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan oleh aktivitas PKL. Dengan karakteristiknya yang cenderung untuk selalu mendekati konsumen, maka trotoar yang merupakan tempat pergerakan menjadi tempat yang diminati dan dalam menjalankan aktivitasnya tersebut PKL cenderung berkelompok dengan jenis dagangan yang sama (sejenis).

4.1.2. Analisis Perilaku PKL Dalam Pemanfaatan Ruang Kota Sebagai Lokasi Usaha

Analisis ini merupakan pembahasan mengenai karakteristik aktivitas PKL yang berkaitan dengan lokasi, meliputi lokasi aktivitas, status ruang, jenis ruang yang dimanfaatkan, luas ruang usaha, alasan pemilihan lokasi, dan perilaku dalam penggunaan tempat usaha yang dilihat dari cara mereka menyimpan sarana usaha disaat tidak digunakan.

4.1.2.1. Lokasi Aktivitas PKL

Pembahasan mengenai lokasi aktivitas PKL ini adalah untuk mengetahui di ruang-
yang bagaimana PKL cenderung menjalankan aktivitasnya. Untuk itu perlu dikenali terlebih
dahulu aktivitas-aktivitas formal apa saja yang berkembang di lokasi tersebut, sehingga fungsi
ruang dapat diketahui. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa ada keterkaitan antara
sektor formal dan informal. Rachbini dan Hamid (1994 : 90-91) berdasarkan penelitiannya
terhadap kegiatan sektor informal PKL di Jakarta dan Surabaya, menyatakan adanya
kecenderungan munculnya sejumlah aktivitas sektor informal berderet di sepanjang jalan di
setiap berdiri gedung bertingkat di 2 (dua) kota besar tersebut. Sektor informal ini melayani
para pegawai dan karyawan bergaji rendah.

Pada Bab III sub bab 3.8. telah diuraikan bahwa lokasi studi yang merupakan ruang
aktivitas PKL di Kota Salatiga, merupakan kawasan pusat kota dan sekitarnya, yang
merupakan ruang-ruang fungsional kota, yaitu suatu ruang yang memiliki fungsi utama
pendukung aktivitas masyarakat Kota Salatiga, seperti aktivitas perdagangan, pendidikan,
perkantoran, permukiman, dan aktivitas sosial ekonomi lainnya.

Untuk lebih jelas menggambarkan keterkaitan fungsi ruang dengan aktivitas PKL,
maka Tabel IV.6. berikut menunjukkan jumlah PKL responden di setiap lokasi pengamatan.

TABEL IV.6.
JUMLAH PKL MENURUT LOKASI BERJUALAN

No	Lokasi	Jumlah	%
1	Jl. Diponegoro	13	11.6
2	Jl. Patimura	16	14.3
3	Jl. Jenderal Sudirman dan sekitarnya	57	50.9
4	Lapangan Pancasila	6	5.4
5	Jl. Ahmad Yani	5	4.5
6	Jl. Hasanudin	6	5.4
7	Jl. Osamali	4	3.6
8	Jl. Kartini-Jl. Pemotongan	5	4.5
Jumlah		112	100.0

Sumber : Hasil penelitian dan analisis penulis, 2002.

Kota Salatiga sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya, memiliki arah perkembangan dan pertumbuhan kota yang cenderung bersifat *linier*, yaitu perkembangan yang memanfaatkan kegiatan pada jalur-jalur jalan utama kota dari arah Utara-Selatan. Dengan luas wilayah sebesar 5.678,11 hektar ini, dalam perkembangannya cenderung memiliki satu pusat keramaian atau sentra kegiatan sosial ekonomi kota, yaitu di lokasi-lokasi yang menjadi lokasi pengamatan dalam studi ini, walaupun telah ada upaya untuk pemeratakan kegiatan ke seluruh kota yaitu dengan adanya pembagian wilayah kota (BWK). Oleh karena itu aktivitas-aktivitas sosial ekonomi kota cenderung ada di kawasan tersebut. Masyarakat yang bertujuan berbelanja, berdagang, bekerja, sekolah atau aktivitas lainnya akan mengunjungi lokasi ini. Sehingga dapat kita katakan bahwa tingkat intensitas kunjungan pada lokasi-lokasi pengamatan ini cukup tinggi.

Tingkat kunjungan di kawasan pusat Kota Salatiga menjadi semakin tinggi mengingat fungsi Kota Salatiga yang berkembang, yaitu sebagai kota transit pariwisata, kota pendidikan dan olah raga, dan sebagai kota pusat kegiatan perdagangan. Fungsi tersebut dapat berkembang dengan baik, karena lokasi kota yang berada di tengah-tengah jalur lalu lintas regional yang menghubungkan 2 (dua) kota utama di Jawa Tengah, yaitu Semarang dan Surakarta. Selain itu dengan wilayah yang berada di tengah-tengah Kabupaten Semarang dan didukung oleh ketersediaan fasilitas sosial ekonomi yang cukup lengkap (terutama di kawasan pusat kota), menyebabkan Kota Salatiga ini menjadi kota tujuan kunjungan masyarakat sekitar.

Kondisi tersebut di atas akan mempengaruhi perkembangan aktivitas sektor informal, diantaranya PKL. Sebagaimana aktivitas perdagangan pada umumnya, aktivitas PKL juga mempertimbangkan lokasi. Dalam rangka mendekatkan komoditi yang dijualnya kepada konsumen tujuan, mereka akan beraktivitas di lokasi-lokasi strategis yang memiliki tingkat

kunjungan tinggi. Mc. Gee dan Yeung (1977 : 61) menyatakan bahwa aktivitas PKL pada umumnya cenderung berlokasi secara mengelompok pada area yang memiliki tingkat intensitas aktivitas tinggi, seperti pada simpul-simpul jalur transportasi atau lokasi-lokasi yang memiliki aktivitas hiburan, pasar, maupun ruang terbuka. Atau menurut Shirvani (1985 : 37) bahwa aktivitas PKL perkotaan merupakan pendukung aktivitas (*activity support*) dari aktivitas-aktivitas yang ada.

Sebagai bagian dari aktivitas perdagangan, maka orientasi utama lokasi aktivitas PKL di Kota Salatiga cenderung tertuju pada lokasi aktivitas perdagangan utama kota, yaitu Jl. Jenderal Sudirman, yang ditunjukkan dari paling banyaknya PKL responden yang beraktivitas di lokasi tersebut (50,9%). Hal ini terjadi karena skala pelayanan aktivitas di lokasi tersebut lebih luas dibanding lokasi lainnya. Seperti yang dinyatakan oleh Mc.Gee dan Yeung (1977 : 82-83), bahwa jenis dagangan PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitar kawasan PKL tersebut beraktivitas. Misalnya di kawasan perdagangan, maka jenis dagangan juga beraneka ragam. Dengan beragamnya jenis dagangan ini, maka jumlah PKL secara keseluruhanpun cenderung besar/banyak. Di lokasi-lokasi lainnya, sebagaimana telah diuraikan pada sub bab 3.8., seperti Jl. Patimura (14,3%) dan Jl. Hasanudin (5,4%) yang juga memiliki fasilitas perdagangan, namun jumlah PKL tidak sebesar di Jl. Jenderal Sudirman. Hal ini karena skala pelayanan aktivitas perdagangan yang ada cenderung berskala lingkungan. Orang akan memilih langsung ke pusat perdagangan yang lebih besar untuk mendapatkan jenis barang yang lebih lengkap dengan jarak tempuh sekitar 0,5-1 kilometer dari lokasi rumah.

Lokasi lain yang cukup menonjol perkembangan aktivitas PKLnya adalah Jl. Diponegoro (11,6%). Aktivitas PKL di lokasi ini muncul dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, sekitar tahun 1997. Sebelumnya hampir tidak ada aktivitas PKL di sana, kecuali

PKL yang bersifat *mobile*. Hal ini berkaitan dengan krisis ekonomi yang melanda di tahun itu. Kini tenda-tenda PKL berderet selama 24 jam penuh, terutama di depan lokasi aktivitas pendidikan, yaitu di depan kampus UKSW, SMP Stella Mattutina, dan STIE AMA. Gedung-gedung sekolah tersebut nyaris hilang atau tidak tampak karena tertutup deretan tenda-tenda PKL. Adanya aktivitas pendidikan tersebut, terutama pendidikan tinggi yang biasanya memiliki ribuan mahasiswa merupakan calon-calon konsumen yang dibidik PKL. Para mahasiswa cenderung menginginkan hal-hal yang bersifat praktis, termasuk untuk makan dan minum. Mereka akan lebih memilih makanan siap saji daripada memasaknya sendiri. Oleh karena itulah maka aktivitas PKL jenis makanan tumbuh subur di lokasi ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa lokasi aktivitas pendidikan merupakan salah satu lokasi yang paling diminati PKL setelah lokasi aktivitas perdagangan.

Sedangkan untuk lokasi lainnya, jumlah PKL belum begitu banyak, karena aktivitas-aktivitas yang ada di lokasi tersebut lebih terbatas jangkauan pelayanannya. Selain itu juga karena kedekatan lokasi dengan pusat perdagangan kota (Jl. Jenderal Sudirman). Gambaran aktivitas PKL di beberapa lokasi dapat dilihat pada Gambar 4.2.



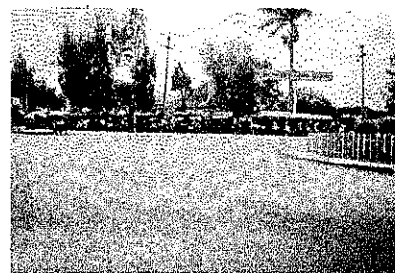
Deretan tenda PKL di depan kampus UKSW
(Jl. Diponegoro)



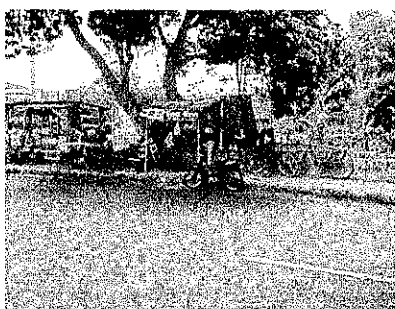
Deretan tenda PKL di sepanjang Jl. Patimura
menuju Tamansari



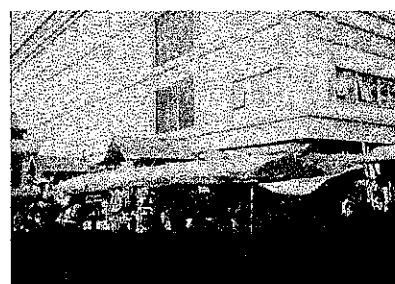
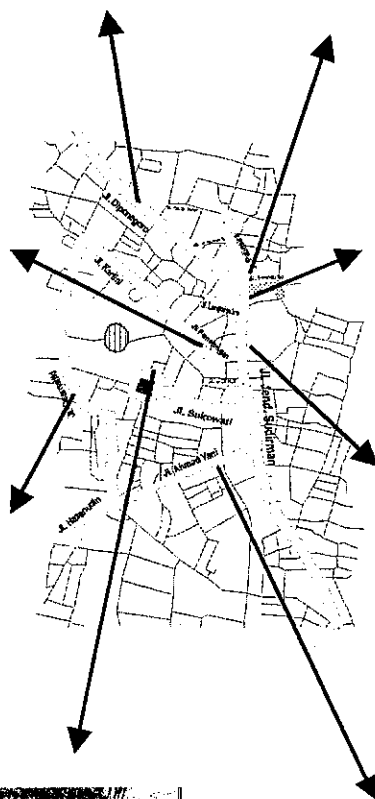
Aktivitas PKL di depan Kantor Dinas Pengelolaan
Pasar dan PKL (Jl. Pemotongan)



Deretan PKL mulai dari Jl. Patimura hingga depan
BPD di Jl. Pemuda Tamansari



Aktivitas PKL di Jl. Osamali



Tenda PKL di depan Pasaraya II
(Jl. Jenderal Sudirman)



Aktivitas PKL di kawasan Lap. Pancasila,
menikmati makanan dan minuman di bawah
pohon peneduh



Aktivitas PKL di depan Pertokoan Pandawa
(Jl. A. Yani)

Keterangan :

 Lokasi pengamatan

GAMBAR 4.2.
AKTIVITAS PKL DI BERBAGAI LOKASI PENGAMATAN

Sumber : Survei Primer, 2002.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas PKL di Kota Salatiga berkembang di kawasan-kawasan fungsional kota, karena kawasan tersebut memiliki tingkat intensitas kunjungan tinggi, sehingga sesuai dengan karakteristik PKL, kondisi ini memunculkan perkembangan aktivitas salah satu sektor informal tersebut.

4.1.2.2. Status Ruang Aktivitas PKL

Berdasarkan status ruang yang digunakan PKL responden dapat dilihat pada Tabel IV.7. berikut.

TABEL IV.7.
STATUS RUANG AKTIVITAS PKL

No	Status Ruang Aktivitas PKL	Jumlah	%
1	Ruang publik/umum	110	98.2
2	Ruang privat/pribadi	2	1.8
Jumlah		112	100.0

Sumber : Hasil penelitian dan analisis penulis, 2002.

Pada Tabel IV.7. di atas nampak bahwa PKL responden cenderung memanfaatkan ruang-ruang umum/publik yang tersedia, yaitu sebanyak 98,2%. Hanya 1,8% PKL yang menggunakan ruang privat. Ruang publik yang digunakan antara lain trotoar, badan jalan, dan lahan parkir. Sedangkan ruang privat yang digunakan adalah halaman rumah/toko.

PKL didefinisikan sebagai pedagang yang berjualan pada kaki lima dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah keramaian umum seperti trotoar di depan pertokoan/kawasan perdagangan, pasar, sekolah, dan gedung bioskop. Atau definisi lebih terinci adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang terbatas serta berlokasi di tempat-tempat umum, dengan tidak mempunyai legalitas formal, kegiatan perdagangannya dapat dilakukan secara berkelompok sesuai kultur yang dimiliki atau secara individual. Adapun istilah kaki lima berasal dari trotoar yang dahulunya berukuran lebar

5 (lima) *feet* atau sama dengan kurang lebih satu setengah meter (Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 1980 dalam Widodo, 2000 : 26).

Dari definisi tersebut maka dapat kita lihat bahwa dalam melakukan aktivitas usahanya PKL akan cenderung memanfaatkan ruang-ruang kota yang berstatus sebagai ruang publik atau umum. Demikian pula dengan aktivitas PKL di lokasi studi. Mereka hadir di ruang-ruang publik yang ada, seperti trotoar, lahan parkir, dan badan jalan, yang tentu pada awal pembangunannya ruang-ruang tersebut bukan difungsikan sebagai ruang bagi aktivitas PKL.

Sebagaimana kita ketahui, perencanaan kota yang formal dan cara-cara pembangunan kota selama ini belum memberikan ruang dan tempat yang efektif bagi kegiatan sektor informal, dalam hal ini adalah PKL. Oleh karena itu maka aktivitas PKL ini cenderung berada di ruang-ruang publik yang ramai dengan tingkat intensitas kunjungan tinggi. Hal tersebut akhirnya menyebabkan perubahan fungsi suatu ruang, yang semula sebagai ruang publik berubah menjadi ruang aktivitas perdagangan sektor informal. Berdasarkan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas PKL di Kota Salatiga banyak memanfaatkan ruang-ruang berstatus umum, karena tidak adanya ruang yang khusus diperuntukkan bagi aktivitas tersebut.

4.1.2.3. Jenis Ruang Aktivitas PKL

Telah dijelaskan bahwa aktivitas PKL responden cenderung memanfaatkan ruang-ruang publik yang tersedia, diantaranya adalah trotoar, badan jalan, dan lahan parkir. Hanya sedikit PKL yang memanfaatkan ruang privat. Tabel IV.8. berikut memperlihatkan jumlah PKL menurut jenis ruang yang digunakan.

TABEL IV.8.
JENIS RUANG AKTIVITAS PKL

No	Jenis Ruang Aktivitas PKL	Jumlah	%
1	Trotoar	79	70.5
2	Lahan parkir	18	16.1
3	Badan jalan	13	11.6
4	Lainnya	2	1.8
Jumlah		112	100.0

Sumber : Hasil penelitian dan analisis penulis, 2002.

Pada tabel di atas terlihat bahwa trotoar merupakan jenis ruang yang paling banyak dimanfaatkan PKL responden, yaitu sebanyak 70,5%. Kemudian lahan parkir dimanfaatkan oleh 16,1% PKL, badan jalan oleh 11,6% PKL, dan jenis lainnya, yaitu halaman rumah/toko dimanfaatkan oleh 1,8% PKL.

Trotoar menjadi tempat yang paling banyak diminati, karena merupakan tempat yang cukup strategis. Sebagaimana kita ketahui trotoar merupakan ruang pergerakan bagi pejalan kaki, sehingga dagangan yang dijual PKL terlihat jelas dan dekat dengan calon-konsumen. Selain itu ada hal lain yang menjadi penyebab trotoar menjadi lokasi yang paling diminati, yaitu karena luas trotoar yang dibangun di Kota Salatiga cenderung dapat dimanfaatkan untuk lokasi aktivitas PKL. Trotoar yang ada di sepanjang jalan di Kota Salatiga rata-rata memiliki lebar sekitar 1-1,5 meter dan dengan tambahan jalur hijau sekitar 0,75 meter, trotoar menjadi tempat yang paling tepat sebagai lokasi aktivitas PKL. Di Jl. Diponegoro terdapat trotoar dengan ukuran yang cukup lebar, sekitar 2,5-2,75 meter ditambah jalur hijau selebar 0,75 meter. Selain itu pemanfaatan trotoar juga diduga karena faktor keamanan. Trotoar dipandang lebih aman dibanding badan jalan atau lahan parkir. Resiko terserempet atau tertabrak kendaraan akan lebih besar terjadi jika berlokasi di badan jalan atau lahan parkir.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PKL di Kota Salatiga cenderung memanfaatkan trotoar sebagai lokasi aktivitasnya. Implikasi dari kondisi ini

adalah berkurangnya fungsi dari ruang tersebut, yang semula berfungsi sebagai ruang bagi pejalan kaki berubah menjadi ruang lokasi aktivitas PKL.

4.1.2.4. Luas Ruang Aktivitas PKL

Hal lain yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang adalah luas ruang yang digunakan. Tabel IV.9. berikut memperlihatkan luas ruang yang dimanfaatkan PKL.

TABEL IV.9.
LUAS RUANG AKTIVITAS PKL

No	Luas Ruang Aktivitas PKL	Jumlah	%
1	< 2,00 meter ²	9	8.0
2	2,00 – 5,00 meter ²	41	36.6
3	> 5,00 meter ²	62	55.4
Jumlah		112	100.0

Sumber : Hasil penelitian dan analisis penulis, 2002.

Pada tabel di atas nampak bahwa sebanyak 55,4% PKL memanfaatkan ruang > 5 meter², 41% memanfaatkan ruang dengan luas 2 – 5 meter², dan 9% PKL memanfaatkan ruang dengan luas < 2 meter².

Dari data tersebut nampak bahwa ada kecenderungan pemanfaatan ruang yang cukup luas oleh aktivitas PKL ini. Hal ini ditunjukkan dengan cukup banyaknya PKL yang menggunakan ruang > 5 meter². Jika hasil ini dikaitkan dengan status ruang yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan adanya pemanfaatan ruang publik yang cukup luas oleh aktivitas PKL di Kota Salatiga, sehingga menurunkan fungsi ruang publik yang ada, karena tidak dapat berfungsi sebagaimana seharusnya.

4.1.2.5. Alasan Pemilihan Lokasi Usaha

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai alasan PKL memilih lokasi usaha. Dari hasil analisis diketahui bahwa dekat dengan pusat keramaian/kegiatan kota merupakan alasan pemilihan lokasi yang paling banyak dipilih PKL responden (70,5%). Kemudian dekat

rumah/transport murah (17,9%), belum banyak saingan/tempat kosong (8%), dan alasan lainnya, yang dari hasil wawancara adalah karena ajakan teman (3,6%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel IV.10.

TABEL IV.10.
ALASAN PEMILIHAN LOKASI USAHA PKL

No	Alasan Pemilihan Lokasi	Jumlah	%
1	Dekat pusat keramaian/kegiatan kota	79	70.5
2	Dekat rumah/transport murah	20	17.9
3	Belum banyak saingan/tempat kosong	9	8.0
4	Lainnya	4	3.6
Jumlah		112	100.0

Sumber :Hasil penelitian dan analisis penulis, 2002.

Dari hasil tersebut menunjukkan adanya orientasi PKL terhadap konsumennya. Bromley (dalam Manning dan Effendi, 1996 :236) menyatakan bahwa dalam memilih lokasi bagi aktivitas usahanya, PKL akan berusaha untuk selalu mendekati pasar atau pembeli. Oleh karena itu mereka akan cenderung memilih lokasi yang mendekati pusat keramaian/kegiatan masyarakat kota, misalnya aktivitas perdagangan, pendidikan, perkantoran, dan sebagainya. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa PKL di Kota Salatiga cenderung memilih lokasi karena lokasi tersebut merupakan kulminasi berkumpulnya aktivitas masyarakat.

4.1.2.6. Perilaku PKL Dalam Penggunaan Tempat Usaha

Yang dimaksud perilaku penggunaan tempat usaha adalah bagaimana PKL mempergunakan tempat usahanya yang dilihat dari cara mereka memanfaatkan ruang tersebut di saat tidak beraktivitas, yaitu cara mereka menyimpan sarana usaha yang digunakan. Hal ini berkaitan dengan perilaku PKL dalam pemanfaatan ruang kota sebagai lokasi usaha. Tabel IV.11. di bawah ini memperlihatkan cara penyimpanan sarana usaha yang dilakukan PKL responden.

TABEL IV.11.
CARA PENYIMPANAN SARANA PERDAGANGAN PKL

No	Cara Penyimpanan Sarana Perdagangan	Jumlah	%
1	Dibawa pulang	35	31.3
2	Sebagian dibawa pulang sebagian ditinggal	49	43.8
3	Dititipkan di lokasi/tempat sekitar	17	15.2
4	Dijaga sendiri	11	9.8
Jumlah		112	100.0

Sumber : Hasil penelitian dan analisis penulis, 2002.

Pada tabel di atas nampak bahwa ada kecenderungan PKL meninggalkan “tanda” kehadiran aktivitas mereka di suatu lokasi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya PKL yang meninggalkan sarana perdagangannya di lokasi aktivitas, baik ditinggal sebagian (43,8%) ataupun dijaga sendiri (9,8%). Di lokasi-lokasi tertentu ada pula PKL yang menitipkan sarana perdagangannya di sekitar lokasi (15,2%), biasanya berupa tempat atau ruangan toko yang tidak digunakan atau di simpan di jalan/gang didekat lokasi usaha. Cara terakhir ini menimbulkan pemandangan yang kurang baik bagi lingkungan sekitarnya. Sedangkan PKL yang membawa pulang sarana perdagangannya sebanyak 31,3%.

Berdasarkan perilaku PKL dalam penyimpanan sarana usahanya ini, dapat disimpulkan bahwa PKL cenderung meninggalkan sarana usahanya di lokasi aktivitas, yang berakibat pada munculnya dampak visual yang kurang baik. Oleh karena itu perlu dipikirkan adanya peraturan mengenai cara penyimpanan sarana usaha dan sanksi bagi pelanggarnya.

4.1.2.7. Rangkuman Analisis Perilaku PKL Dalam Pemanfaatan Ruang Sebagai Lokasi Usaha

Berdasarkan analisis mengenai perilaku PKL dalam memanfaatkan ruang kota sebagai lokasi aktivitasnya, beberapa hal yang dapat dirangkumkan, adalah sebagai berikut :

1. Aktivitas PKL di Kota Salatiga berkembang di kawasan fungsional kota, karena kawasan tersebut memiliki tingkat intensitas kunjungan tinggi, yaitu suatu kawasan yang sesuai dengan karakteristik aktivitas PKL.

2. Aktivitas PKL di Kota Salatiga banyak memanfaatkan ruang berstatus ruang umum/publik, karena tidak adanya ruang yang khusus diperuntukkan bagi aktivitas tersebut.
3. Trotoar merupakan ruang yang paling banyak diminati oleh PKL, karena merupakan ruang pergerakan bagi pejalan kaki, sehingga merupakan ruang dengan intensitas kunjungan tinggi. Akibatnya fungsi awal trotoar sebagai tempat bagi pejalan kaki berubah menjadi lokasi PKL beraktivitas.
4. Aktivitas PKL di Kota Salatiga memanfaatkan ruang yang cukup luas, yang berarti berkurangnya ruang-ruang publik yang ada. Pemanfaatan ruang tersebut berhubungan dengan sarana perdagangan yang digunakan. Warung tenda yang merupakan bentuk sarana perdagangan yang paling banyak digunakan PKL membutuhkan penggunaan ruang yang cukup luas dibanding bentuk sarana lainnya.
5. Pemilihan lokasi aktivitas PKL didasari bahwa lokasi tersebut dekat dengan pusat keramaian/kegiatan kota yang merupakan kulminasi berkumpulnya aktivitas masyarakat.
6. Dalam menjalankan aktivitasnya, PKL cenderung meninggalkan sarana usaha, baik sebagian maupun seluruhnya (dengan dijaga sendiri). Akibat dari kebiasaan ini adalah munculnya dampak visual yang kurang baik.

4.1.3. Analisis Hubungan Antara Perilaku PKL Dalam Pemanfaatan Ruang dan Aktivitas Usaha

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara perilaku PKL responden dalam memanfaatkan ruang dan aktivitas usaha. Perilaku PKL dalam pemanfaatan ruang meliputi lokasi ruang (lokasi pengamatan), status ruang, jenis ruang (tempat berjualan), luas ruang, alasan pemilihan lokasi, dan cara penyimpanan sarana usaha. Perilaku aktivitas usaha PKL meliputi jenis dagangan, bentuk sarana perdagangan, lama aktivitas, dan pola

pengelompokkan. Analisis ini menggunakan analisis tabulasi silang (*cross tabulation*), dengan bantuan komputer program *SPSS for Windows Versi 10,0*. Dari analisis ini dapat diketahui perilaku-perilaku khas PKL responden.


Tabel IV.12. berikut memperlihatkan hasil uji yang dilakukan. Adanya hubungan antara perilaku PKL responden dalam berjualan dengan perilaku dalam pemanfaatan ruang diketahui jika nilai *Chi-square* pada *Asymp.Sig* < 0,05, sementara nilai *contingency coefficient* (koefisien kontingensi) semakin mendekati angka 1 menunjukkan keterkaitan yang erat.

TABEL IV.12.
HUBUNGAN ANTARA PERILAKU AKTIVITAS USAHA PKL DENGAN
PERILAKU PEMANFAATAN RUANG

Perilaku Pemanfaatan Ruang		Perilaku Dalam Berjualan			
		Jenis Dagangan	Bentuk Sarana Perdagangan	Lama Aktivitas	Pengelompokkan
Lokasi Ruang	<i>Asymp.Sig</i>	0.924	0.088	0.016	0.541
	<i>Contingency coeff.</i>	0.247	0.506	0.445	0.225
Status Ruang	<i>Asymp.Sig</i>	0.568	0.367	0.479	0.939
	<i>Contingency coeff.</i>	0.100	0.192	0.114	0.007
Jenis Ruang	<i>Asymp.Sig</i>	0.175	0.001	0.402	0.455
	<i>Contingency coeff.</i>	0.272	0.481	0.229	0.151
Luas Ruang	<i>Asymp.Sig</i>	0.000	0.000	0.595	0.255
	<i>Contingency coeff.</i>	0.432	0.586	0.156	0.154
Alasan Pemilihan Lokasi	<i>Asymp.Sig</i>	0.016	0.076	0.258	0.116
	<i>Contingency coeff.</i>	0.35	0.385	0.254	0.224
Cara Penyimpanan Sarana Usaha	<i>Asymp.Sig</i>	0.021	0.000	0.000	0.450
	<i>Contingency coeff.</i>	0.342	0.523	0.518	0.152

Sumber : Hasil analisis penulis, 2002.

Keterangan :

 Signifikan (ada hubungan antara dua variabel), dengan syarat nilai *Asymp.Sig* < 0,05.

Pada Tabel IV.12. di atas nampak adanya beberapa parameter yang memiliki hubungan, berikut akan dibahas satu persatu :

1. Lokasi aktivitas PKL memiliki hubungan dengan lama aktivitas, namun tidak ada hubungan dengan jenis dagangan, bentuk sarana usaha, dan pengelompokkan. Hal ini

menunjukkan bahwa pemanfaatan lokasi oleh aktivitas PKL berkaitan dengan waktu aktivitas formal yang ada di lokasi tersebut. Sebagai contoh, di lokasi aktivitas pendidikan (Jl. Diponegoro), PKL tidak beraktivitas di luar jam aktivitas formal tersebut berlangsung. Dapat kita buktikan di malam hari di atas pukul 21.00 WIB atau di hari Minggu dan di saat liburan sekolah, PKL yang ada di lokasi depan kampus UKSW dan pendidikan lainnya tutup.

Sedangkan parameter jenis dagangan tidak memiliki keterkaitan dengan lokasi, karena saat ini hampir di semua lokasi dapat kita jumpai berbagai jenis dagangan, artinya tidak ada lokasi-lokasi dengan jenis dagangan khusus. Begitu pula dengan bentuk sarana usaha yang digunakan dan pengelompokkan tidak memiliki keterkaitan dengan lokasi. Artinya bahwa bentuk sarana dan jenis pengelompokkan tidak menunjukkan lokasi tertentu.

2. Status ruang tidak memiliki hubungan dengan semua parameter perilaku PKL dalam berjualan. Karena status ruang yang dimanfaatkan PKL responden cenderung merupakan ruang-ruang publik (umum).
3. Jenis ruang (tempat berjualan) memiliki hubungan dengan bentuk sarana usaha/perdagangan yang digunakan, namun tidak ada hubungan dengan jenis dagangan, lama aktivitas, dan pengelompokkan PKL. Hal ini menunjukkan bahwa jenis ruang yang digunakan PKL ditentukan dari bentuk sarana yang digunakan.

Dari hasil analisis mengenai jenis ruang diketahui bahwa PKL responden cenderung memanfaatkan trotoar sebagai tempat berjualan. Dengan ukuran trotoar yang cenderung memiliki lebar yang dapat dimanfaatkan PKL ini membuatnya menjadi tempat yang paling tepat untuk berbagai bentuk sarana, kecuali tentu saja bentuk sarana mobil tidak dapat memanfaatkan tempat ini.

4. Luas ruang yang dimanfaatkan PKL memiliki hubungan dengan jenis dagangan dan bentuk sarana usaha, namun tidak ada hubungan dengan lama aktivitas dan pengelompokkan PKL. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa luas ruang yang dimanfaatkan PKL ditentukan dari jenis dagangan dan bentuk sarana usaha. PKL dengan barang dagangan dalam jumlah besar dan dengan sarana perdagangan yang beragam (seperti penjual makanan siap saji dengan tenda dan perlengkapannya), akan membutuhkan ruang yang lebih luas, dibanding PKL dengan dagangan yang sederhana (misalnya penjual koran/majalah yang hanya menggelar dagangan di atas selimbar alas plastik).
5. Alasan pemilihan lokasi aktivitas berhubungan dengan jenis dagangan, namun tidak berhubungan dengan bentuk sarana, lama aktivitas, dan pengelompokkan PKL. Hal ini berkaitan dengan sifat atau perilaku dasar dari aktivitas perdagangan pada umumnya yang selalu berorientasi pada kedekatannya dengan konsumen. PKL sebagai bagian dari aktivitas perdagangan, akan mempertimbangan di lokasi manakah dia akan menempatkan dagangannya sesuai dengan konsumen yang dituju. Oleh karena itu maka alasan pemilihan lokasi ini berhubungan dengan jenis dagangan.
6. Cara penyimpanan sarana usaha memiliki hubungan dengan jenis dagangan, bentuk sarana usaha, dan lama aktivitas, namun tidak ada hubungan dengan pengelompokkan PKL. Hal ini menunjukkan bahwa cara penyimpanan sarana usaha ini ditentukan dari jenis dagangan yang dijual, bentuk sarana usaha yang digunakan, dan lama aktivitas. Dengan jenis dagangan yang tidak tahan lama atau memerlukan proses seperti pemasakan, PKL responden cenderung untuk membawa pulang dagangannya tersebut (namun tidak dengan sarana usahanya). Bentuk sarana usaha yang cukup besar dan banyak, serta sulit untuk dibongkar, cenderung untuk ditinggalkan oleh PKL. Dan semakin lama seorang

PKL menjalankan aktivitasnya, akan cenderung meninggalkan sarana usahanya (baik sebagian atau seluruhnya) di lokasi aktivitas. Sedangkan PKL yang menjalankan aktivitas dalam waktu yang relatif lebih sebentar akan cenderung membawa pulang sarana usahanya. Hal ini lebih disebabkan karena efisiensi waktu dan tenaga.

4.1.4. Analisis Persepsi PKL Terhadap Kedekatan dan Kemudahan Pencapaian Lokasi Usaha

Persepsi menyangkut penilaian atau cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Dalam studi ini persepsi PKL yang diamati adalah persepsi terhadap kedekatan dan kemudahan pencapaian lokasi usaha.

4.1.4.1. Persepsi PKL Terhadap Kedekatan Lokasi Usaha

Persepsi PKL terhadap kedekatan lokasi usaha diukur dengan jarak lokasi usaha terhadap aktivitas masyarakat (aktivitas perdagangan, pendidikan, perkantoran, dan lain-lain), tempat tinggal PKL, sumber bahan baku, dan permukiman penduduk terdekat.

A. Persepsi PKL Terhadap Jarak Lokasi Usaha Dengan Aktivitas Masyarakat

Tabel IV.13. berikut memperlihatkan persepsi PKL responden terhadap jarak lokasi usaha dengan kegiatan masyarakat.

TABEL IV.13.
PERSEPSI PKL TERHADAP JARAK LOKASI USAHA DENGAN
KEGIATAN MASYARAKAT

No	Jarak Lokasi Usaha Dengan Kegiatan Masyarakat	Jumlah	%
1	< 100 meter	74	66.1
2	100 – 500 meter	37	33.0
3	> 500 meter	1	0.9
Jumlah		112	100.0

Sumber : Hasil penelitian dan analisis penulis, 2002.

Pada tabel di atas nampak bahwa PKL cenderung memilih lokasi dekat dengan kegiatan masyarakat, yang ditunjukkan dengan prosentase PKL yang berpendapat jarak lokasi

usahanya dengan kegiatan masyarakat adalah < 100 meter, sebanyak 66,1%. Sedangkan jarak yang terjauh, yaitu > 500 meter hanya sebesar 0,9%. Kondisi ini disebabkan karena lokasi-lokasi studi merupakan kawasan fungsional kota, yaitu lokasi tempat masyarakat beraktivitas. Selain itu kedekatan ini juga terkait dengan konsumen tujuan dari PKL.

Seperti yang telah sering disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa PKL cenderung mendekati pasar/pembeli. Mereka akan berusaha agar barang yang mereka tawarkan terlihat jelas oleh konsumennya. Sementara itu kawasan fungsional kota merupakan ruang dengan tingkat kunjungan tinggi, sehingga dengan memilih lokasi dekat dengan pusat keramaian kota, maka aktivitasnya tersebut terlihat oleh calon konsumen. Calon konsumen tersebut sesuai dengan tujuan kepada siapa barang atau jasa ditujukan. Oleh karena itu mereka akan memilih lokasi-lokasi strategis dan menguntungkan di pusat kota atau di suatu lokasi yang merupakan lokasi aktivitas masyarakat yang sesuai dengan tujuan. Kondisi ini juga sesuai dengan teori lokasi bahwa bagi pedagang terdapat kecenderungan untuk berorientasi kepada konsentrasi konsumen dalam menentukan lokasi tempat usaha (Djojodipuro, 1992 : 30).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan aktivitas usahanya, PKL cenderung dekat dengan aktivitas masyarakat.

B. Persepsi PKL Terhadap Jarak Lokasi Usaha Dengan Tempat Tinggal

Dari survai primer yang dilakukan seperti yang nampak pada Tabel IV.14. berikut, diketahui bahwa jarak lokasi usaha dengan tempat tinggal PKL responden cenderung berada pada jarak > 1 kilometer (58%). PKL yang jarak lokasi usahanya 0,5 – 1 km dengan tempat tinggal sebanyak 25,9%, dan yang jarak lokasi usahanya $< 0,5$ km dengan tempat tinggal sebanyak 16,1%.

TABEL IV.14.
PERSEPSI PKL TERHADAP JARAK LOKASI USAHA DENGAN
TEMPAT TINGGAL

No	Jarak Lokasi Usaha Dengan Tempat Tinggal	Jumlah	%
1	< 0,5 kilometer	18	16.1
2	0,5 – 1 kilometer	29	25.9
3	> 1 kilometer	65	58.0
Jumlah		112	100.0

Sumber : Hasil penelitian dan analisis penulis, 2002.

Rachbini dan Hamid (1994 : 101) menyatakan ada korelasi yang tinggi antara tingkat mobilitas tempat usaha dengan mobilitas tempat tinggal. Artinya mobilitas tempat tinggal terjadi karena mobilitas tempat usaha dan bukan sebaliknya. Massa pedagang dan jasa informal harus mengikuti dan bertempat tinggal dimana saja dan kemana gerobak alat dagangannya itu akan dipangkalkan. Mereka harus dekat dengan tempat usahanya. Jika tidak mereka akan dililit oleh masalah transportasi dan kesulitan-kesulitan lain yang menyangkut cara membawa dan menyimpan alat-alat usahanya. Dalam teori lokasi (dalam Djojodipuro, 1992 :30) disebutkan pula bahwa penting untuk menentukan lokasi sedemikian rupa sehingga diperoleh biaya angkutan yang minimum.

Namun pernyataan tersebut di atas nampaknya untuk kondisi dalam studi ini tidak terbukti. Pada tabel di atas terlihat jarak yang ditempuh PKL dari lokasi usaha ke tempat tinggalnya adalah pilihan jarak yang terjauh, yaitu > 1 km. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan sarana transportasi yang dewasa ini tergolong cukup mudah dan menjangkau semua lokasi. Selain itu juga disebabkan kondisi wilayah Kota Salatiga yang tidak terlalu luas dalam arti jarak jangkauan antara permukiman dengan lokasi-lokasi aktivitas perdagangan tidak terlalu jauh.

C. Persepsi PKL Terhadap Jarak Lokasi Usaha Dengan Sumber Bahan Baku

Berdasarkan persepsi PKL mengenai jarak lokasi usaha dengan sumber bahan baku seperti tercantum pada Tabel IV.15. berikut.

TABEL IV.15.
PERSEPSI PKL TERHADAP JARAK LOKASI USAHA DENGAN SUMBER BAHAN BAKU

No	Jarak Lokasi Usaha Dengan Sumber Bahan Baku	Jumlah	%
1	< 1 kilometer	27	24.1
2	1 – 5 kilometer	42	37.5
3	> 5 kilometer	43	38.4
Jumlah		112	100.0

Sumber : Hasil penelitian dan analisis penulis, 2002.

Pada tabel nampak bahwa sebanyak 38,4% PKL berpendapat bahwa jarak lokasi usaha dengan sumber bahan baku adalah sejauh > 5 km, 37,5% antara 1-5 km, dan 24,1% < 1 km. Kondisi ini sebenarnya terkait dengan jenis dagangan yang dijual oleh PKL bersangkutan. Sebagai contoh misalnya pada PKL makanan siap saji (nasi dan lauk pauknya/mie bakso/batagor dan lain-lain/minuman) akan membeli sumber bahan baku dagangannya itu dari pasar, yang bisa dipenuhi dari pasar terdekat dengan lokasi usaha. Lain halnya dengan PKL yang menjual makanan jenis buah-buahan, maka dia akan mendapatkan sumber dagangannya tersebut dari lokasi yang agak jauh, misalnya dari petani penghasil buah atau dengan banyaknya buah-buah impor saat ini, PKL tersebut membelinya dari distributor pengimpor buah luar negeri.

D. Persepsi PKL Terhadap Jarak Lokasi Usaha Dengan Permukiman Terdekat

Tabel IV.16. berikut menunjukkan persepsi PKL mengenai jarak lokasi usahanya dengan permukiman terdekat.

TABEL IV.16.
PERSEPSI PKL TERHADAP JARAK LOKASI USAHA
DENGAN PERMUKIMAN TERDEKAT

No	Jarak Lokasi Usaha Dengan Permukiman Terdekat	Jumlah	%
1	< 0,5 kilometer	69	61.6
2	0,5 – 1 kilometer	41	36.6
3	> 1 kilometer	2	1.8
Jumlah		112	100.0

Sumber : Hasil penelitian dan analisis penulis, 2002.

Pada tabel di atas terlihat bahwa PKL cenderung menempatkan lokasi usahanya dekat dengan permukiman terdekat, yang ditunjukkan dengan 61,6% PKL responden berpendapat bahwa lokasi usahanya berjarak < 0,5 km dengan permukiman penduduk terdekat. Sebanyak 36,6% PKL dengan jarak 0,5 – 1 km, dan 1,8% > 1 km. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas PKL cenderung berada di sekitar atau mendekati permukiman penduduk. Kondisi ini sesuai dengan karakter dari aktivitas perdagangan yang selalu berorientasi pada keberadaan konsumen.

E. Rangkuman Persepsi PKL Terhadap Kedekatan Lokasi Usaha

Berdasarkan analisis mengenai kedekatan lokasi seperti yang diuraikan di atas, maka dapat dirangkum beberapa hal sebagai berikut :

1. Lokasi usaha PKL cenderung dekat dengan lokasi aktivitas masyarakat (aktivitas perdagangan, pendidikan, perkantoran, permukiman, dan aktivitas masyarakat lainnya).
2. Jarak lokasi usaha dengan tempat tinggal PKL dan sumber bahan baku dagangan bukan merupakan pertimbangan utama dalam memilih lokasi usaha. Hal ini disebabkan karena adanya ketersediaan dan kemudahan sarana transportasi dari tempat tinggal menuju lokasi usaha atau sebaliknya, serta tergantung pada darimana sumber bahan baku dagangan yang dijual berasal.

4.1.4.2. Persepsi PKL Terhadap Kemudahan Pencapaian Lokasi Usaha

Kemudahan pencapaian lokasi usaha diukur dari ketersediaan sarana transportasi umum menuju lokasi usaha. Dari hasil survai primer yang dilakukan, diketahui bahwa tidak ada PKL responden yang beranggapan bahwa lokasi usahanya saat ini sangat sulit untuk dicapai dengan sarana transportasi umum. Hanya 1,8% PKL yang beranggapan agak sulit, sedangkan selebihnya, yaitu 98,2% PKL beranggapan lokasi usahanya mudah dicapai oleh sarana transportasi umum. Secara lengkap hasil ini dapat dilihat pada Tabel IV.17. berikut.

TABEL IV.17.
PERSEPSI PKL TERHADAP KEMUDAHAN PENCAPAIAN
LOKASI USAHA DENGAN SARANA TRANSPORTASI UMUM

No	Kemudahan Pencapaian Lokasi Usaha Dengan Sarana Transportasi Umum	Jumlah	%
1	Mudah	110	98.2
2	Agak sulit	2	1.8
3	Sangat sulit	0	0.0
Jumlah		112	100.0

Sumber : Hasil penelitian dan analisis penulis, 2002.

Kondisi seperti nampak pada tabel diatas disebabkan karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa lokasi studi merupakan kawasan fungsional kota, oleh karena itu memiliki kemudahan pencapaian, terutama oleh sarana transportasi umum. Lebih jelas mengenai sarana transportasi umum tersebut telah diuraikan pada Bab III, sub bab 3.8. mengenai karakteristik lokasi studi.

4.2. Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Aktivitas PKL

Pembahasan mengenai persepsi masyarakat terhadap aktivitas PKL di Kota Salatiga merupakan pembahasan mengenai tanggapan atau pandangan masyarakat kota terhadap keberadaan aktivitas PKL, meliputi alasan berbelanja di PKL, manfaat dan gangguan adanya aktivitas PKL, penempatan lokasi PKL, perlu tidaknya penataan lokasi PKL, dan pengelompokkan PKL. Data yang ditampilkan pada bagian ini merupakan data yang didapat

dari survei primer yang dilakukan dengan wawancara langsung terhadap 100 masyarakat responden, yang semuanya pernah berbelanja di PKL.

4.2.1. Alasan Masyarakat Berbelanja di PKL

Analisis ini menunjukkan alasan masyarakat responden berbelanja di PKL, dan dari hasil analisis 40% responden berbelanja di PKL karena alasan lainnya, yang terdiri dari karena makanan atau barang yang dijual oleh PKL sesuai selera mereka. Diikuti dengan alasan karena lokasi mudah dijangkau (21%), harga lebih murah (20%), dan suasana lebih santai (19%), seperti yang nampak pada Tabel IV.18. berikut.

TABEL IV.18.
ALASAN MASYARAKAT BERBELANJA DI PKL

No	Alasan Masyarakat Berbelanja Di PKL	Jumlah	%
1	Harga lebih murah	20	20.0
2	Lokasi mudah dijangkau	21	21.0
3	Suasana lebih santai	19	19.0
4	Lainnya	40	40.0
Jumlah		100	100.0

Sumber : Hasil penelitian dan analisis penulis, 2002.

Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa alasan berbelanja di PKL yang dilakukan masyarakat cukup beragam, namun yang dominan adalah karena faktor selera. Berdasarkan hal ini maka dapat dikatakan bahwa aktivitas PKL merupakan aktivitas yang cukup berperan dalam kehidupan masyarakat.

4.2.2. Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Keberadaan Aktivitas PKL

Persepsi masyarakat mengenai manfaat yang diperoleh dari keberadaan PKL dapat dilihat pada Tabel IV.19. berikut.

TABEL IV.19.
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MANFAAT KEBERADAAN
AKTIVITAS PKL

No	Manfaat Aktivitas PKL	Jumlah	%
1	Tidak ada manfaat	8	8.0
2	Lokasi menjadi lebih ramai	16	16.0
3	Mudah mendapatkan makanan / kebutuhan lain	61	61.0
4	Lainnya	35	35.0
Jumlah		100	100.0

Sumber : Hasil penelitian dan analisis penulis, 2002.

Pada Tabel IV.19. terlihat bahwa mudah mendapatkan makanan atau kebutuhan lainnya (61%) merupakan manfaat yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat responden. Kemudian diikuti alasan lainnya, yaitu bisa memperoleh makanan atau barang sesuai dengan kebutuhan (35%), dan lokasi menjadi lebih ramai (16%), sedangkan 8% berpendapat tidak ada manfaat.

Paulus Wirotomo (dalam Rachbini dan Hamid, 1994 : xiii) menyatakan bahwa disamping sisi yang negatif, sektor informal memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kota, yaitu salah satunya adalah adanya ketergantungan pegawai sektor formal pada dagangan dan jasa dari sektor informal. Bisa kita lihat pada jam makan (pagi/siang/malam), PKL yang menjual makanan di sekitar lokasi kampus, kantor, atau kos mahasiswa akan terlihat ramai.

Berdasarkan analisis ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas PKL memiliki manfaat yang bervariasi. Namun intinya adalah adanya kemudahan yang diberikan oleh aktivitas PKL, karena keberadaan mereka yang cenderung dekat dengan aktivitas masyarakat, yang merupakan perilaku atau sifat dasar dari aktivitas tersebut.

4.2.3. Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Negatif Keberadaan Aktivitas PKL

Tabel IV.20. memperlihatkan dampak negatif atau gangguan yang muncul dari keberadaan PKL menurut persepsi masyarakat.

TABEL IV.20.
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP DAMPAK NEGATIF
KEBERADAAN AKTIVITAS PKL

No	Dampak Negatif Keberadaan Aktivitas PKL	Jumlah	%
1	Tidak ada	25	25.0
2	Trotoar menjadi sempit/tidak nyaman untuk tempat berjalan	24	24.0
3	Parkir menjadi sulit	24	24.0
4	Lingkungan menjadi kotor	24	24.0
5	Lainnya	3	3.0
Jumlah		100	100.0

Sumber : Hasil penelitian dan analisis penulis, 2002.

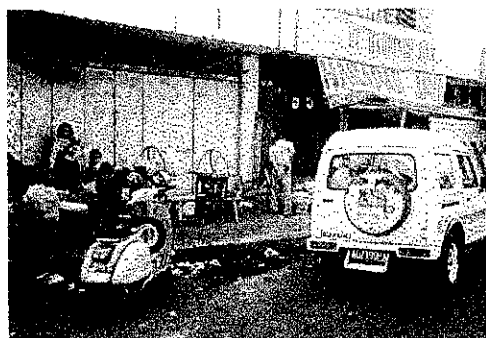
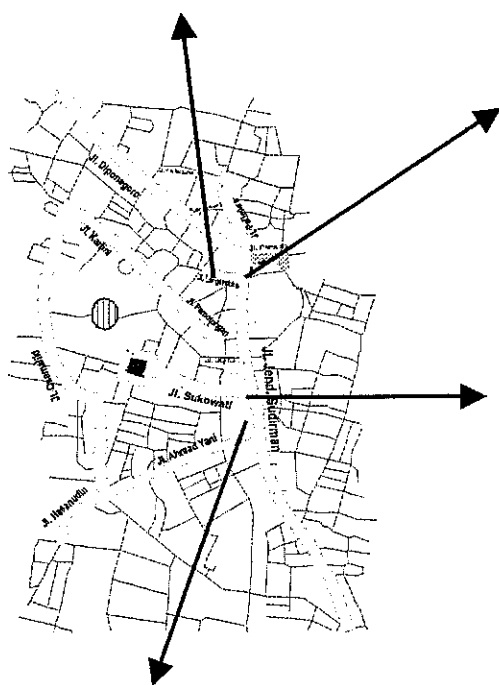
Tabel IV.20. di atas menunjukkan bahwa PKL mempunyai dampak negatif seperti yang terlihat selama ini, yaitu menyebabkan ketidaknyamanan pejalan kaki (24%), parkir menjadi sulit (24%), lingkungan menjadi kotor (24%), dan lainnya (3%). Yang dimaksud sisi negatif lainnya adalah gangguan secara visual, yang ditunjukkan oleh tampilan PKL yang tidak teratur dan adanya ketidakamanan dari aktivitas PKL, terutama jenis PKL yang mengolah makanan di lokasi, yaitu berupa penempatan sarana memasak yang tidak dilindungi dan berdekatan dengan lokasi parkir dan pejalan kaki. Sedangkan 25% masyarakat menganggap bahwa kehadiran aktivitas PKL tidak memberi dampak negatif. Umumnya masyarakat yang berpendapat demikian adalah masyarakat yang lokasi aktivitasnya belum dipenuhi oleh aktivitas PKL, sehingga menganggap aktivitas PKL yang ada belum terlalu mengganggu.



Deretan sarana usaha PKL disaat tidak digunakan merusak pemandangan kota (Jl. Langensuko)



Deretan tenda PKL menutupi trotoar dan lahan parkir, sehingga pejalan kaki berjalan di badan jalan (Jl. Jend. Sudirman)




Lingkungan kotor di sekitar aktivitas PKL (Jl. Jend. Sudirman)



Perebutan ruang antara aktivitas parkir kendaraan dan aktivitas PKL

Keterangan :

 Lokasi pengamatan

GAMBAR 4.3. DAMPAK NEGATIF KEHADIRAN AKTIVITAS PKL

Sumber : Hasil survai penulis, 2002

4.2.4. Persepsi Masyarakat Terhadap Perlunya Penataan Lokasi PKL

Dari hasil survai primer diperoleh hasil bahwa sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa penataan lokasi PKL sangat perlu (78%), diikuti oleh masyarakat yang berpendapat perlu (21%), dan 1% berpendapat kurang perlu. Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel IV.21. berikut.

TABEL IV.21.
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERLUNYA
PENATAAN LOKASI PKL

No	Pendapat	Jumlah	%
1	Kurang perlu	1	1.0
2	Perlu	21	21.0
3	Sangat perlu	78	78.0
Jumlah		100	100.0

Sumber : Hasil penelitian dan analisis penulis, 2002.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penataan lokasi aktivitas PKL di Kota Salatiga sudah perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan menurut masyarakat responden aktivitas PKL saat ini cenderung membuat tampilan Kota Salatiga *semrawut*, tidak teratur, dan kotor.

4.2.5. Persepsi Masyarakat Terhadap Lokasi Aktivitas PKL

Mengenai lokasi aktivitas PKL, masyarakat berpendapat bahwa sebaiknya PKL ditempatkan di lokasi perdagangan (45%), dekat tempat tinggal/kost (16%), dekat tempat kerja/sekolah (14%), dan lokasi lainnya (25%). Yang dimaksud lokasi lainnya adalah lokasi khusus PKL. Hasil ini secara rinci dapat dilihat pada Tabel IV.22. di bawah ini.

TABEL IV.22.
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP LOKASI AKTIVITAS PKL

No	Lokasi PKL	Jumlah	%
1	Di lokasi perdagangan	45	45.0
2	Dekat dengan tempat tinggal	16	16.0
3	Dekat tempat kerja/sekolah	14	14.0
4	Lainnya	25	25.0
Jumlah		100	100.0

Sumber : Hasil penelitian dan analisis penulis, 2002.

Dari tabel di atas terlihat bahwa cukup beragam lokasi PKL menurut persepsi masyarakat. Adapun alasan yang mendasari mengapa di lokasi-lokasi tersebut PKL ditempatkan berbeda-beda. Hal ini karena masyarakat sebagai konsumen PKL berasal dari berbagai kalangan dengan latar belakang berbeda. Seorang mahasiswa misalnya, akan memilih lokasi PKL dekat dengan lokasi kost, sehingga akan mudah mendapatkan makanan dan minuman di saat membutuhkan. Seorang pegawai/karyawan, yang bertempat tinggal agak jauh dari tempat kerja, akan memilih lokasi PKL yang dekat dengan tempat kerjanya, karena alasan singkatnya waktu istirahat makan siang. Kemudian bagi ibu-ibu rumah tangga akan memilih lokasi PKL di lokasi perdagangan, karena dapat mencari kebutuhan bersamaan dengan aktivitas belanja.

4.2.6. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelompokan PKL

Tabel IV.23. dibawah ini memperlihatkan persepsi masyarakat terhadap pengelompokan PKL dan alasannya.

TABEL IV.23.
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOMPOKKAN PKL DAN ALASANNYA

No	Jenis Pengelompokan	Alasan Pengelompokan			Jumlah
		Lebih Beragam	Pilihan Menjadi Mudah	Lainnya	
1	PKL berkelompok dengan jenis dagangan yang sama	1	32	9	42
2	PKL bercampur dengan jenis dagangan yang berbeda	36	21	1	58
Jumlah		37	53	10	100

Sumber : Hasil penelitian dan analisis penulis, 2002.

Dari Tabel IV.23. diatas terlihat bahwa lebih banyak masyarakat berpendapat bahwa penempatan PKL sebaiknya bercampur dengan jenis dagangan yang berbeda (58%), dengan alasan lebih beragam (36%), pilihan menjadi mudah (21%), dan 1% alasan lainnya, yaitu agar PKL tidak saling bersaing memperebutkan konsumen. Masyarakat yang berpendapat PKL

sebaiknya berkelompok dengan jenis dagangan yang sama terdapat 42%, dengan alasan lebih beragam 1%, pilihan menjadi mudah 32%, dan 9% alasan lainnya, yaitu agar lokasi menjadi teratur dan rapih.

Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat cenderung berpendapat bahwa sebaiknya tidak ada pemisahan pengelompokan PKL berdasarkan jenis dagangan, dengan alasan agar dagangan yang ditawarkan beragam, artinya dalam satu lokasi masyarakat konsumen bisa mendapatkan berbagai barang yang dibutuhkan. Namun demikian perlu tetap dikelompokkan sesuai jenis dagangan, misalnya dagangan basah dan kering. Hal ini mengingat perbedaan karakteristik dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan. Pada jenis dagangan basah, karena sampah yang dihasilkan basah, dan kotor, maka memerlukan tempat pembuangan sampah basah, tempat mencuci peralatan dagang PKL, dan air bersih. Sedangkan pada jenis dagangan kering, hanya memerlukan tempat keranjang sampah kering, dan tidak memerlukan tempat mencuci peralatan dagang, serta saluran pembuangan air kotor.

4.2.7. Rangkuman Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Aktivitas PKL

Berdasarkan analisis mengenai persepsi masyarakat terhadap keberadaan aktivitas PKL di Kota Salatiga, dapat dirangkumkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Alasan utama masyarakat berbelanja di PKL adalah karena faktor selera. Artinya apa yang dijual atau ditawarkan PKL sesuai selera masyarakat konsumen.
2. Lokasi aktivitas PKL yang berdekatan dengan lokasi aktivitas masyarakat, menjadikan keberadaan PKL memberi manfaat bagi masyarakat pelaku aktivitas tersebut (formal). Hal ini terbukti dari manfaat utama yang dikemukakan, yaitu mudah mendapatkan makanan/kebutuhan lain.
3. Aktivitas PKL dalam memanfaatkan ruang kota memiliki dampak negatif bagi masyarakat, yaitu trotoar menjadi sempit atau tidak dapat dilalui, parkir menjadi sulit,

lingkungan menjadi kotor, dan gangguan secara visual, yaitu munculnya pemandangan kumuh, kotor, dan *semrawut*.

4. Penataan PKL di Kota Salatiga berdasarkan persepsi masyarakat, dipandang perlu dilakukan, karena keberadaan aktivitas tersebut saat ini cenderung membuat Kota Salatiga nampak kumuh, kotor, dan tidak teratur.
5. Berdasarkan persepsi masyarakat, lokasi PKL sebaiknya di lokasi perdagangan, dengan alasan efisiensi waktu, karena dapat mencari kebutuhan di satu lokasi secara bersamaan.
6. Masyarakat menganggap sebaiknya tidak ada pengelompokan jenis dagangan PKL pada satu lokasi, agar dagangan yang ditawarkan lebih beragam.

4.3. Analisis Hubungan Antara Kondisi PKL Dengan Persepsi Masyarakat

Dalam bagian ini akan dibahas hubungan antara kondisi PKL dengan persepsi masyarakat terhadap aktivitas sektor informal tersebut. Analisis hubungan ini didasarkan pada hasil analisis terhadap perilaku aktivitas PKL dan persepsi masyarakat terhadap keberadaan salah satu aktivitas sektor informal tersebut, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena perilaku PKL yang diamati dalam studi ini adalah perilaku dalam aktivitas usaha dan pemanfaatan ruang, maka analisis hubungan antara kondisi PKL dan persepsi masyarakat akan dibahas berdasarkan kedua aspek tersebut. Untuk mempermudah pemahaman, dibuat Tabel IV.24. dibawah ini.

TABEL IV.24.
HUBUNGAN KONDISI PKL DENGAN PERSEPSI MASYARAKAT

No	Aspek	PKL	Persepsi Masyarakat	Rumusan
1	Aktivitas usaha PKL	Aktivitas usaha PKL berada di lokasi-lokasi strategis yang merupakan kawasan fungsional kota, tempat masyarakat kota beraktivitas, dengan makanan sebagai jenis dagangan dominan, dan waktu aktivitas yang menyesuaikan dengan aktivitas formal.	<ul style="list-style-type: none"> - PKL dipilih karena faktor selera (makanan/barang sesuai dengan kebutuhan), lokasi mudah dijangkau, harga relatif lebih murah, dan suasana lebih santai. - Adanya aktivitas PKL memudahkan masyarakat mendapatkan makanan/kebutuhan lain yang sesuai selera, dan membuat lokasi lebih ramai. 	Ada keterkaitan/hubungan antara PKL dan masyarakat, yaitu hubungan saling membutuhkan. Bagi masyarakat, adanya aktivitas PKL di ruang-ruang fungsional kota memberi kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan (primer/sekunder), termasuk selera dan harga yang lebih murah, serta suasana lokasi yang santai. Bagi PKL, adanya aktivitas masyarakat di suatu lokasi merupakan alasan memilih lokasi usaha, dalam rangka mendekati konsumen.
2	Pemanfaatan ruang kota sebagai lokasi usaha PKL	PKL banyak memanfaatkan ruang-ruang publik, seperti trotoar, bahu jalan, dan lahan parkir, dengan penggunaan ruang yang relatif cukup luas ($> 5m^2$), dan sarana perdagangan yang digunakan cenderung ditinggalkan disaat tidak beraktivitas.	Pemanfaatan ruang yang dilakukan PKL menyebabkan trotoar menjadi sempit sehingga tidak nyaman sebagai tempat berjalan kaki, parkir menjadi sulit, dan lingkungan menjadi kotor, kumuh, dan tidak tertata.	Pemanfaatan ruang yang dilakukan PKL cenderung tidak mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan pengguna aktivitas lain di ruang yang sama.

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2002.

4.3.1. Perilaku Aktivitas Usaha PKL

Berdasarkan analisis terhadap perilaku aktivitas usaha PKL yang telah diuraikan pada sub bab 4.1.1. diperoleh temuan bahwa dalam menjalankan aktivitasnya, PKL berada di lokasi-lokasi strategis (kawasan fungsional kota), dengan makanan sebagai jenis dagangan yang dominan, dan waktu aktivitas yang menyesuaikan dengan irama aktivitas formal sekitarnya.

Kemudian dari analisis terhadap persepsi masyarakat terhadap keberadaan aktivitas PKL, diperoleh temuan bahwa masyarakat memilih berbelanja di PKL karena faktor selera, artinya apa yang ditawarkan atau dijual PKL sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dengan

lokasi yang mudah dijangkau, harga yang relatif lebih murah, dan suasana lebih santai. Keberadaan aktivitas PKL bagi masyarakat memudahkan untuk mendapatkan makanan/barang kebutuhan lainnya yang sesuai selera, serta lokasi menjadi lebih ramai.

Dari kondisi di atas, nampak ada keterkaitan/hubungan yang cukup erat antara PKL dan masyarakat. Hubungan ini menurut Sinulingga (1999, dalam Widihapsari, 2001 : 31) dapat dijelaskan melalui teori interaksi antar fungsi aktivitas kota. Bahwa suatu aktivitas perdagangan dan jasa memiliki kecenderungan untuk berlokasi dekat dengan konsumen, dekat dengan bisnis lain atau dekat dengan penyedia barang dan jasa. Selain itu aktivitas atau fungsi akan lebih menguntungkan jika berlokasi berdekatan. Hal inilah yang mendasari banyak ditemukannya aktivitas perdagangan dan jasa sektor informal berada di sekitar formal. Hubungan tersebut dapat disebut sebagai hubungan yang bersifat komplementer, yaitu suatu hubungan saling melengkapi antar fungsi.

Masyarakat sebagai pelaku aktivitas formal mendapatkan kemudahan dengan adanya aktivitas PKL di sekitar lokasi aktivitas mereka. Mereka dapat dengan mudah memperoleh makanan/minuman atau kebutuhan lainnya yang sesuai selera, dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan aktivitas perdagangan yang lebih bersifat formal, dan mereka mendapatkan pelayanan dengan suasana yang lebih santai. Bagi PKL yang merupakan salah satu aktivitas usaha di sektor informal, adanya aktivitas masyarakat merupakan salah satu alasan mereka memilih suatu lokasi berdagang. Sesuai dengan karakteristik aktivitas perdagangan yang berusaha untuk selalu dekat dengan pasar/pembeli.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan saling melengkapi (komplementer) antara masyarakat sebagai pelaku aktivitas sektor formal, dan PKL sebagai pelaku aktivitas sektor informal.

4.3.2. Perilaku PKL Dalam Pemanfaatan Ruang Kota

Berdasarkan analisis terhadap pemanfaatan ruang yang dilakukan PKL diperoleh temuan bahwa PKL cenderung memanfaatkan ruang-ruang publik yang tersedia, seperti trotoar, lahan parkir, dan badan jalan. Dari ruang-ruang tersebut, trotoar merupakan jenis ruang yang paling banyak dimanfaatkan dan dengan ukuran pemanfaatan ruang yang cukup luas, serta adanya kebiasaan PKL untuk meninggalkan “tanda kehadiran” mereka di lokasi usahanya.

Dalam pandangan masyarakat, pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh aktivitas PKL ini cenderung menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyaman. Ketidakamanan dan ketidaknyamanan tersebut adalah trotoar menjadi sempit, parkir sulit, dan gangguan secara visual, yaitu, munculnya lingkungan-lingkungan kotor, kumuh, dan semrawut. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan aktivitas usahanya, PKL cenderung melakukan pelanggaran terhadap kepentingan publik. Mereka tidak mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan pengguna aktivitas lain di ruang yang sama.

Dalam menjalankan aktivitasnya tersebut, PKL hanya berprinsip bahwa aktivitas mereka harus sedekat mungkin dengan pembeli. Oleh karena itu, mereka memanfaatkan ruang-ruang yang merupakan ruang yang memiliki tingkat intensitas kunjungan tinggi, misalnya trotoar yang merupakan ruang bagi pejalan kaki. Dengan memanfaatkan trotoar, barang yang mereka perdagangkan terlihat oleh pembeli. Namun bagi konsumen atau pembeli itu sendiri, lokasi tersebut dalam kenyataan cukup diminati. Pembeli dapat langsung mencapai tujuan, baik dengan berjalan kaki ataupun dengan menggunakan kendaraan. Oleh karena itu sering adanya relokasi PKL yang tidak dibarengi oleh kemudahan pencapaian tidak berjalan dengan baik, karena sepiunya konsumen pembeli.

Pemanfaatan ruang oleh aktivitas PKL yang cenderung menimbulkan masalah Kota Salatiga tidak lepas dari ketiadaan arahan atau aturan yang tepat dan lengkap terhadap salah satu aktivitas sektor informal tersebut. Sebagaimana telah diuraikan pada sub bab 3.7., kebijakan-kebijakan pemerintah kota yang dibuat selama ini belum lengkap. Sebagai contoh adalah adanya larangan berjualan di suatu lokasi, namun larangan tersebut tidak disertai adanya sanksi bagi pelanggarnya. Kondisi ini menyebabkan banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang kota. Oleh karena itu pengaturan ruang yang tepat bagi aktivitas PKL merupakan langkah yang harus dilakukan dalam rangka meminimalkan dampak negatif yang muncul. Dalam pandangan masyarakat sebagai pengguna layanan aktivitas PKL, sebagaimana hasil survai yang diperoleh, aktivitas PKL di Kota Salatiga ini sudah waktunya untuk segera ditata.

BAB V P E N U T U P

5.1. Temuan Studi

Berdasarkan hasil survai dan analisis yang dilakukan terhadap aktivitas PKL di Kota Salatiga dan persepsi masyarakat terhadap keberadaan salah satu aktivitas sektor informal tersebut, diperoleh temuan-temuan sebagai berikut :

1. Perilaku aktivitas usaha PKL :

- a. Makanan mendominasi jenis dagangan PKL Kota Salatiga, yang didorong oleh kondisi alam dan fungsi kota yang berkembang, yaitu sebagai kota transit pariwisata, kota pendidikan dan olahraga, dan kota perdagangan.
- b. Warung tenda merupakan bentuk sarana perdagangan yang paling banyak digunakan dan dominannya digunakan untuk jenis dagangan makanan, serta pada kenyataannya bentuk sarana perdagangan tersebut dipengaruhi oleh jenis dagangan.
- c. Lama aktivitas usaha yang paling banyak digunakan PKL adalah 4-8 jam, sesuai dengan pola perilaku aktivitas formal disekitarnya.
- d. Dalam penyebarannya, aktivitas PKL di Kota Salatiga cenderung bersifat *linier* mengikuti pola jalan dan trotoar yang dimanfaatkan sebagai tempat usaha, karena terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan oleh aktivitas PKL. Dengan karakteristiknya yang cenderung untuk selalu mendekati konsumen, maka trotoar yang merupakan tempat pergerakan menjadi tempat yang diminati dan dalam menjalankan aktivitasnya tersebut PKL cenderung berkelompok dengan jenis dagangan yang sama (sejenis).

2. Perilaku PKL dalam pemanfaatan ruang kota :

- a. Aktivitas PKL di Kota Salatiga berkembang di kawasan fungsional kota, yaitu suatu kawasan tempat masyarakat beraktivitas (aktivitas perdagangan, pendidikan, perkantoran, permukiman, dan aktivitas sosial ekonomi lainnya, karena kawasan tersebut memiliki intensitas kunjungan tinggi, sehingga sesuai dengan karakteristik PKL, kondisi ini memunculkan perkembangan aktivitas salah satu sektor informal tersebut.
- b. Aktivitas PKL di Kota Salatiga banyak memanfaatkan ruang berstatus ruang umum/publik, karena tidak adanya ruang yang khusus diperuntukkan bagi aktivitas tersebut.
- c. Trotoar merupakan ruang yang paling banyak diminati oleh PKL, karena merupakan ruang pergerakan bagi pejalan kaki, sehingga merupakan ruang dengan intensitas kunjungan tinggi. Akibatnya fungsi awal trotoar sebagai tempat bagi pejalan kaki berubah menjadi lokasi PKL beraktivitas.
- d. Aktivitas PKL di Kota Salatiga memanfaatkan ruang yang cukup luas, yang berarti berkurangnya ruang-ruang publik yang ada. Pemanfaatan ruang tersebut berhubungan dengan sarana perdagangan yang digunakan. Warung tenda yang merupakan bentuk sarana perdagangan yang paling banyak digunakan PKL membutuhkan penggunaan ruang yang cukup luas dibanding bentuk sarana lainnya.
- e. Pemilihan lokasi aktivitas PKL didasari bahwa lokasi tersebut dekat dengan pusat keramaian/kegiatan kota yang merupakan kulminasi berkumpulnya aktivitas masyarakat.

- f. Dalam menjalankan aktivitasnya, PKL cenderung meninggalkan sarana usaha, baik sebagian maupun seluruhnya (dengan dijaga sendiri). Akibat dari kebiasaan ini adalah munculnya dampak visual yang kurang baik.
3. Hubungan antara perilaku PKL dalam pemanfaatan ruang dan aktivitas usaha :
- a. Pemanfaatan lokasi oleh aktivitas PKL berhubungan dengan waktu aktivitas formal disekitarnya.
 - b. Jenis ruang yang digunakan PKL berhubungan dengan bentuk sarana perdagangan.
 - c. Luas ruang yang digunakan berhubungan dengan jenis dagangan dan bentuk sarana perdagangan.
4. Persepsi PKL terhadap kedekatan dan kemudahan pencapaian lokasi usaha :
- a. Lokasi usaha PKL cenderung dekat dengan lokasi aktivitas masyarakat (aktivitas perdagangan, pendidikan, perkantoran, permukiman, dan aktivitas masyarakat lainnya).
 - b. Jarak lokasi usaha dengan tempat tinggal PKL dan sumber bahan baku dagangan bukan merupakan pertimbangan utama dalam memilih lokasi usaha. Hal ini disebabkan karena adanya ketersediaan dan kemudahan sarana transportasi dari tempat tinggal menuju lokasi usaha atau sebaliknya, serta tergantung darimana sumber bahan baku dagangan yang dijual berasal.
 - c. Lokasi aktivitas PKL di Kota Salatiga merupakan lokasi yang memiliki kemudahan pencapaian oleh sarana transportasi umum kota.
5. Persepsi masyarakat terhadap keberadaan aktivitas PKL :
- a. Alasan utama masyarakat berbelanja di PKL adalah karena selera, artinya apa yang dijual atau ditawarkan PKL sesuai selera masyarakat konsumen.

- b. Keberadaan aktivitas PKL memberi manfaat bagi pelaku aktivitas sektor formal karena lokasinya yang berdekatan. Manfaat utamanya adalah mudah mendapatkan makanan/kebutuhan lain.
 - c. Keberadaan aktivitas PKL memiliki dampak negatif bagi masyarakat, yaitu trotoar menjadi sempit atau tidak dapat dilalui, parkir menjadi sulit, lingkungan menjadi kotor, dan gangguan secara visual, yaitu munculnya pemandangan kumuh, kotor, dan *semrawut*.
 - d. Penataan PKL di Kota Salatiga berdasarkan persepsi masyarakat, dipandang perlu dilakukan, karena keberadaan aktivitas tersebut saat ini cenderung membuat Kota Salatiga nampak kumuh, kotor, dan tidak teratur.
 - e. Berdasarkan persepsi masyarakat, lokasi PKL sebaiknya di lokasi perdagangan, dengan alasan efisiensi waktu, karena dapat mencari kebutuhan di satu lokasi secara bersamaan.
 - f. Masyarakat menganggap sebaiknya tidak ada pengelompokan jenis dagangan PKL pada satu lokasi, agar dagangan yang ditawarkan lebih beragam.
6. Hubungan antara kondisi PKL dan persepsi masyarakat :
- a. Berdasarkan aktivitas usahanya, PKL di Kota Salatiga memiliki dampak positif, karena ada hubungan saling membutuhkan antara PKL dan masyarakat..
 - b. Berdasarkan pemanfaatan ruang kota, aktivitas PKL memberi dampak negatif berupa perubahan fungsi ruang yang semula berfungsi sebagai ruang publik berubah menjadi ruang aktivitas PKL dan munculnya lingkungan yang secara visual nampak buruk, kotor, dan kumuh.

5.2. Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan studi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. PKL dalam menjalankan aktivitas usahanya akan memilih lokasi dan tempat usaha di ruang-ruang publik (trotoar), karena memanfaatkan ruang yang memiliki tingkat intensitas kunjungan masyarakat tinggi dan kemudahan pencapaian. Mereka cenderung tidak mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan pengguna aktivitas lain di ruang yang sama.
2. Berdasarkan aktivitas usahanya ada hubungan yang saling melengkapi (komplementer) antara PKL (pelaku aktivitas sektor formal) dan masyarakat, yang mewakili aktivitas di sektor formal.
3. Berdasarkan pemanfaatan ruang kota, aktivitas PKL cenderung tidak mempertimbangkan kepentingan pengguna aktivitas lainnya di ruang yang sama, akibatnya ada perubahan fungsi ruang yang semula berfungsi sebagai ruang publik berubah menjadi ruang aktivitas PKL dan munculnya lingkungan yang secara visual nampak buruk, kotor, dan kumuh.

5.3. Rekomendasi Bagi Pemerintah Kota Salatiga

Berdasarkan hasil survai yang telah dilakukan dan analisis terhadap hasil survai tersebut, yang kemudian diperoleh beberapa kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, maka beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai rekomendasi bagi Pemerintah Kota Salatiga berkaitan dengan aktivitas PKL adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya sisi positif dari keberadaan aktivitas PKL yang dirasakan masyarakat, maka hal yang harus dilakukan oleh pihak pengelola kota adalah menekan atau mengurangi dampak negatif dari keberadaan aktivitas sektor informal tersebut.

2. Adanya dampak negatif yang muncul dari pemanfaatan ruang yang dilakukan PKL, menyebabkan perlunya penyediaan dan pengaturan ruang bagi aktivitas PKL di ruang-ruang publik yang cukup nyaman bagi PKL dan bagi masyarakat pengguna.
3. Mengingat sifat aktivitas PKL yang selalu berada di lokasi yang memiliki tingkat intensitas kunjungan tinggi, maka di lokasi-lokasi dengan kriteria tersebut harus tersedia ruang bagi aktivitas PKL. Penyediaan ruang tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan syarat kepada pembangunan fasilitas masyarakat sosial masyarakat untuk menyediakan lokasi bagi PKL.
4. Mengingat masih terpusatnya keramaian/kegiatan masyarakat Kota Salatiga, terutama disekitar Jl. Jenderal Sudirman, sehingga aktivitas PKL cenderung berlokasi di wilayah tersebut, maka perlu dibuat aturan berupa :
 - Penetapan ruang-ruang/lokasi-lokasi yang diijinkan untuk lokasi aktivitas PKL.
 - Penetapan luas ruang usaha dan waktu aktivitas yang diijinkan.
 - Penetapan perilaku mengenai cara penyimpanan sarana usaha yang digunakan, mengingat perilaku mereka yang cenderung menimbulkan dampak visual yang buruk bagi wajah Kota Salatiga. Dalam hal ini perlu ada larangan untuk meninggalkan sarana usaha di lokasi.
5. Dalam menyusun suatu kebijakan hendaknya ada koordinasi antara pihak-pihak yang terkait di dalamnya, sehingga kebijakan yang dibuat tersebut dapat dijalankan dengan baik. Selama ini ada kecenderungan kurang konsistennya antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Selain itu peraturan yang dibuat hendaknya dibuat lengkap tidak setengah-setengah, artinya apabila ada larangan, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya.

6. Agar semua kebijakan-kebijakan yang dibuat dapat dijalankan dengan baik, maka terlebih dahulu dilakukan proses sosialisasi kebijakan tersebut atau bisa dilakukan dengan mengajak pihak-pihak terkait, termasuk PKL untuk bersama-sama menyusun kebijakan, sehingga semua pihak yang berkepentingan tidak ada yang dirugikan.

5.4. Usulan Studi Lanjut

Sehubungan dengan studi ini yang masih jauh dari sempurna, maka diharapkan dapat dilakukan studi lanjut berkaitan dengan aktivitas PKL yang merupakan aktivitas yang cukup dominan di perkotaan saat ini. Sehingga nantinya dapat menjadi sumbangan yang berharga dalam mengelola dan menangani masalah PKL, baik di Kota Salatiga khususnya maupun di perkotaan pada umumnya. Adapun studi lanjut yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- Penelaahan mengenai aktivitas PKL dari sudut sosial, ekonomi, dan budaya sehingga dapat dikenali lebih dalam apa dan siapa PKL, serta apa faktor yang mempengaruhi perilaku PKL.
- Mengevaluasi rencana tata ruang kota yang ada, dengan memasukkan unsur kegiatan sektor informal PKL sebagai elemen kota.
- Penelaahan mengenai dampak lingkungan yang muncul dari aktivitas PKL.
- Penyusunan arahan penataan ruang bagi aktivitas PKL.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anonim. 1997. *Kamus Tata Ruang*. Jakarta : Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.
- Ashihara, Yoshinobu, 1983. *The Aesthetic Town Scape*. London : The Architectural Press.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Car, Stephen. 1995. *Public Space*. Australia : Cambridge University Press.
- Daldjoeni, N. 1997. *Geografi Baru, Organisasi Keruangan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Djojodipuro, Marsudi. 1992. *Teori Lokasi*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1991. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES.
- Herlianto M. 1986. *Urbanisasi dan Pembangunan Kota*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi. 1996. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Marzuki. 2000. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : BPFE – UII.
- Mc. Gee, TG and Y.M. Yeung. 1977. *Hawkers In Southeast Asian Cities Planning For The Bazaar Economy*. Ottawa : International Development Research Centre.
- Nasir M. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nasution, S. 2000. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Rachbini, Didik J dan Abdul Hamid. 1994. *Ekonomi Informal Perkotaan Gejala Involusi Gelombang Kedua*. Jakarta : LP3ES.
- Santoso, Singgih. 2002. *SPSS Versi 10, Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : Pustaka LP3ES.
- Sethuraman, S.V.(ed.) 1981. *The Urban Informal Sector In Developing Countries, Employment, Poverty and Environment*. Geneva : International Labour Office.
- Shirvani, Hamid. 1985. *The Urban Design Process*. Melbourne : Van Nostrand Reinhold Company.
- Soehartono, Irawan. 2000. *Metode Penelitian Sosial ; Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Cetakan Ke-empat. Bandung : Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Swastha, Basu dan Irawan. 1986. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta : Liberty.
- Tika, Moh. Pabundu. 1997. *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Umar, Husein. 2001. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

ARTIKEL

- An-naf, Julissar. 1983. *Pedagang Kaki Lima Dengan Berbagai Permasalahannya*. Jurnal Galang No. 1. Lembaga Studi Pembangunan Jakarta.
- Mujiyani. 1992. *Sektor Informal di Negara Sedang Berkembang*, dalam Buletin PPT-LIPI, Jilid III No. 2, Maret 1992. Urbanisasi dan Permasalahannya. Jakarta : Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, LIPI.
- Purwoko, Herudjati. 2000. *Duka Lara Pedagang Kecil di Tengah Kota*. Suara Merdeka, 23 Oktober 2000.
- Tim Kompas. 2001. *Pedagang Kaki Lima Gagalnya Mengelola Ruang Publik*. Kompas, 5 Juni 2001.
- _____. 2001. *Uang Uang Di Pinggir Jalan*. Kompas, 5 Juni 2001.
- Wirahadikusumah, Miftah. 1991. *Sektor Informal Sebagai Bumper Pada Masyarakat Kapitalis*. Prisma, No. 5.

SKRIPSI/TESIS

- Fachrudin, M. 1998. *Studi Karakteristik Sirkulasi Pejalan Kaki Di Kawasan Perdagangan Johar*. Skripsi tidak diterbitkan. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang.

- Pangarso, FX. Budiwidodo. 1987. *Pengkajian Lingkungan Visual Dalam Kaitannya Dengan Fenomena Perwatakan Pusat Kota, Studi Kasus Pusat Kota Bandung*. Tesis tidak diterbitkan. Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung.
- Pinandhitha, Ifan. 2001. *Kajian Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Ruang Terbuka Umum Berkaitan Dengan Aktivitas Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Persepsi Pengunjung dan Pedagang Kaki Lima*. Skripsi tidak diterbitkan. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Pratihari, Catrini. 1996. *Karakteristik dan Kebutuhan Ruang Aktivitas Jasa Sektor Informal Di Kawasan Perkantoran*. Tugas Akhir tidak diterbitkan. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Institut Teknologi Bandung.
- Sudewa. 2002. *Pengaruh Keberadaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kualitas Lingkungan Kawasan Monumen Perjuangan 45 Surakarta*. Tesis tidak diterbitkan. Program Pascasarjana, Magister Teknik Pembangunan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Suroto, Widi. 1995. *Model Penyediaan Lokasi Perjajanan Bagi Pedagang Informal, Kasus Pusat Kota Surakarta*. Tesis tidak diterbitkan. Program Pascasarjana, Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung.
- Widjajanti, Retno. 2000. *Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota (Studi Kasus : Simpang Lima Semarang)*. Tesis tidak diterbitkan. Bidang Khusus Perencanaan Kota. Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana, Institut Teknologi Bandung.
- Widodo, Ahmadi. 2000. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha PKL, Studi Kasus Kota Semarang*. Tesis tidak diterbitkan. Program Pascasarjana, Magister Teknik Pembangunan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang.

HASIL PENELITIAN

- Hidayat. 1983. *Perkembangan Sektor Informal Dalam Pembangunan Nasional : Masalah dan Prospek*. Pusat Penelitian Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Fakultas Ekonomi, Universitas Pajajaran, Bandung.

TERBITAN TERBATAS

- Soetomo, Sugiono. 2000. *Urbanisasi dan Keberagaman Ruang Kota*. Diklat Kuliah. Semarang : Program Pascasarjana, Magister Teknik Pembangunan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang.

BUKU DATA/LAPORAN

- Data Pokok Untuk Pembangunan Kota Salatiga Tahun 1997. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga, 1997.
- Data Pokok Untuk Pembangunan Kota Salatiga Tahun 1998. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga, 1998.
- Data Pokok Untuk Pembangunan Kota Salatiga Tahun 1999. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga, 1999.
- Data Pokok Untuk Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2000. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga, 2000.
- Kota Salatiga Dalam Angka Tahun 2000. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga, 2000.
- Rencana Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 1996-2006. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga, 1995.
- Rencana Teknik Ruang Kota BWK I (Blok I-1, Blok I-2, Dan Blok I-3) Tahun 1998-2004. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga, 1997.

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Penataan Ruang.
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 Tentang Kebersihan, Keindahan, Kesehatan, dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1995 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1983 Tentang Pasar.
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Salatiga.
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar.
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Instruksi Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 660/128/1991 tentang Peningkatan Program Kota Salatiga Hatti Beriman.

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 330-05/248/1997 tentang Pembentukan Tim Penertiban Pedagang Kaki Lima.

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 511.3/435/1997 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Jenderal Sudirman.

Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 300-05/212/1999 Tentang Pembentukan Tim Penyuluh Pedagang Kaki Lima Di Lingkungan Pasaraya I Salatiga.

Pengumuman Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 511.3/0184/1998 tentang Ketentuan Berjualan Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Wilayah Kotatamadya Daerah Tingkat II Salatiga.